

FATF



PEDOMAN FATF

Pedoman Penilaian Risiko Nasional untuk Pencucian Uang

November 2024





The Financial Action Task Force (FATF) adalah lembaga independen antar pemerintah yang mengembangkan dan mendukung kebijakan untuk melindungi sistem keuangan global dari Pencucian uang, Pendanaan Terorisme, dan pembiayaan proliferasi senjata pemusnah massal. Rekomendasi FATF diakui sebagai standar global anti-Pencucian uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT).

Untuk informasi lebih lanjut tentang FATF, silakan mengunjungi www.fatf-gafi.org

Dokumen ini dan/atau peta apa pun yang disertakan di dalamnya tidak mengabaikan status atau kedaulatan atas wilayah mana pun, terhadap batas sempadan dan batas internasional, dan terhadap nama wilayah, kota, atau wilayah mana pun.

Referensi kutipan:

FATF (2024), Pedoman Penilaian Risiko Nasional Untuk Pencucian Uang, FATF, Paris, https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Methodsandtrends/Money-Laundering-National-Risk-Assessment-Guidance.html
--

© 2024 FATF/OECD. Semua hak dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak atau menerjemahkan publikasi ini tanpa izin tertulis sebelumnya.

Permohonan izin tersebut, untuk seluruh atau sebagian publikasi ini, harus diajukan ke Sekretariat FATF, 2 rue André Pascal 75775 Paris Cedex 16, Prancis
(faks: +33 1 44 30 61 37 atau surel: contact@fatf-gafi.org)

Kredit foto sampul © Shutterstock/SuPatMaN

Daftar Isi

Singkatan³	3
Ringkasan Eksekutif	5
Pendahuluan	6
Tujuan, Ruang Lingkup, dan Sasaran	6
Kewajiban Inti FATF Terkait dengan NRA PU	8
Struktur	8
Metodologi	9
Konsep Utama yang Relevan untuk Menilai dan Memahami Risiko PU	9
Bagian 1: Persiapan dan Pembentukan NRA	11
Komitmen Politik untuk Melaksanakan NRA	11
Mekanisme Nasional Inklusif untuk Menilai Risiko	12
Penetapan Ruang Lingkup dan Sasaran	17
Pengumpulan Informasi dan Data	20
Bagian Kesimpulan	30
Bagian 2: Menilai dan Memahami Risiko PU	32
Pemindaian Lingkungan	32
Proses Analitis	34
Analisis Ancaman	35
Analisis Kerentanan	43
Penilaian Risiko	45
Pemindaian Cakupan Masa Depan	47
Bagian Kesimpulan	47
Bagian 3: Tindakan Pasca-NRA	48
Menyelaraskan Strategi dan Kebijakan APU dengan Risiko	48
Sosialisasi dan Keterlibatan Pemangku Kepentingan	59
Umpan Balik dan Perbaikan Proses NRA	61
Bagian Kesimpulan	64
Lampiran A. Jenis Penilaian Risiko yang Melengkapi NRA	65
Penilaian Risiko Sektoral dan Tematik	65
Penilaian Risiko Supranasional dan Subnasional	66
Lampiran B. Ringkasan Tingkat Tinggi terhadap Tanggapan atas Konsultasi Publik	71

Singkatan

AI	Artificial Intelligence	Kecerdasan Buatan
AML	Anti-Money Laundering	Anti-Pencucian Uang (APU)
ASEAN	Association of Southeast Asian Nations	Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara
CDD	Customer Due Diligence	Prinsip Mengenali Pengguna Jasa/Uji Tuntas Nasabah
CFATF	Caribbean Financial Action Task Force	Gugus Tugas Aksi Keuangan Karibia
CFT	Counter Financing of Terrorism	Pemberantasan Pendanaan Terorisme
CFTP	Countering the Financing of Terrorism and Proliferation	Pemberantasan Pendanaan Terorisme dan Proliferasi
DNFBP	Designated Non-Financial Business and Professions	Penyedia Barang dan Jasa dan Profesi
EAG	Eurasian Group	Kelompok Eurasia
EDD	Enhanced Due Diligence	Uji Tuntas yang Ditingkatkan
EU	European Union	Uni Eropa
FATF	Financial Action Task Force	Gugus Tugas Aksi Keuangan
FI	Financial Institution	Lembaga Keuangan
FIU	Financial Intelligence Unit	Unit Intelijen Keuangan
FSC	Financial Security Committee	Komite Keamanan Keuangan
FSRB	FATF-Style Regional Body	Badan Regional Berbasis FATF
ICRG	International Co-operation Review Group	Kelompok Peninjau Kerja Sama Internasional
IDB	Inter-American Development Bank	Bank Pembangunan Antar-Amerika
IFI	International Financial Institution	Lembaga Keuangan Internasional
IMF	International Monetary Fund	Dana Moneter Internasional
INR	Interpretive Note to Recommendation	Catatan Interpretatif atas Rekomendasi
IO	Immediate Outcome	Hasil Langsung
IOSCO	International Organization of Securities Commissions	Organisasi Internasional Komisi Sekuritas

KPI	Key Performance Indicator	Indikator Kinerja Utama
KYC	Know Your Customer	Prinsip Mengenali Pengguna Jasa
LEA	Law Enforcement Agency	Aparat Penegak Hukum
MER	Mutual Evaluation Report	Laporan Evaluasi Bersama
ML	Money Laundering	Pencucian uang
MLA	Mutual Legal Assistance	Bantuan Hukum Bersama
MOU	Memorandum of Understanding	Nota Kesepahaman
NPO	Non-Profit Organization	Organisasi Nirlaba
NRA	National Risk Assessment	Penilaian Risiko Nasional
PESTEL	Political, Economic, Social, Technological, Environmental, and Legal	Politik, Ekonomi, Sosial, Teknologi, Lingkungan dan Hukum
PF	Proliferation Financing	Pembiayaan Proliferasi
PPP	Public-Private Partnership	Kemitraan Publik-Swasta
R	Recommendation	Rekomendasi
RBA	Risk-Based Approach	Pendekatan Berbasis Risiko
SAR	Suspicious Activity Report	Laporan Aktivitas Mencurigakan
SDD	Simplified Due Diligence	PMPJ/Uji Tuntas Sederhana
SNRA	Supranational Risk Assessment	Penilaian Risiko Supranasional
SRB	Self-Regulatory Bodies	Badan Regulator Mandiri
STR	Suspicious Transaction Report	Laporan Transaksi Mencurigakan
TBML	Trade-based Money Laundering	Pencucian uang berbasis perdagangan
TF	Terrorist Financing	Pendanaan Terorisme
UNODC	United Nations Office on Drugs and Crime	Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Narkoba dan Kejahatan
VA	Virtual Asset	Aset Virtual
VASP	Virtual Asset Service Provider	Penyedia Layanan Aset Virtual
WBG	World Bank Group	Grup Bank Dunia

1. Ringkasan Eksekutif

Pemahaman risiko pencucian uang merupakan elemen dasar yang menjadi landasan diciptakannya sistem APU/PPT nasional. Hal ini diperkuat oleh Rekomendasi 1 Standar FATF, yang mengharuskan negara-negara untuk “mengidentifikasi, menilai, dan memahami” risiko pencucian uang mereka, dan mengambil tindakan untuk memastikan bahwa risiko-risiko ini “dimitigasi secara efektif”.

Pengembangan pemahaman risiko yang akurat dan terkini merupakan proses dinamis yang berkelanjutan bagi suatu negara. Proses yang mengharuskan respons terhadap perubahan faktor lingkungan, penilaian informasi baru secara terus-menerus, dan pemantauan keadaan atas risiko yang mungkin muncul atau terwujud. Oleh karena itu, penting bagi suatu negara untuk melakukan pendekatan yang terstruktur dan koheren dalam mengembangkan pemahaman risiko yang terkini. Salah satu pendekatan umum yang dapat diambil oleh suatu negara adalah melalui pelaksanaan Penilaian Risiko Nasional (NRA).

NRA merupakan suatu proses komprehensif yang digunakan oleh negara-negara untuk mengidentifikasi, menilai, dan memahami risiko pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme yang mereka hadapi. Proses ini melibatkan evaluasi ancaman dan kerentanan, penentuan tingkat risiko, dan pengembangan strategi yang selaras dengan risiko pencucian uang. Hal ini termasuk mengambil langkah-langkah yang lebih ketat di mana risikonya lebih tinggi dan mengambil langkah-langkah yang lebih sederhana atau lebih ringan di mana risikonya lebih rendah. Meskipun hasil akhir dari proses ini dapat berupa produk tertulis atau tidak, pemahaman yang dicapai dan tindakan lanjutan yang diambil sangatlah penting.

NRA menyediakan landasan berbasis bukti untuk pembuatan kebijakan yang terinformasi, alokasi sumber daya, dan implementasi langkah-langkah APU/PPT yang efektif. Hal ini memastikan bahwa strategi nasional selaras dengan lanskap risiko spesifik negara dan bahwa strategi tersebut mengatasi ancaman domestik dan internasional sejauh ancaman tersebut terkait dengan negara tersebut.

Dokumen ini bertujuan untuk membantu negara-negara dalam melakukan NRA yang berfokus pada penilaian risiko pencucian uang. Dokumen ini telah dikembangkan dengan mempertimbangkan pengalaman berbagai negara dari seluruh Jaringan Global FATF dalam dekade terakhir – lebih dari 90 negara berkontribusi untuk pedoman ini – dan dimaksudkan untuk menunjukkan praktik baik yang telah digunakan oleh negara-negara untuk membantu negara lain dalam menyesuaikan praktik baik ini ke dalam konteks nasional mereka sendiri. Dokumen ini berisi tiga bagian:

- i. **Bagian 1: Persiapan dan Pembentukan NRA** – Bagian ini mengidentifikasi prasyarat pelaksanaan NRA yang sukses. Bagian ini mencakup bagian-bagian dasar utama NRA seperti komitmen politik, mekanisme NRA yang inklusif, penetapan tujuan, dan perolehan informasi dan data. Langkah-langkah ini tidak harus berupa langkah linier, tetapi semuanya harus dipertimbangkan dan dipersiapkan sebelum memulai pekerjaan analitis NRA.
- ii. **Bagian 2: Menilai dan Memahami Risiko Pencucian Uang** – Bagian ini memberikan pendekatan linier dan terstruktur bagi negara-negara yang dapat diikuti dalam melakukan analisis ancaman, kerentanan, dan risiko. Tidak ada metodologi baku yang harus diikuti negara-negara, dan proses NRA suatu negara harus mempertimbangkan kapasitasnya, serta risiko dan konteks uniknya. Akan tetapi, serangkaian langkah yang diuraikan dalam pedoman ini telah teridentifikasi sebagai praktik yang baik.
- iii. **Bagian 3: Tindakan Pasca-NRA** – Bagian ini mengidentifikasi praktik simultan yang harus dilakukan suatu negara setelah proses analitis selesai dilakukan. Dokumen ini membahas langkah-langkah yang dapat diambil oleh suatu negara untuk memastikan bahwa langkah-langkah mitigasi pencucian uang yang dilakukannya sesuai dengan risiko yang teridentifikasi, komunikasi temuan NRA, dan penyempurnaan proses NRA.

Pendahuluan

Tujuan, Ruang Lingkup, dan Sasaran

Mengidentifikasi, menilai, dan memahami risiko pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal merupakan bagian penting dari implementasi rezim anti pencucian uang/pemberantasan pendanaan terorisme (APU/PPT) nasional yang meliputi undang-undang, peraturan, penegakan hukum, dan langkah-langkah lain untuk mengurangi risiko pencucian uang/pendanaan terorisme. Hasil Penilaian Risiko Nasional (NRA) harus memberikan informasi yang berguna kepada lembaga keuangan, bisnis dan profesi non-keuangan yang ditunjuk (DNFBP), dan penyedia layanan aset virtual (VASP) untuk mendukung penilaian dan langkah-langkah mitigasi risiko mereka sendiri. Pemahaman yang tepat mengenai risiko pencucian uang/pendanaan terorisme akan menginformasikan dan mendukung penerapan langkah-langkah APU/PPT oleh negara-negara yang proporsional dengan risikonya, yaitu pendekatan berbasis risiko (RBA) yang merupakan inti dari Standar FATF dan harus membantu negara-negara dalam memprioritaskan dan mengalokasikan sumber daya secara efisien.

FATF telah menekankan pentingnya hal ini dengan memperkenalkan Rekomendasi 1 pada tahun 2012, yang menitik-beratkan perlunya mengidentifikasi, menilai, memahami, dan memitigasi risiko pencucian uang/pendanaan terorisme sebagai dasar fundamental untuk implementasi efektif dari 40 Rekomendasi FATF. Sejalan dengan Standar yang telah direvisi, banyak negara telah melakukan Penilaian Risiko Nasional (NRA) untuk mengkonsolidasikan dan menyelaraskan pemahaman risiko pencucian uang/pendanaan terorisme mereka di tingkat nasional. Hal ini juga menjadi langkah utama bagi banyak negara dalam menunjukkan pemahaman mereka tentang risiko dan meningkatkan kemampuan mereka untuk memerangi pencucian uang/pendanaan terorisme.

Untuk membantu negara-negara dalam upaya ini, FATF menerbitkan pedoman untuk melakukan Penilaian Risiko Nasional terhadap pencucian uang dan pendanaan terorisme pada tahun 2013.¹ Sejak itu, negara-negara di seluruh Jaringan Global FATF telah memperoleh pengalaman substansial dalam mengembangkan NRA, yang mengarah pada penyempurnaan pedoman dan metodologi. FATF, menyadari akan adanya perkembangan dalam Penilaian Risiko, memperbarui pedoman NRA Pendanaan Terorisme pada tahun 2019² dan setelah adanya perubahan pada Standar FATF, memperkenalkan pedoman mengenai NRA Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal pada tahun 2021.³ Dokumen pedoman ini memperbarui pedoman tahun 2013, tetapi hanya membahas NRA Pencucian Uang.

NRA Pencucian Uang merupakan evaluasi komprehensif yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengidentifikasi dan menilai risiko pencucian uang negara tersebut. Evaluasi ini melibatkan analisis ancaman dan kerentanan pencucian uang pada sejumlah faktor, termasuk sektor, aktivitas, lokasi geografis, jenis klien, produk dan saluran, serta pengembangan langkah-langkah mitigasi risiko berbasis bukti untuk memperkuat sistem Anti-Pencucian Uang di negara tersebut.

NRA Pencucian Uang mengedepankan pendekatan holistik terhadap risiko dan bertujuan untuk mengembangkan pemahaman dasar tentang risiko di antara semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam sistem Anti Pencucian Uang. Suatu NRA harus meliputi risiko lintas batas, dan dampaknya dapat meluas melampaui batas negara, mendukung pemahaman dan pengurangan pencucian uang dalam konteks nasional, serta internasional.

¹ FATF (2013), Pedoman Penilaian Risiko Nasional Terhadap Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, National money laundering and terrorist financing risk assessment (fatf-gafi.org)

² FATF (2019), Panduan Penilaian Risiko Pendanaan Terorisme, Terrorist Financing Risk Assessment Guidance (fatf-gafi.org)

³ FATF (2021), Pedoman Penilaian Risiko Pendanaan Proliferasi, www.fatfgafi.org/content/fatfgafi/en/publications/Financingofproliferation/Proliferationfinancing-risk-assessment-mitigation.html

Meskipun telah terjadi kemajuan pesat dalam bidang ini dalam dekade terakhir, masih ada tantangan yang harus dihadapi. Laporan FATF mengenai Status Efektivitas dan Kepatuhan terhadap Standar FATF⁴ yang diterbitkan pada bulan April 2022

menunjukkan bahwa meskipun kepatuhan terhadap R.1 meningkat sebesar 24% melalui proses tindak lanjut putaran ke-4, masih diperlukan adanya peningkatan, khususnya dalam pengumpulan data, pelatihan dan kesadaran pemangku kepentingan, serta komunikasi yang efektif tentang temuan NRA. Pengalaman dan pengetahuan bersama yang diperoleh dari Jaringan Global harus dimanfaatkan, serta pandangan dari penyedia bantuan teknis dan akademisi yang meneliti topik ini, untuk mempromosikan tindakan yang berkelanjutan dan efektif untuk meningkatkan sistem Anti Pencucian Uang di seluruh dunia. Pedoman ini melanjutkan prinsip-prinsip dasar yang telah dieksplorasi dalam pedoman NRA Pencucian Uang/Pendanaan Terorisme FATF pada tahun 2013 dan memberikan contoh praktis dan praktik terbaik dari Jaringan Global yang mencerminkan pengalaman selama satu dekade yang dimiliki negara-negara dalam mengembangkan NRA.

Pedoman ini disusun dari berbagai sumber, termasuk masukan yang diterima dari 90 negara di seluruh Jaringan Global FATF dalam dua kuesioner, Laporan Evaluasi Bersama (MER), Penilaian Risiko Nasional (NRA) yang dipublikasikan, penelitian dari badan-badan internasional, seperti Grup Bank Dunia (WBG) dan Dana Moneter Internasional (IMF), serta hasil konsultasi publik. Tujuannya adalah untuk memberikan pedoman dan praktik terbaik kepada negara-negara tentang pelaksanaan NRA Pencucian Uang. Pedoman ini menekankan pentingnya memahami lanskap risiko Pencucian Uang yang terus berkembang, mengatasi tantangan umum, dan mengidentifikasi praktik-praktik baik dalam melaksanakan NRA yang berfokus pada aspek prosedural dan struktural yang penting untuk Penilaian Risiko yang berdampak, berdasarkan pengalaman negara-negara di seluruh Jaringan Global. Pedoman ini menyediakan konsep dasar dan prinsip-prinsip yang diakui secara global untuk memandu negara-negara dalam proses pengambilan keputusan mereka, menawarkan kerangka kerja yang fleksibel untuk memfasilitasi evaluasi komprehensif risiko pencucian uang di tingkat nasional.

Tujuan pedoman ini terutama adalah untuk memberikan saran praktis kepada negara-negara yang akan meningkatkan efektivitas NRA Pencucian Uang, mendorong pengambilan keputusan yang tepat dan alokasi sumber daya untuk mengambil pendekatan berbasis risiko dalam mencegah dan mengurangi risiko pencucian uang yang teridentifikasi.

Dokumen panduan ini bukan merupakan Standar FATF dan oleh karena itu tidak dimaksudkan untuk menetapkan tindakan spesifik yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban berdasarkan Rekomendasi 1 dan Catatan Interpretatif (INR) 1 atau Standar FATF lainnya. Kriteria kepatuhan teknis dan penilaian dapat ditemukan dalam metodologi penilaian FATF. Praktik-praktik yang dijelaskan dalam panduan ini dimaksudkan agar dapat berfungsi sebagai contoh yang dapat memfasilitasi pelaksanaan kewajiban dengan cara yang sesuai dengan Standar FATF.

Pedoman ini telah disusun dengan tujuan untuk memenuhi beragam kebutuhan negara, dengan mengakui bahwa kebutuhan tersebut bervariasi tergantung pada tingkat kematangan mekanisme Penilaian Risiko di setiap negara. Oleh karena itu, pedoman yang telah dicari berbagai negara ini bertujuan untuk memberikan konsep dan aktivitas utama, yang dilengkapi dengan dukungan yang memadai dan sarana praktis yang dapat menjawab kebutuhan negara, tergantung pada apakah negara tersebut berada pada tahap awal persiapan Penilaian Risiko Nasional (NRA) pertamanya, atau apakah negara tersebut sudah memiliki mekanisme yang mapan dan efektif. Pedoman ini bertujuan untuk mendorong agar semua negara dapat secara efektif mengidentifikasi, menilai, dan memahami risiko mereka, dengan mengakui bahwa tingkat rincian dan kompleksitas akan bervariasi berdasarkan risiko dan konteks suatu negara. Pedoman ini dirancang untuk menawarkan fleksibilitas, memastikan relevansi dan penerapan di seluruh Jaringan Global.

Pedoman ini mencakup praktik terbaik yang terpilih dari berbagai negara di seluruh Jaringan Global FATF. Negara-negara dengan proses NRA yang kurang matang sering menghadapi tantangan dalam mengembangkan

⁴ FATF (2022), Laporan Mengenai Status Efektivitas dan Kepatuhan terhadap Standar FATF, www.fatf-gafi.org/content/fatf-gafi/en/publications/Fatfgeneral/Effectiveness-compliancestandards.html

NRA mereka. Banyak dari negara-negara ini berada pada tahap awal membangun budaya Penilaian Risiko yang berkelanjutan dan mungkin menghadapi hambatan seperti keterbatasan sumber daya, data yang tidak mencukupi, dan kurangnya personel yang berpengalaman. Menyadari kesulitan-kesulitan ini, pedoman ini menguraikan strategi-strategi utama untuk memastikan NRA yang efektif, memberikan rekomendasi yang disesuaikan untuk mengatasi tantangan-tantangan spesifik yang dihadapi.

Keanekaragaman praktik baik menunjukkan bagaimana negara-negara dengan risiko dan konteks yang berbeda, sistem hukum, dan kematangan langkah-langkah anti-pencucian uang telah berhasil menerapkan aspek-aspek Rekomendasi 1.

Kewajiban Utama FATF⁵ Terkait dengan NRA Pencucian Uang

Bagian ini menguraikan persyaratan FATF untuk mengidentifikasi dan menilai risiko pencucian uang di tingkat negara. Komponen utama dari Standar FATF adalah pemahaman tentang risiko pencucian uang dan pendekatan berbasis risiko, yang mengharuskan negara untuk menyesuaikan langkah-langkah anti-pencucian uang mereka sesuai dengan risiko yang teridentifikasi. Rekomendasi FATF berikut ini merupakan inti dari NRA terkait pencucian uang:

- **Rekomendasi 1 (R.1):** R.1 menyatakan bahwa “Negara-negara harus mengidentifikasi, menilai, dan memahami risiko Pencucian uang dan Pendanaan Terorisme untuk negara tersebut, dan harus mengambil tindakan, termasuk menunjuk otoritas atau mekanisme untuk mengoordinasikan tindakan untuk menilai risiko, dan menerapkan sumber daya, yang bertujuan untuk memastikan risiko tersebut dimitigasi secara efektif”.
- **Catatan Interpretatif untuk Rekomendasi 1 (INR.1):** INR.1 mengklarifikasi bahwa negara-negara harus mengambil langkah-langkah untuk mengidentifikasi dan menilai risiko pencucian uang mereka secara “berkelanjutan” untuk: (1) menginformasikan potensi perubahan pada rezim Anti-Pencucian Uang negara tersebut, termasuk perubahan pada undang-undang, peraturan; dan (2) membantu dalam pengalokasian dan prioritas sumber daya Anti-Pencucian Uang oleh otoritas yang berwenang. Negara-negara harus memiliki mekanisme untuk memberikan informasi tentang hasil Penilaian Risiko kepada semua otoritas yang berwenang dan Badan Regulator Mandiri (SRB), lembaga keuangan, dan Bisnis dan Profesi Non-Kuangan yang Ditunjuk (DNFBP) yang relevan.
- **Rekomendasi 2 (R.2):** R.2 mengidentifikasi bahwa, “Negara-negara harus memiliki kebijakan nasional untuk Anti-Pencucian Uang/Pemberantasan Pendanaan Terorisme/Pemberantasan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, yang didasarkan pada risiko yang telah teridentifikasi, yang harus ditinjau secara berkala, dan harus menunjuk otoritas atau memiliki mekanisme koordinasi atau mekanisme lain yang bertanggung jawab atas kebijakan tersebut.”

Penyusunan

Pedoman ini disusun dalam tiga bagian:

Bagian 1: Persiapan dan Pembentukan NRA – Bagian ini mengidentifikasi prasyarat untuk NRA yang sukses. Bagian ini meliputi bagian-bagian dasar utama dari NRA seperti komitmen politik, mekanisme NRA yang inklusif, penetapan tujuan, dan perolehan informasi dan data. Langkah-langkah ini tidak harus berupa langkah linier, tetapi semuanya harus dipertimbangkan dan dipersiapkan sebelum pekerjaan analitis NRA dapat dimulai.

⁵ Terdapat banyak bagian lain dari Standar FATF yang melibatkan pendekatan berbasis risiko, seperti R.15/INR.15, R.10, R.24/25 dan INR.24/25, R.26 dan R.28. Bagian ini merujuk pada bagian-bagian yang dianggap sebagai inti dari NRA pencucian uang.

Bagian 2: Menilai Risiko Pencucian Uang – Bagian ini memberikan pendekatan linier dan terstruktur bagi negara-negara untuk diikuti dalam melakukan analisis ancaman, kerentanan, dan risiko. Tidak ada metodologi baku yang harus diikuti negara-negara, dan proses NRA suatu negara harus mempertimbangkan kapasitas, risiko, dan konteks negara tersebut, tetapi serangkaian langkah ini telah diidentifikasi sebagai praktik yang baik.

Bagian 3: Tindakan Pasca-NRA – Bagian ini mengidentifikasi praktik paralel yang harus dilakukan suatu negara setelah selesainya proses analitis. Pedoman ini mencakup langkah-langkah yang dapat diambil suatu negara untuk memastikan bahwa langkah-langkah mitigasi pencucian uang (yang dilakukannya sebanding dengan risiko yang teridentifikasi, komunikasi temuan NRA, dan penyempurnaan proses NRA).

Metodologi

Pembaruan pedoman FATF Pencucian Uang ini dipimpin bersama oleh Meksiko dan Hong Kong, Tiongkok, yang mendapatkan masukan dari tim proyek yang terdiri dari 33 anggota FATF dan FSRB, serta organisasi pengamat.⁶

Pedoman ini menggabungkan masukan dari sejumlah delegasi dalam Jaringan Global FATF mengenai pengalaman, tantangan, dan praktik baik yang mereka alami dalam menilai risiko pencucian uang. Ada 59 delegasi yang memberikan tanggapan terhadap kuesioner pertama dan 70 delegasi yang menanggapi kuesioner lanjutannya, yang meminta masukan, khususnya tentang tantangan utama dan pelajaran yang dipetik di semua area utama yang diuraikan di atas. Sekretariat FATF juga melakukan tinjauan terhadap NRA dari 69 anggota FATF dan FSRB serta MER dari seluruh Jaringan Global.

Tim proyek mencari masukan dari sektor swasta melalui Forum Konsultatif Sektor Swasta FATF pada bulan April 2024 dan melalui konsultasi publik pada bulan Juli 2024. Konsultasi publik mengajukan pertanyaan terkait keterlibatan sektor swasta dalam proses NRA, termasuk praktik terbaik untuk meminta umpan balik sektor swasta dan menjangkau pemangku kepentingan sektor swasta tentang temuan NRA. Tim proyek menerima 501 tanggapan atas konsultasi publik, dari berbagai sektor berbeda termasuk lembaga keuangan, Bisnis dan Profesi Non-Keuangan yang Ditunjuk, akademisi, organisasi nirlaba, dan konsultan.

Konsep Utama yang Relevan untuk Menilai dan Memahami Risiko Pencucian Uang

Risiko terjadi ketika ancaman berhasil memanfaatkan kerentanan sehingga menimbulkan konsekuensi. Definisi di bawah ini menyelidiki bagaimana hal ini berkaitan dengan risiko pencucian uang.

- **Ancaman**, secara umum, adalah individu, kelompok, atau aktivitas yang berpotensi menyebabkan kerugian bagi negara, masyarakat, atau ekonomi. Dalam konteks pencucian uang, ancaman merujuk pada individu, kelompok, atau entitas kriminal dan fasilitator mereka yang berupaya menyembunyikan asal usul dana ilegal melalui aktivitas pencucian uang di masa lalu, sekarang, dan masa depan (dan bukan tindak pidana asal itu sendiri). Penilaian ancaman biasanya berfungsi sebagai titik awal penting dalam mengembangkan pemahaman tentang risiko pencucian uang. Oleh karena itu, memahami lingkungan tempat tindak pidana asal dilakukan dan hasil kejahatan dihasilkan untuk mengidentifikasi sifat, ukuran, dan volumenya sangat penting untuk melakukan Penilaian Risiko Pencucian Uang. Dalam beberapa kasus, jenis penilaian ancaman tertentu dapat berfungsi sebagai pelopor untuk Penilaian Risiko Pencucian Uang.

⁶ Bahrain, Bhutan, Brasil, Kanada, Kepulauan Cayman, Sekretariat Gugus Tugas Aksi Keuangan Karibia (CFATF), Tiongkok, Sekretariat Kelompok Eurasia (EAG), Komisi Eropa, Kelompok Egmont, Finlandia, Prancis, Yunani, Bank Pembangunan Inter-Amerika (IDB), Dana Moneter Internasional (IMF), India, Irlandia, Israel, Italia, Kirgistan, Luksemburg, Portugal, Arab Saudi, Singapura, Afrika Selatan, Spanyol, Swedia, Uni Emirat Arab, Inggris Raya, Amerika Serikat, Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Narkoba dan Kejahatan (UNODC), Uzbekistan, Bank Dunia.

- **Kerentanan** dapat dieksploitasi oleh ancaman atau dapat mendukung atau memfasilitasi aktivitasnya. Pada konteks Penilaian Risiko Pencucian Uang, mempelajari kerentanan sebagai sesuatu yang berbeda dari ancaman berarti memfokuskan pada, misalnya, fitur-fitur inheren dari sektor tertentu, produk keuangan, atau jenis layanan yang membuatnya menarik dan layak untuk tujuan pencucian uang. Karakteristik inheren tertentu dari suatu negara juga dapat membuatnya rentan terhadap pencucian uang, termasuk pembentukan sektor keuangan, perdagangan, atau perusahaan yang besar. Kerentanan juga dapat berkaitan dengan kelemahan dalam hukum, peraturan, pengawasan, atau penegakan hukum. Misalnya, pengendalian yang rendah untuk anti-pencucian uang, serta ketidakpatuhan atau kepatuhan sebagian atas undang-undang nasional terhadap persyaratan Rekomendasi FATF akan berdampak pada kerentanan di suatu negara. Negara-negara dapat menyertakan kecukupan atau kualitas pengendalian anti-pencucian uang dalam penilaian kerentanan atau memfokuskan penilaian kerentanan mereka pada kerentanan inheren dan menilai pengendalian sebagai komponen risiko pencucian uang yang berdiri sendiri.
- **Konsekuensi** mengacu pada dampak atau kerugian yang dapat ditimbulkan oleh pencucian uang dan mencakup efek dari aktivitas kriminal yang mendasarinya pada sistem dan lembaga keuangan, serta ekonomi dan masyarakat secara luas. Konsekuensi ini dapat bersifat domestik dan internasional, mencerminkan aktivitas pencucian uang yang sifatnya luas. Konsekuensi pencucian uang dapat bersifat jangka pendek atau jangka panjang dan berkaitan dengan kerugian bagi penduduk, komunitas tertentu, lingkungan bisnis, dan kepentingan nasional atau internasional. Hal ini juga dapat merusak reputasi dan daya tarik sektor keuangan suatu negara. Negara-negara dapat memfokuskan pada pemahaman komprehensif tentang ancaman dan kerentanan mereka sambil mempertimbangkan konsekuensi potensial sebagai bagian dari Penilaian Risiko keseluruhan mereka. Pendekatan ini memungkinkan prioritas upaya mitigasi yang efektif dan membantu memperkuat ketahanan sistem keuangan dan ekonomi terhadap dampak pencucian uang.
Istilah-istilah kunci penting lainnya yang relevan dengan pelaksanaan Penilaian Risiko didefinisikan di bawah ini.
- **Penilaian Risiko Pencucian Uang nasional** adalah suatu proses yang didasarkan pada metodologi yang disepakati oleh semua pihak yang terlibat, yang berupaya untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memahami risiko pencucian uang dan berfungsi sebagai langkah pertama dalam mengatasinya. Meskipun penilaian dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, Penilaian Risiko Pencucian Uang harus meliputi ancaman (termasuk tindak pidana asal, karakteristik pelaku tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang) dan kerentanan (termasuk sektor, saluran, lokasi geografis, jenis klien, produk dan layanan, kekurangan atau kelemahan hukum, peraturan, pengawasan dan penegakan hukum) untuk dapat menarik kesimpulan tentang risiko di tingkat nasional. Penilaian Risiko harus menjadi titik awal untuk menginformasikan strategi dan kebijakan nasional, pengembangan rencana aksi dan prioritas langkah-langkah mitigasi risiko dan alokasi sumber daya untuk memperkuat sistem Anti-Pencucian Uang sesuai dengan risiko yang diidentifikasi.
- **Pendekatan berbasis risiko (RBA)** berarti bahwa negara, otoritas yang berwenang, lembaga keuangan, dan Bisnis dan Profesi Non-Keuangan yang Ditunjuk mengidentifikasi, menilai, dan memahami risiko pencucian uang yang mereka hadapi, dan melakukan langkah-langkah mitigasi yang tepat dan proporsional sesuai dengan tingkat risikonya. Hal ini termasuk melakukan langkah-langkah yang lebih intensif jika risikonya lebih tinggi dan melakukan langkah-langkah yang lebih sederhana atau lebih ringan jika risikonya lebih rendah.
- **Langkah-langkah mitigasi risiko** adalah tindakan, pengendalian, atau strategi yang diimplementasikan untuk mengelola risiko pencucian uang yang teridentifikasi. Langkah-langkah mitigasi risiko dapat mencakup tindakan legislatif, regulasi, pengawasan, penegakan hukum, atau tindakan administratif lainnya yang dilakukan dalam rangka mengurangi risiko dalam kerangka kerja Anti-Pencucian Uang nasional.

Bagian 1: Persiapan dan Pembentukan NRA

Meskipun NRA pada intinya adalah proses analitis, ada beberapa prasyarat penting yang perlu dimiliki suatu negara sebelum negara tersebut dapat melaksanakan NRA dengan sukses. Langkah-langkah yang dibahas dalam bagian ini tidak secara eksplisit tercakup dalam Standar FATF tetapi merupakan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk memenuhi persyaratan Standar FATF. Langkah-langkah ini tidak bersifat linier; Idealnya, langkah-langkah tersebut harus sudah tersedia sebelum NRA dimulai. Prasyarat penting akan dibahas dalam bagian ini dan meliputi:

- i. Komitmen Politik untuk Melaksanakan NRA
- ii. Mekanisme Nasional yang Inklusif untuk Menilai Risiko
- iii. Penetapan Ruang Lingkup dan Tujuan yang Tepat
- iv. Pengumpulan Informasi dan Data

Tidak ada “satu pendekatan yang sesuai untuk semua” dalam NRA, dan negara-negara dianjurkan untuk melakukan pendekatan yang sesuai dengan kapasitas, risiko, dan konteks mereka. Meskipun negara-negara harus menyesuaikan NRA dengan konteks mereka, langkah-langkah ini tetap menjadi prasyarat untuk keberhasilan NRA terlepas dari kapasitas, risiko, dan konteks negara tersebut.

Komitmen Politik untuk Melaksanakan NRA

Komitmen politik terhadap proses NRA sangat penting untuk keberhasilan proses Penilaian Risiko. Komitmen politik menunjukkan bahwa NRA merupakan prioritas bagi negara – pejabat pemerintah senior dapat secara terbuka mendukung proses tersebut dan menyatakan dukungan mereka, menyoroti pentingnya dan meningkatkan kesadaran di antara para pemangku kepentingan. Indikator komitmen politik yang kuat dapat dilihat ketika koordinator NRA dan/atau kelompok kerja diberdayakan dan semua ahli yang terlibat dalam proses tersebut diberikan tingkat otonomi dan perlindungan yang sesuai untuk melakukan pekerjaan mereka secara efektif.

Dukungan tersebut akan membantu menyatukan para ahli di bidang kebijakan, penegakan hukum, Unit Intelijen Keuangan (FIU), pengawasan, regulasi, sanksi, dan otoritas kompeten lainnya jika mereka belum berkolaborasi dalam kebijakan dan prioritas APU/PPT. Hal ini dapat memfasilitasi dan mendorong koordinasi di antara berbagai lembaga pemerintah yang terlibat dalam proses tersebut dan meningkatkan berbagi informasi, komunikasi, dan kolaborasi.

Komitmen politik tingkat tinggi memastikan bahwa sumber daya dan anggaran dialokasikan untuk proses tersebut di semua lembaga yang terlibat, untuk memastikan tenggat waktu NRA dipatuhi dan untuk menghindari pergantian staf yang berlebihan yang dapat mengganggu proses tersebut. Hal ini juga dapat meliputi investasi dalam solusi teknologi untuk memfasilitasi bagian-bagian dari proses dan meningkatkan konsistensi melalui pengulangan di masa mendatang. Salah satu contohnya adalah investasi dalam alat pengumpulan data, yang dapat meningkatkan akurasi dan keandalan temuan NRA dan memungkinkan negara agar tidak perlu bergantung pada sumber eksternal. Komitmen politik juga dapat membantu koordinasi dan kerja sama di tingkat internasional ketika melakukan Penilaian Risiko Pencucian Uang.

Kotak 1. Statistik Komitmen Politik Tingkat Tinggi

Menurut tanggapan yang diterima dari kuesioner proyek, banyak negara menghadapi tantangan dalam mengkoordinasikan penilaian risiko nasional. Beberapa masalah yang diangkat oleh negara-negara tersebut dapat dikaitkan dengan kurangnya komitmen politik di tingkat tertinggi, termasuk kurangnya koordinasi nasional (35%), keterbatasan anggaran, sumber daya, atau solusi teknis (21%), dan kurangnya komitmen dari pihak-pihak yang terlibat (9%).

Pada survei yang dilakukan oleh Bank Dunia⁷ di antara beragam kelompok ahli negara yang terlibat dalam NRA, 9% responden menunjukkan bahwa kurangnya komitmen politik menjadi hambatan signifikan terhadap kualitas NRA mereka. Dalam survei yang sama, menurut lebih dari 60% peserta, tantangan paling signifikan berhubungan dengan kurangnya komitmen politik, seperti kesulitan memperoleh sumber daya, masalah koordinasi, dan kurangnya pemberdayaan kelompok kerja NRA.

Mekanisme Nasional Inklusif untuk Menilai Risiko

Standar FATF mensyaratkan bahwa negara-negara harus mengidentifikasi, menilai, dan memahami risiko pencucian uang di tingkat negara dengan “menunjuk suatu otoritas atau mekanisme untuk mengkoordinasikan tindakan untuk menilai risiko, dan menerapkan sumber daya, yang bertujuan untuk memastikan risiko tersebut dimitigasi secara efektif.” FATF memberikan fleksibilitas bagi negara-negara untuk mengadopsi pendekatan berdasarkan konteks mereka dan tidak mensyaratkan pembentukan badan permanen untuk mengembangkan Penilaian Risiko Nasional (NRA). Meskipun demikian, mekanisme yang dipilih harus mendorong kerja sama, koordinasi, dan partisipasi yang baik dari berbagai otoritas nasional untuk memastikan pelaksanaan Penilaian Risiko yang komprehensif. Negara-negara yang paling kuat dan efektif menunjukkan bahwa pertemuan rutin dari pihak-pihak yang terlibat sangat penting untuk memastikan penyusunan NRA berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Idealnya, negara-negara melihat manfaat dari proses NRA dan pembaruan risiko akan dibagikan di antara para peserta bahkan di antara pembaruan NRA.

⁷ Gambar.7,

<https://documents1.worldbank.org/curated/en/099052110042330899/pdf/IDU0c1b39c8c0bfd604cf608ad40de3e4e0e24b8.pdf>

Tabel 1 menunjukkan beberapa faktor yang dapat dipertimbangkan oleh negara-negara pada saat mereka akan membentuk mekanisme NRA permanen atau sementara.

Tabel 1. Faktor yang Perlu Dipertimbangkan: Mekanisme Permanen dan Sementara

Mekanisme Permanen	Mekanisme Sementara
Merekomendasikan konsistensi dan kemampuan replikasi di berbagai proses yang berulang.	Memberikan fleksibilitas lebih dalam alokasi sumber daya berbasis risiko, yang sangat penting bagi negara-negara dengan kapasitas yang lebih rendah.
Membantu mendorong koordinasi antar lembaga yang baik melalui pembinaan hubungan jangka panjang dengan masyarakat dan memfasilitasi saling berbagi informasi.	Memungkinkan negara-negara yang sudah memiliki koordinasi antar lembaga yang baik untuk mempertahankannya bahkan tanpa adanya mekanisme permanen.
Mengizinkan para peserta untuk mengembangkan pengalaman dan pengetahuan dalam proses dan metodologi NRA.	Mengizinkan adanya perspektif dan sudut pandang lain, memastikan proses tidak stagnan dan perubahan dapat dilakukan, tidak "terjebak dalam cara lama".
Membantu membangun memori dan keahlian institusional, sehingga memudahkan untuk melakukan evaluasi terhadap perubahan yang telah terjadi di seluruh Penilaian Risiko Nasional (NRA).	Dapat mengakibatkan hilangnya keahlian dan terputusnya hubungan dengan Penilaian Risiko sebelumnya, terutama jika pergantian staf di lembaga sering terjadi.
Biaya dan pengeluaran berkelanjutan.	

Kotak 2. Campuran Mekanisme Permanen dan Sementara

Italia

Di Italia, Komite Keamanan Keuangan (FSC), yang terdiri dari perwakilan semua otoritas dan administrasi publik terkait, memiliki mekanisme koordinasi permanen dan tim khusus sementara yang dipimpin oleh Kementerian Ekonomi dan Keuangan.

Mekanisme permanen memfasilitasi pertukaran informasi dan pemantauan berkelanjutan, sedangkan tim sementara berfokus pada pelaksanaan penilaian risiko selama pembaruan NRA. Pendekatan ganda ini menggabungkan beberapa manfaat dari mekanisme permanen karena memfasilitasi pertukaran informasi dan pemantauan berkelanjutan, dan manfaat dari tim sementara karena memungkinkan para ahli untuk mendedikasikan waktu mereka untuk tujuan bersama dalam jangka waktu singkat.

Negara dapat memilih pendekatan *top-down* atau *bottom-up* untuk melakukan Penilaian Risiko, tetapi seringkali kombinasi keduanya telah diamati sebagai metode yang paling efektif untuk mengembangkan NRA yang komprehensif. Dalam pendekatan *top-down*, Penilaian Risiko dimulai dengan perspektif tingkat tinggi dan mengidentifikasi kategori faktor luas yang dapat memengaruhi risiko pencucian uang negara. Hal ini harus digunakan untuk menginformasikan strategi dan tindakan pada level yang tinggi seperti alokasi anggaran. Pendekatan *bottom-up* lebih bergantung pada temuan Penilaian Risiko pada sektor industri, sektoral, dan tematik yang dikombinasikan dengan pengalaman para ahli bidang dan karyawan tingkat operasional dari otoritas yang berwenang untuk menginformasikan arah dan cakupan NRA. Hal ini dapat membantu mengidentifikasi kemungkinan terjadinya peristiwa risiko tertentu dan mendukung perubahan dalam prosedur dan kontrol pada tingkat operasional serta mengidentifikasi kerentanan khusus pada sektor utama. Pendekatan-pendekatan ini dapat mulai berinteraksi secara organik tergantung pada kematangan proses dan mekanisme suatu negara.

Kepemimpinan NRA

Terlepas dari pendekatan yang digunakan, negara-negara harus menetapkan siapa yang akan memimpin proses tersebut, apakah itu akan menjadi tanggung jawab satu lembaga atau kelompok kerja, atau beberapa lembaga. Hal terpenting adalah negara-negara harus berinvestasi dalam kepemimpinan dan menemukan orang/sekelompok orang yang tepat untuk memimpin proses tersebut,

memastikan mereka memiliki keahlian yang diperlukan dalam Standar FATF, risiko pencucian uang, dan proses Penilaian Risiko.

- Lembaga atau kelompok kerja tunggal – Sebagian besar negara yang menanggapi kuesioner mengidentifikasi Komite APU/PPT Nasional mereka (atau sub-kelompok kerja) sebagai otoritas koordinasi khusus untuk menilai risiko. Beberapa negara menyebutkan kementerian atau lembaga yang mengatur, misalnya FIU, Kementerian Keuangan, atau Kementerian Kehakiman.
- Beberapa lembaga – Beberapa negara menyebutkan lebih dari satu lembaga yang bertanggung jawab untuk memimpin proses tersebut. Hal ini membutuhkan koordinasi yang kuat antar lembaga dan penetapan peran dan tanggung jawab yang jelas, termasuk prosedur pengambilan keputusan.

Dalam mempertimbangkan apakah lembaga/kelompok kerja tunggal atau beberapa lembaga yang akan memimpin pelaksanaan NRA, negara-negara juga harus mempertimbangkan individu yang akan memegang posisi kepemimpinan ini. Individu-individu ini membutuhkan perspektif lintas rezim Anti-Pencucian Uang, kemampuan untuk bekerja dengan individu dari berbagai otoritas kompeten dan sektor swasta, dan harus memiliki senioritas yang memadai untuk memberi tahu pembuat kebijakan senior mengenai proses dan hasilnya.

Keterlibatan Semua Pemangku Kepentingan Nasional Terkait

Penilaian komprehensif terhadap risiko pencucian uang akan membutuhkan keterlibatan dari otoritas utama di seluruh fungsi operasional, kebijakan, dan pengawasan. Karakteristik spesifik sistem Anti-Pencucian Uang akan berbeda-beda di setiap negara, termasuk mandat, tujuan, wewenang, dan jabatan otoritas operasional utama. Beberapa otoritas utama meliputi badan intelijen dan keamanan, kepolisian, keamanan perbatasan, otoritas penuntut umum, FIU, otoritas anti-narkoba, otoritas anti-korupsi, bea cukai, otoritas pengawas dan pengatur, serta mitra asing (seperti badan nasional di negara lain). Otoritas regional juga dapat terlibat, tergantung pada ukuran dan struktur negara tersebut. Banyak otoritas kompeten lainnya mungkin memiliki informasi yang relevan, termasuk otoritas pajak, departemen statistik, dan regulator perdagangan dan perniagaan. Tergantung pada konteks negara, keterlibatan pembuat kebijakan inklusi keuangan juga perlu dipertimbangkan.

Keterlibatan semua otoritas kompeten yang terkait sangat penting untuk keberhasilan proses NRA. Untuk mendorong kerja sama nasional yang kuat, beberapa negara telah membentuk Komite NRA antar departemen dan multi-lembaga untuk mengoordinasikan dan mengintegrasikan semua Penilaian Risiko nasional, sektoral, dan industri yang relevan. Berdasarkan tanggapan Jaringan Global terhadap kuesioner proyek, akan bermanfaat bagi suatu negara untuk membentuk forum pengambilan keputusan yang ditetapkan dengan baik, yang memiliki kerangka acuan yang jelas, dan secara gamblang menguraikan peran dan tanggung jawab lembaga utama dan entitas peserta lainnya. Forum ini dapat berfungsi sebagai badan terpusat untuk mengawasi proses Penilaian Risiko Nasional (NRA), memastikan bahwa proses tersebut tetap komprehensif, terkini, dan mencerminkan berbagai ancaman yang dihadapi negara tersebut. Selain itu, forum tersebut harus menetapkan hierarki pengambilan keputusan untuk berbagai jenis keputusan, dengan menentukan keputusan mana yang memerlukan eskalasi untuk membangun konsensus atau untuk mengatasi perbedaan pandangan.

Terakhir, perlu dipertimbangkan keberagaman tim NRA itu sendiri, tidak hanya berdasarkan lembaga yang diwakili atau profesi konstituen utama. Idealnya, tim tersebut juga mencerminkan keberagaman usia, jenis kelamin, dan identitas. Hal ini memperkaya pengalaman dan basis pengetahuan tim serta membawa perspektif dan ide yang mungkin dapat terabaikan.

Keterlibatan Pemangku Kepentingan Non-Pemerintah

Meskipun Penilaian Risiko Pencucian Uang merupakan penilaian pemerintah secara keseluruhan, negara-negara harus disarankan untuk melibatkan pemangku kepentingan non-pemerintah lainnya dengan keahlian di bidang terkait, jika dapat dilakukan. Pemangku kepentingan dan keterlibatan tersebut dapat mencakup, tetapi tidak terbatas pada: Lembaga Keuangan, Bisnis dan Profesi Non-Keuangan yang Ditunjuk, Penyedia Layanan Aset Virtual, masyarakat sipil, dan akademisi. Beberapa negara juga menyertakan para ahli dalam Penilaian Risiko dari luar dunia Anti-Pencucian Uang, dan para ahli ilmiah atau ahli data untuk memperkuat pendekatan mereka terhadap NRA.

Keterlibatan pemangku kepentingan yang bukan berasal dari pemerintah dapat melengkapi atau memvalidasi informasi dari Badan Penegak Hukum dan pengawas untuk memberikan rincian mengenai yang terjadi dalam praktiknya. Hal ini juga memungkinkan pertimbangan keahlian sektor swasta tentang transaksi keuangan, keahlian tentang bagaimana produk dan layanan digunakan secara sah serta disalahgunakan untuk pencucian uang, praktik industri, dan ancaman yang muncul. Hal ini juga dapat membantu menghindari generalisasi risiko yang berlebihan atau kurang dan mencegah dampak yang tidak diinginkan di mana nuansa produk atau sektor tertentu tidak dipertimbangkan dengan lebih cermat.

Keterlibatan pemangku kepentingan non-pemerintah dapat terjadi pada tahap mana pun dalam proses — awal, tengah, atau akhir. Melibatkan lembaga keuangan, Bisnis dan Profesi Non-Keuangan yang Ditunjuk (DNFBPs), Penyedia Layanan Aset Virtual (VASPs), dan masyarakat sipil sejak awal proses dan secara berkelanjutan dapat membuat produk lebih berdampak dan bermanfaat bagi semua pemangku kepentingan. Mengembangkan hubungan kerja yang kuat dan membangun kepercayaan dapat memastikan umpan balik yang jujur dan timbul kemauan untuk berbagi informasi.

Menggunakan sampel yang mewakili secara umum dari sektor tersebut (misalnya, berbagai layanan, berbagai ukuran entitas), termasuk melalui pengawas yang relevan, juga merupakan hal yang penting. Penyesuaian jangkauan sektor swasta dapat dipertimbangkan, karena pendekatan yang berbeda bisa menjadi lebih efektif, tergantung pada ukuran dan kematangan setiap sektor Lembaga Keuangan dan Bisnis dan Profesi Non-Keuangan yang Ditunjuk. Negara-negara dapat melibatkan badan industri di luar Anti-Pencucian uang dan bekerja sama dengan mereka mengenai cara terbaik untuk menjangkau berbagai bagian sektor dan menggunakan koneksi mereka untuk memberikan keyakinan bahwa setiap tanggapan yang mereka berikan kepada tim NRA tidak akan digunakan untuk melawan mereka dalam penilaian pengawasan mereka.

Negara-negara dapat meminta akses ke Penilaian Risiko kelembagaan atau materi lain dari entitas pelapor atau mengirimkan survei atau kuesioner untuk mendapatkan umpan balik dan data. Adanya bentuk standar untuk memfasilitasi analisis informasi yang diterima merupakan praktik yang baik. Negara-negara juga dapat memperoleh masukan dan umpan balik melalui wawancara, sesi atau pertemuan meja bundar, dan partisipasi dalam kemitraan publik-swasta atau forum sektor swasta lainnya.

Kotak 3. Keterlibatan Sektor Swasta dalam NRA

Inggris

Di antara NRA, Inggris menyelenggarakan kelompok ancaman publik-swasta pada area prioritas yang menghasilkan peringatan ancaman publik-swasta. Setelah proses NRA secara resmi dimulai, Inggris mengirimkan kuesioner kepada perusahaan-perusahaan di sektor yang diatur untuk mencari perspektif mereka tentang bagaimana risiko telah berubah sejak NRA terakhir. Kuesioner ini diedarkan melalui badan-badan industri, bukan pengawas Anti-Pencucian uang, untuk memberikan kepercayaan kepada perusahaan bahwa mereka dapat merespons dengan jujur, tanpa risiko intervensi pengawas.

Kontribusi sektor swasta juga dibutuhkan melalui lokakarya NRA dengan setiap sektor. Kelompok perusahaan yang beragam untuk setiap sektor diundang (misalnya beragam dalam ukuran dan sub-sektor) untuk terlibat dalam diskusi yang lebih rinci tentang tema-tema utama dari tanggapan kuesioner. Hal ini meliputi area di mana pandangan sektor swasta berbeda dari pandangan pengawas atau penegak hukum. Kuesioner dan ringkasan diskusi lokakarya disertakan sebagai salah satu dari berbagai sumber data yang digunakan dalam penyusunan temuan NRA.

Memastikan NRA Mencerminkan Risiko Saat Ini

Standar FATF mengharuskan negara-negara untuk menjaga pemahaman risiko terkini untuk memperhitungkan lanskap pencucian uang yang terus berkembang. Standar tersebut memungkinkan fleksibilitas dalam cara dan frekuensi pelaksanaannya, dengan mengakui bahwa negara-negara harus melakukan pembaruan sesuai dengan risiko, konteks, dan kapasitas mereka. Negara-negara harus menggunakan pendekatan berbasis risiko (RBA) untuk pembaruan dalam hal jadwal dan cakupan, dan dapat memprioritaskan tema atau sektor berisiko tinggi untuk pembaruan yang ditargetkan atau untuk penelitian lebih lanjut. Pembaruan harus dikomunikasikan dengan cara yang sama seperti NRA, untuk memastikan pemahaman yang komprehensif dan terkini di antara para pemangku kepentingan.

NRA tidak boleh dianggap hanya sebagai dokumen statis, tetapi sebagai proses berkelanjutan. Meskipun analisis biasanya menghasilkan pembuatan dokumen NRA formal, dokumen ini mewakili gambaran situasi risiko negara pada saat tertentu. Negara-negara harus mengelola NRA sebagai proses dinamis yang berkelanjutan, harus terus-menerus mengidentifikasi ancaman yang muncul, mengelola risiko residual, dan menilai efektivitas langkah-langkah mitigasi risiko. Hal ini juga memungkinkan temuan dari NRA sebelumnya untuk dengan mudah diterapkan pada proses pengulangan baru. Sebagai contoh, beberapa Penilaian Risiko Nasional (NRA) mencakup evaluasi NRA sebelumnya dan pelajaran yang dipetik untuk memberikan informasi bagi NRA di masa mendatang, yang menunjukkan bahwa hal tersebut dianggap sebagai latihan yang berkelanjutan.

Meskipun tidak ada persyaratan bagi negara untuk menggunakan data yang dikumpulkan selama jangka waktu tertentu dalam NRA mereka, data tersebut harus mencakup periode waktu yang cukup dan cukup terkini untuk memberikan pandangan yang mutakhir, akurat, dan komprehensif tentang risikonya. Hal ini akan bervariasi tergantung pada seberapa sering suatu negara memperbarui NRA-nya dan apakah negara tersebut melakukan pembaruan yang ditargetkan dan aktivitas Penilaian Risiko lainnya di antara pembaruan NRA.

Kotak 4. Statistik Ketepatan Waktu NRA

Mayoritas negara (53%) yang menanggapi kuesioner proyek memperbarui NRA mereka setiap 2-3 tahun, dan 27% memperbaruinya ketika ada perubahan dalam lanskap risiko. Bank Dunia menemukan bahwa pada praktiknya, rata-rata jangka waktu antara pembaruan NRA di negara-negara yang mereka teliti adalah 3,5 tahun.⁸

Beberapa negara memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur frekuensi pembaruan Penilaian Risiko mereka, dan seringkali ada persyaratan tambahan untuk memperbarui Penilaian Risiko jika lanskap risiko berubah. Hal yang utama adalah memiliki mekanisme yang memungkinkan negara untuk melakukan pendekatan yang gesit yang memungkinkan penyesuaian cepat untuk meningkatkan pemahaman risiko jika terjadi perubahan pada situasi risiko mereka, dan untuk melakukan diskusi berkelanjutan di tingkat nasional tentang risiko, di luar jadwal apa pun yang mereka miliki untuk memperbarui NRA dalam peraturan perundang-undangan atau aspek lainnya. Statistik di bawah ini menekankan perlunya negara-negara untuk melihat Penilaian Risiko sebagai proses berkelanjutan yang terus-menerus ditinjau, direvisi, dan diperbarui.

Kotak 5. Statistik Ketepatan Waktu NRA

Penelitian oleh Bank Dunia⁹ menemukan bahwa menyelesaikan NRA terlalu dekat dengan kunjungan lapangan untuk ME dapat membatasi waktu yang tersedia untuk memperkenalkan kebijakan berbasis risiko. Menurut studi Bank Dunia, dari 26 negara di mana rentang waktu antara penyelesaian NRA dan kunjungan lapangan adalah tiga bulan atau kurang, 17 negara memiliki kekurangan yang teridentifikasi dalam kebijakan dan strategi nasional berbasis risiko mereka, yang mungkin menyiratkan bahwa negara-negara ini tidak memiliki waktu yang cukup untuk merefleksikan hasil NRA ke dalam kebijakan dan strategi nasional.

Salah satu manfaat dan tujuan dari pelaksanaan NRA adalah untuk menetapkan strategi mitigasi atau rencana aksi dengan tujuan berbasis risiko yang jelas dan kerangka waktu untuk pelaksanaannya (dibahas secara rinci pada Bagian 3). Waktu pelaksanaan NRA dan tahap pelaksanaan langkah-langkah mitigasi risiko berdasarkan temuan NRA secara material memengaruhi efektivitas kerangka kerja Anti-Pencucian Uang suatu negara.

Penetapan Ruang Lingkup dan Tujuan

Semua pihak yang terlibat dalam proses NRA harus menyepakati tujuan dan lingkup NRA sebelum memulainya. Penting untuk mengklarifikasi sejak awal alasan dilakukannya NRA, pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab, kriteria yang akan digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, dan kemungkinan keputusan yang akan diinformasikan oleh NRA. Negara-negara harus menetapkan sasaran target sejak awal proses dan merefleksikannya sepanjang proses untuk menjamin bahwa hasilnya relevan bagi semua pemangku kepentingan. Mereka juga harus mempertimbangkan bahwa Penilaian Risiko Pencucian Uang harus berfungsi sebagai masukan untuk strategi atau berbagai strategi Anti-Pencucian Uang nasional sebagai bagian dari proses koordinasi Anti-Pencucian Uang domestik negara tersebut.

⁸

<https://documents1.worldbank.org/curated/en/099052110042330899/pdf/IDU0c1b39c8c0bfd604cf608ad40de3e4e0e24b8.pdf>

⁹

<https://documents1.worldbank.org/curated/en/099052110042330899/pdf/IDU0c1b39c8c0bfd604cf608ad40de3e4e0e24b8.pdf>

Ruang lingkup harus didefinisikan dengan jelas dan dijadikan sebagai referensi sepanjang prosesnya, dan negara harus memastikan bahwa ruang lingkup meliputi semua sektor, wilayah geografis, dan aktivitas ilegal yang relevan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Proses penentuan ruang lingkup juga melibatkan identifikasi pemangku kepentingan utama dan penentuan metodologi serta sumber data yang tepat untuk digunakan. Penentuan ruang lingkup NRA secara efektif memastikan bahwa sumber daya dan upaya dikerahkan secara terfokus, sehingga memaksimalkan efisiensi penilaian.

Tindakan yang Harus Dilakukan Sebelum Memulai NRA

Bagi negara-negara yang sudah melakukan NRA, langkah pertama adalah menganalisis NRA sebelumnya dan materi Penilaian Risiko lainnya (misalnya, Penilaian Risiko tematik atau sektoral). Negara-negara mungkin akan merasakan manfaatnya apabila hal ini dilakukan segera setelah NRA diterbitkan, di saat informasi masih segar dalam pikiran semua pemangku kepentingan, atau praktik ini dapat dilakukan sebagai catatan serah terima kepada koordinator NRA negara di masa mendatang. Umpan balik dan arahan yang diperoleh akan memastikan bahwa NRA di masa mendatang lebih kuat dan harus menjawab:

- i. Proses – Apakah metodologi dan ruang lingkupnya tepat? Apakah ada masalah dengan pengumpulan data yang dapat diselesaikan untuk proses pengulangan berikutnya? Apakah semua otoritas terkait dan pemangku kepentingan lainnya terlibat? Apakah negara tersebut mengalami kesulitan dalam mengembangkan pemahaman risiko di sektor swasta? Apakah ada kesulitan dalam pemilihan dan implementasi langkah-langkah mitigasi risiko? Apakah ada kebutuhan untuk penyelarasan lebih lanjut dengan strategi Anti-Pencucian Uang nasional?
- ii. Konten dan temuan – misalnya, Apakah lanskap risiko telah berubah dan apakah ada ancaman dan kerentanan baru yang perlu disertakan? Area rentan mana yang telah mengalami pengenalan langkah-langkah mitigasi risiko? Data apa yang kurang yang dapat membantu menarik kesimpulan tentang risiko?

Praktik yang baik adalah melakukan inventarisasi informasi yang tersedia dan analisis kesenjangan untuk melihat pada bagian mana yang mungkin mengalami kekurangan data. Pemetaan pemangku kepentingan juga berguna untuk memperoleh data di tingkat nasional dan internasional. Disarankan untuk melakukan hal ini secara berkelanjutan.

Banyak negara yang menanggapi kuesioner proyek menunjukkan bahwa mereka melakukan langkah-langkah berikut yang memberikan hasil positif:

- i. Mempelajari Penilaian Risiko Nasional negara-negara tetangga atau Penilaian Risiko supranasional (jika tersedia) sebelum memulai NRA mereka.
- ii. Berkonsultasi dengan para ahli dari negara lain yang dinilai sangat efektif atau substansial pada IO.1 dalam MER mereka.
- iii. Mengambil referensi dari laporan yang diterbitkan organisasi internasional, media berita, dan anggota masyarakat sipil lainnya, terutama untuk mengidentifikasi ancaman baru yang mulai muncul.

Untuk menjaga agar proses NRA tetap berjalan sesuai rencana, negara-negara harus membuat rencana proyek dengan linimasa, pencapaian penting, dan tenggat waktu sepanjang proses. Negara-negara yang telah melakukan NRA dapat menggunakan pelajaran yang dipetik dari pengalaman mereka sendiri, atau dari negara lain, untuk menyesuaikan linimasa mereka untuk proses pengulangan di masa mendatang. Linimasa harus didasarkan pada pengalaman terakhir, membangun waktu aktual yang dihabiskan oleh individu dan lembaga pada berbagai aktivitas yang membentuk proses NRA untuk mengembangkan linimasa dan tujuan yang lebih realistis dan dapat dicapai. Tugas harus dialokasikan kepada orang/departemen tertentu dan harus ada mekanisme pemantauan proyek yang berkelanjutan untuk menjaga proses tetap sesuai rencana.

Ruang Lingkup NRA

Pertimbangan utama ketika memutuskan ruang lingkup NRA adalah menentukan apakah risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme harus dinilai secara terpisah atau bersama-sama. Informasi lebih lanjut untuk membantu negara-negara membuat keputusan ini disajikan pada Tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2. Penilaian pencucian uang/pendanaan terorisme secara Bersama atau Terpisah

Risiko pencucian uang/pendanaan terorisme dinilai bersama-sama	Risiko pencucian uang/pendanaan terorisme dinilai secara terpisah
Kemiripan sistem pencegahan di beberapa negara.	Keterlibatan Lembaga dan kumpulan data yang berbeda.
Memungkinkan negara untuk memanfaatkan pengetahuan kolektif pencucian uang/ pendanaan terorisme.	Modul yang berbeda dari alat metodologi digunakan.
Lebih efisien bila melibatkan kumpulan data yang sama.	Memungkinkan fleksibilitas yang lebih besar dalam hal memperbarui bagian tertentu atau mendalami topik tertentu.

Sumber: Tanggapan Kuesioner Proyek – November 2023

Kotak 6. Statistik tentang Ruang Lingkup NRA

Kuesioner proyek ini menanyakan kepada negara-negara apakah mereka menilai risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme secara terpisah atau bersama-sama. 60% negara yang menjawab melakukan penilaian terpisah, sementara 40% memilih penilaian gabungan.

Berbagai Jenis Penilaian Risiko dan Interaksinya

Penilaian Risiko Nasional harus memberikan pemahaman dasar kepada negara-negara tentang risiko pencucian uang mereka dan membantu mereka mengidentifikasi area fokus kebijakan. Banyak negara dalam Jaringan Global melakukan pekerjaan terkait risiko lainnya untuk melengkapi temuan NRA dan mengembangkan pemahaman risiko. Negara-negara juga dapat melakukan Penilaian Risiko sektoral dan Penilaian Risiko tematik, atau penelitian lain yang terkait dengan risiko untuk melengkapi informasi yang terkandung dalam NRA, misalnya, analisis strategis dari Unit Intelijen Keuangan, penilaian aktor ancaman oleh penegak hukum atau kantor intelijen, penelitian tematik dari Lembaga Keuangan Internasional dan lembaga penelitian independen, serta studi oleh otoritas pengawas. Memperbarui Penilaian Risiko dengan cara ini dapat melibatkan lebih sedikit sumber daya dan koordinasi yang tidak terlalu membebankan semua lembaga dan pemangku kepentingan, serta memungkinkan "penyelaman mendalam" pada sektor, layanan, atau tema tertentu untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam mengenai risiko. Hal ini memungkinkan diterapkannya pendekatan progresif dalam rangka mendorong penggunaan sumber daya yang lebih optimal, khususnya dalam situasi dengan keterbatasan sumber daya atau kapasitas yang lebih rendah.

Beberapa badan internasional seperti Uni Eropa dan Badan Regional Berbasis FATF telah melakukan Penilaian Risiko supranasional yang mengidentifikasi risiko pencucian uang di berbagai negara atau negara anggota, yang dapat membantu negara-negara dalam melakukan Penilaian Risiko mereka sendiri, terutama mengenai risiko spesifik wilayah dan ancaman lintas batas. Yurisdiksi yang lebih luas atau yang memiliki wilayah kelautan juga dapat melakukan Penilaian Risiko sub-nasional, yang memberikan informasi terperinci tentang wilayah tertentu di dalam negeri dan dapat sangat berguna untuk wilayah perbatasan atau wilayah lain dengan karakteristik tertentu yang dapat membuat mereka lebih rentan terhadap pencucian uang.

Negara-negara juga harus mempertimbangkan temuan dari pekerjaan Penilaian Risiko yang telah dilakukan pada tingkat kelembagaan oleh lembaga keuangan dan Badan Regional Berbasis

FATF, dan pekerjaan terkait risiko lainnya yang dilakukan oleh otoritas nasional, misalnya, laporan tren dan tipologi.

Negara-negara harus berupaya untuk melakukan kegiatan Penilaian Risiko yang saling melengkapi karena semuanya memiliki subjek, tujuan, dan hasil yang berbeda, seperti yang diuraikan dalam Lampiran A. Mereka juga harus melaksanakan Pendekatan Berbasis Risiko, yaitu, dengan memprioritaskan area berisiko tertinggi untuk Penilaian Risiko sektoral/tematik. Penilaian Risiko ini penting untuk dilakukan sebagai bagian dari strategi Anti-Pencucian Uang yang lebih luas untuk meningkatkan pemahaman risiko negara karena penilaian risiko menjadi kurang bermanfaat jika dilakukan secara terpisah.

Pendekatan gabungan yang melibatkan pengembangan Penilaian Risiko Nasional yang dilengkapi dengan jenis Penilaian Risiko lainnya dapat membantu mengembangkan pemahaman risiko yang lebih menyeluruh di antara para pemangku kepentingan. Menyertakan temuan dari semua Penilaian Risiko yang dilakukan ke dalam Penilaian Risiko Nasional membuatnya menjadi lebih komprehensif dan terkini serta dapat mendukung implementasi langkah-langkah mitigasi risiko yang lebih efektif. Negara-negara dapat mengambil tindakan berikut untuk menyertakan temuan ke dalam Penilaian Risiko Nasional:

- **Standardisasi aspek Penilaian Risiko mereka** – Negara-negara harus mengambil langkah-langkah untuk menstandarisasi metodologi dan peringkat risiko untuk memastikan bahwa semua Penilaian Risiko dapat dibandingkan dan mudah diintegrasikan ke dalam Penilaian Risiko Nasional.
- **Mengumpulkan data** – Mengumpulkan dan mengintegrasikan data yang dikumpulkan dalam pengembangan berbagai Penilaian Risiko ke dalam basis data terpusat tingkat nasional memberikan pandangan holistik tentang data yang terkait dengan Pencucian Uang di berbagai sektor, tema, negara, dan tingkat administrasi.
- **Melakukan referensi silang terhadap risiko** – Melakukan berbagai Penilaian Risiko yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan memungkinkan pihak berwenang untuk memeriksa silang pemahaman mereka tentang risiko di berbagai bidang dan mengatasi setiap perbedaan. Apakah temuan Penilaian Risiko tingkat industri sesuai dengan temuan Penilaian Risiko sektoral yang dilakukan oleh pemerintah? Jika ada perbedaan, pemerintah dapat menyelidiki mengapa hal ini mungkin terjadi (misalnya, kurangnya keterlibatan sektor swasta dalam NRA atau perubahan lanskap risiko antara penilaian).

Memastikan bahwa informasi sensitif tetap dirahasiakan selama proses NRA merupakan hal penting untuk menjaga kepercayaan di antara semua pemangku kepentingan dan melindungi informasi. Negara-negara mungkin memiliki kekhawatiran ketika melibatkan pemangku kepentingan non-pemerintah karena alasan kerahasiaan. Untuk mengatasi hal ini, negara-negara dapat mengembangkan kerangka hukum dan prosedur tentang penggunaan dan transfer informasi sensitif selama proses NRA dan/atau mewajibkan semua peserta untuk menandatangani perjanjian kerahasiaan. Negara-negara juga harus memiliki sistem untuk melindungi data dari akses yang tidak sah, misalnya, basis data dan saluran komunikasi yang terenkripsi.

Serupa dengan yang telah diuraikan, negara-negara mungkin memiliki kekhawatiran tentang melibatkan pemangku kepentingan non-pemerintah berdasarkan persepsi bahwa pemangku kepentingan tersebut dapat meremehkan risiko atau kerentanan sehingga mengakibatkan tingkat regulasi yang lebih rendah. Penting untuk mengkontekstualisasikan informasi yang diberikan dengan sumber informasi lain, seperti yang diberikan oleh lembaga penegak hukum, pengawas, informasi intelijen, dan Unit Intelijen Keuangan.

Pengumpulan Informasi dan Data

Pengumpulan data memainkan peranan dalam setiap langkah proses NRA, yaitu menyediakan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi faktor risiko pencucian uang, membentuk dasar pelaksanaan analisis dan evaluasi selanjutnya. Metode pengumpulan data akan bergantung pada ukuran negara, kualitas koordinasi nasional dan mekanisme berbagi informasi, serta kapasitas dan sumber daya yang dialokasikan untuk proses tersebut.

Data dapat dibagi menjadi dua kategori: kuantitatif dan kualitatif.

- **Data kuantitatif** mengacu pada informasi numerik dan terukur yang dapat dinyatakan dalam bentuk kuantitas atau jumlah. Data kuantitatif merupakan data yang penting karena memungkinkan penarikan kesimpulan objektif berdasarkan bukti numerik. Contohnya meliputi statistik tentang jumlah laporan transaksi mencurigakan yang diterima dan disebarkan, investigasi, penuntutan, hukuman, jumlah hasil kejahatan yang disita, statistik tentang pelaku kejahatan, statistik tentang tindakan penegakan pengawasan, dll. Informasi kuantitatif memberikan dasar bukti yang baik dan kemampuan untuk memantau tren, tetapi kurang memiliki informasi kontekstual yang dibutuhkan untuk menafsirkan penyebab dan implikasi yang mendasari data tersebut.
- **Data kualitatif** mengacu pada informasi deskriptif non-numerik. Misalnya, wawancara dengan lembaga penegak hukum (LEA), otoritas pengawas, dan entitas yang diawasi menghasilkan data kualitatif. Studi kasus, opini ahli, dan observasi dari berbagai lembaga termasuk lembaga penegak hukum juga sering digunakan dalam NRA. Tipologi atau analisis tren yang ada juga menjadi informasi yang berharga. Data kualitatif memberikan wawasan berharga tentang persepsi, sikap, dan pengalaman pemangku kepentingan utama dan membantu mengidentifikasi kesenjangan, kelemahan, dan area untuk perbaikan. Data kualitatif dapat membantu menjelaskan tren dan pola yang diamati dalam data kuantitatif.

Baik data kuantitatif maupun kualitatif harus dipertimbangkan untuk memberikan gambaran yang lebih akurat tentang risiko negara. Misalnya, jika tidak ada transaksi keuangan mencurigakan yang dilaporkan oleh suatu sektor, mungkin tampak seolah-olah sektor tersebut berisiko rendah. Namun, informasi kualitatif dapat memberikan informasi bahwa suatu sektor tidak memahami kewajiban pelaporannya atau baru mulai melaporkan, yang berarti risikonya mungkin lebih tinggi daripada yang ditunjukkan oleh data kuantitatif.

Akurasi, konsistensi, dan pendekatan kritis terhadap sumber data sangat penting untuk pengolahan dan analisis data yang efektif dalam menilai risiko terkait pencucian uang. Berikut ini adalah beberapa pertimbangan data yang harus diperhatikan oleh negara-negara:

- Karena kemungkinan data berasal dari berbagai sumber, maka disarankan untuk melakukan pengecekan silang terhadap informasi yang tumpang tindih agar dapat menciptakan gambaran yang seakurat mungkin.
- Negara-negara juga harus mempertimbangkan tingkat kepercayaan mereka terhadap keandalan setiap sumber data dan menghindari menerima data begitu saja. Proses ini dapat membantu negara-negara mengidentifikasi potensi kesenjangan data.
- Negara-negara harus memastikan bahwa data yang mereka gunakan dapat dibandingkan dan seragam dari waktu ke waktu, misalnya, selalu menggunakan tahun kalender, bukan tahun fiskal.
- Dalam kasus di mana statistik mungkin terbatas – terutama di negara-negara dengan sedikit kasus yang terkait dengan tindak pidana asal atau jenis pencucian uang – negara-negara harus berhati-hati. Bahkan jika statistik tersedia, ukuran sampel dan kualitas data dapat membatasi kebermanfaatan statistik.
- Kurangnya data tidak selalu berarti kurangnya risiko dan dapat mengindikasikan peningkatan risiko jika hal itu menunjukkan kerentanan dalam kerangka kerja Anti-Pencucian Uang/Pemberantasan Pendanaan Terorisme suatu negara.

Negara-negara harus terus memantau area di mana mereka memiliki kesenjangan data atau masalah prosedural dan memperbaiki masalah ini dari waktu ke waktu pada setiap NRA berikutnya. Pengembangan proses pengumpulan data yang kuat membutuhkan waktu dan tidak boleh terburu-buru, karena hal ini dapat mengakibatkan data berkualitas buruk dan menyesatkan.

Delapan puluh persen negara yang menanggapi kuesioner proyek menunjukkan bahwa mereka mengalami beberapa tantangan dalam pengumpulan data untuk proses NRA. Melakukan investasi dalam pendekatan yang konsisten dan berkelanjutan untuk pengumpulan data sangat penting dan dapat menghasilkan penghematan sumber daya dalam jangka panjang karena prosesnya berkembang dan menjadi lebih mudah dan cepat untuk setiap proses pengulangan. Negara-negara harus berupaya untuk menggunakan pelajaran yang dipetik dari NRA mereka untuk meningkatkan dan menstandarisasi proses pengumpulan data mereka. Beberapa praktik baik untuk pengumpulan data dari Jaringan Global ditampilkan di bawah ini pada kotak 7.

Kotak 7. Praktik Baik dalam Pengumpulan Data

Yunani

Dalam konteks implementasi rencana aksi nasional untuk memerangi pencucian uang/pendanaan terorisme, Komite Strategi Nasional Anti-Pencucian Uang/Pemberantasan Pendanaan Terorisme/Pemberantasan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal telah membentuk Kelompok Kerja untuk pencatatan data statistik yang wajib disimpan di tingkat nasional untuk pencegahan dan pemberantasan pencucian uang/pendanaan terorisme, serta evaluasi mekanisme tersebut.

Temuan kelompok kerja tersebut menjadi dasar proyek untuk memfasilitasi pengumpulan data statistik secara digital. Yunani menciptakan platform digital, di mana otoritas publik yang terlibat akan mendaftarkan data statistik yang mereka simpan, dan yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan pencucian uang/pendanaan terorisme.

Dengan cara ini, Otoritas Koordinasi Pusat Kementerian Keuangan dapat secara otomatis mengumpulkan data statistik yang lengkap dan terbaru yang disimpan oleh semua otoritas yang berwenang. Sekretariat Jenderal Sistem Informasi Sektor Publik Kementerian Tata Kelola Digital adalah promotor proyek dan memberikan dukungan teknologi untuk proyek yang sedang berjalan yang didanai oleh Dana Ketahanan dan Pemulihan Uni Eropa.

Finlandia

Finlandia menggunakan pendekatan multifaset untuk pengumpulan data dalam rangka pembaruan NRA 2023, dengan memanfaatkan solusi manajemen risiko berbasis *Software as a Service* (SaaS). Platform canggih ini memfasilitasi pengumpulan data kuantitatif dari otoritas pengawas, hukum, dan penegakan hukum (sebanyak 17 organisasi), serta kuesioner Penilaian Risiko yang membahas risiko sektoral individu dan matriks risiko komprehensif. Perangkat lunak ini selanjutnya memungkinkan analisis dan presentasi visual yang mudah dari data yang dikumpulkan dan dianalisis, meningkatkan efisiensi dan efektivitas keseluruhan proses pembaruan NRA.

Alat Pengumpulan Data Aliran Keuangan Ilegal (*Illicit Financial Flow Data Collection Tool/IFFD*) Bank Dunia

Alat NRA generik Bank Dunia mencakup templat Excel sederhana (Modul 1.B) untuk membantu negara-negara mengekstrak beberapa fakta dan angka kunci dari setiap kasus pencucian uang, seperti karakteristik setiap kasus (yaitu pencucian uang sendiri dengan pencucian uang profesional, domestik dengan internasional), serta sektor, produk, aset, badan hukum, dan negara yang terlibat dalam setiap kasus pencucian uang. Mengingat pentingnya pengumpulan data secara terus menerus untuk memahami hasil kejahatan dan risiko pencucian uang, Bank Dunia kemudian mengembangkan alat pengumpulan data sederhana untuk pengumpulan data secara terus menerus dan sistematis tentang hasil kejahatan dan aliran keuangan ilegal di suatu yurisdiksi. Alat ini bertujuan untuk membangun pengumpulan data hasil kejahatan di berbagai negara. Alat ini membantu membangun basis data nasional tentang hasil kejahatan, menghasilkan statistik tentang pola dan tren pencucian uang utama di yurisdiksi tersebut. Alat IFFD tersedia secara gratis untuk otoritas negara dan peneliti berdasarkan permintaan.¹⁰

¹⁰ <https://thedocs.worldbank.org/en/doc/3ea7ffa49269eccc60ed6fb1a87507bb-0430012022/related/IFFD-Tool->

Sumber Data

Di bawah ini adalah daftar sumber data yang dapat digunakan untuk memberi informasi kepada NRA, beserta informasi yang dimiliki oleh otoritas-otoritas tersebut.

- **Lembaga penegak hukum** memainkan peran penting dalam memerangi pencucian uang dengan melakukan investigasi kriminal dan menegakkan hukum. Mereka menyediakan data terkait tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang, termasuk jumlah penyitaan barang bukti, tipologi yang dipublikasikan, dan statistik. Meskipun tindak pidana asal seringkali menjadi titik awal untuk menilai ancaman pencucian uang, penting untuk dicatat bahwa ancaman tersebut juga mencakup individu yang melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, pengumpulan data oleh penegak hukum juga harus mencakup wawasan dari perspektif para pelaku kejahatan untuk memahami modus operandi mereka dan mengidentifikasi tren yang muncul.
- **Lembaga peradilan dan penuntut umum** menyediakan data mengenai putusan terkait tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang, serta statistik tentang penuntutan dan hukuman. Data ini sangat penting untuk memahami efektivitas kerangka hukum dan langkah-langkah mitigasi yang digunakan dalam memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme serta mengidentifikasi area untuk dilakukan perbaikan. Data ini juga dapat memberikan kasus-kasus yang memberikan informasi kualitatif yang lebih rinci dan memberikan konteks yang bermanfaat. Data dari otoritas ini juga dapat membantu dalam menilai beberapa faktor geografis dan demografis yang terkait dengan risiko pencucian uang.
- **Unit Intelijen Keuangan** memainkan peran penting dalam ekosistem Anti-Pencucian Uang dengan mengumpulkan, menganalisis, dan menyebarkan intelijen keuangan. Mereka menyediakan data kuantitatif yang berharga seperti Laporan Transaksi Mencurigakan (STR)/Laporan Aktivitas Mencurigakan (SAR), dan analisis kualitatif laporan transaksi. Selain itu, Unit Intelijen Keuangan berkolaborasi dengan negara lain melalui MOU untuk berbagi intelijen keuangan penting dan menyimpan statistik tentang pertukaran informasi internasional formal dan informal. Seringkali, mereka juga melakukan analisis strategis termasuk menghasilkan laporan tentang tren dan tipologi yang harus dimanfaatkan selama proses NRA.
- **Otoritas pengawas** bertanggung jawab untuk mengawasi kepatuhan Lembaga Keuangan dan Bisnis dan Profesi Non-Keuangan yang Ditunjuk terhadap peraturan Anti-Pencucian Uang. Mereka berkontribusi dalam memberikan data kualitatif dari pemeriksaan di lokasi dan di luar lokasi serta Penilaian Risiko lainnya termasuk statistik tentang kegiatan pengawasan dan penegakan hukum. Mereka juga menyediakan Penilaian Risiko yang mengumpulkan informasi tentang risiko inheren dan pengendalian dari entitas yang diatur. Selain itu, mereka memberikan ringkasan persyaratan pelaporan kehati-hatian dan Anti-Pencucian Uang, dan langkah-langkah yang diambil untuk mengurangi risiko pencucian uang/pendanaan terorisme yang menawarkan wawasan tentang lanskap peraturan. Data dari otoritas pengawas juga penting untuk menilai kepentingan relatif dan materialitas sektor.
- **Badan keamanan dan intelijen nasional** seringkali memiliki akses pada informasi dan intelijen sensitif yang dapat memberikan wawasan berharga tentang ancaman yang muncul, jaringan kriminal transnasional, dan tipologi pencucian uang yang berkembang. Pemahaman

mereka tentang dinamika geopolitik dan masalah keamanan nasional dapat membantu mengidentifikasi risiko pencucian uang yang mungkin timbul dari aliran keuangan lintas batas, penghindaran sanksi, dan eksploitasi konflik internasional.

- **Badan statistik nasional** menawarkan data kuantitatif yang menjabarkan konteks ekonomi yang lebih luas untuk Penilaian Risiko. Data ini dapat meliputi data tentang pangsa ekonomi yang dikaitkan dengan sektor-sektor tertentu, neraca nasional, data perdagangan, arus masuk/keluar keuangan, dan indikator ekonomi lainnya yang dapat membantu dalam menilai potensi skala dan dampak kegiatan Pencucian uang dan Pendanaan Terorisme.
- Departemen pemerintah lainnya, termasuk Bea Cukai, Pajak, Imigrasi/Pengendalian Perbatasan, Perikanan, Perlindungan Lingkungan, registrasi perusahaan, dan Otoritas Keamanan menawarkan data yang dapat meliputi informasi tentang pergerakan lintas batas, aktivitas perdagangan, dan aktivitas lain yang dapat dikaitkan dengan pencucian uang.
- **Pemangku kepentingan sektor swasta** juga dapat memberikan informasi terperinci tentang pengalaman mereka di "garis depan". Mereka dapat berbagi informasi mengenai tren yang mereka lihat dalam pekerjaan mereka yang dapat mengarah pada identifikasi ancaman baru dan yang muncul, dan celah dalam peraturan yang dapat dieksploitasi untuk pencucian uang.
- **Penelitian independen dan studi akademis** dapat menawarkan perspektif objektif dan tidak memihak yang dapat mengungkap kerentanan atau ancaman yang muncul yang mungkin belum dilaporkan atau mengidentifikasi risiko yang tidak terlalu terlihat yang mungkin luput dari peninjauan data domestik saja. Selain itu, peneliti independen dapat melakukan analisa pandangan lintas yurisdiksi, menyoroti tren dan pola pencucian uang yang diamati secara internasional yang dapat memiliki efek limpahan pada lingkungan risiko nasional. Negara-negara harus memeriksa fakta studi untuk memastikan temuan tersebut dapat diandalkan dan kredibel sebelum menggunakannya sebagai referensi.
- **Sumber data internasional, termasuk Otoritas Pengawas Nasional (NRA) dan Lembaga Peninjau Ekonomi (MER) dari negara lain di kawasan ini**, memberikan informasi berharga tentang pencucian uang lintas batas, tindak pidana asal yang terkait, dan pelaku. Data ini sangat penting untuk memahami sifat global pencucian uang dan mengidentifikasi ancaman transnasional. Sumber kredibel lainnya juga mencakup data dari badan internasional seperti FATF, IMF, Interpol, OECD, UNODC, Bank Dunia, Organisasi Internasional Komisi Sekuritas (IOSCO), dan badan regional seperti Komisi Ekonomi Eurasia, Komisi Eropa, Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN), Europol, dan FSRB.

Tantangan Data dan Praktik Terbaik

Memperoleh data yang terkini dan akurat untuk NRA disebutkan oleh banyak negara di Jaringan Global sebagai sebuah tantangan. Mereka menyebutkan beberapa alasan untuk hal ini, termasuk kapasitas kelembagaan, kurangnya keahlian di bidang yang tidak tercermin dalam statistik kejahatan, dan kesulitan memperoleh informasi dari sektor swasta. Dengan mempertimbangkan keterbatasan ini, disarankan agar negara-negara mengadopsi pendekatan pragmatis dan terarah terhadap pengumpulan dan analisis data yang mempertimbangkan konteks dan kendala spesifik masing-masing negara. Negara-negara menyebutkan beberapa area di mana mereka merasa sangat sulit untuk memperoleh data, termasuk tentang badan hukum dan pengaturan, teknologi baru dan yang sedang berkembang, sektor yang tidak diatur dan informal, serta area berisiko rendah. Bagian ini memberikan beberapa pedoman umum tentang melengkapi data yang kurang lengkap.

Pada saat negara-negara menghadapi kendala kapasitas yang berdampak pada pengumpulan dan analisis data yang efektif, hal-hal berikut mungkin bermanfaat:

- Memprioritaskan sumber data dan menitik-beratkan pada perolehan informasi yang paling penting dan relevan dapat membantu mengurangi dampak kendala kapasitas pada proses NRA.
- Berkolaborasi dengan mitra regional dan internasional, memanfaatkan jaringan dan platform yang ada, dan mencari bantuan teknis dan dukungan dari organisasi internasional dan mitra pembangunan juga dapat memberikan sumber daya, keahlian, dan pedoman yang berharga untuk mendukung proses NRA dan meningkatkan kualitas dan keandalan data yang dikumpulkan.
- Menggunakan solusi teknologi, misalnya program Kecerdasan Buatan (AI) yang dapat menganalisis volume data besar dari berbagai sumber dengan cepat dan mengidentifikasi korelasi serta anomali data yang mungkin tidak langsung terlihat. Hal ini dapat digunakan untuk melengkapi metode tradisional dan harus selalu diinterpretasikan oleh ahli di bidangnya. Investasi dalam teknologi membantu negara-negara membangun kemampuan yang dapat digunakan secara teratur dan berkelanjutan, serta mendukung keberlanjutan proses NRA.
- Mengandalkan konsultasi ahli bidang terkait selama proses NRA untuk mengidentifikasi hambatan spesifik dan mengusulkan solusi untuk pengumpulan data.

Disarankan agar negara-negara melakukan segala upaya untuk mengembangkan dan memperkuat proses pengumpulan data mereka secara berkelanjutan. Namun, hal ini membutuhkan waktu. Beberapa aktivitas kriminal dan aliran dana ilegal mungkin lolos dari pengawasan lembaga penegak hukum dan statistik resmi, dan akan sulit untuk menilai dan memahami risiko yang terkait dengannya tanpa data. Memahami potensi ukuran dan sifat ancaman dan kerentanan yang "tidak diketahui" memungkinkan negara-negara untuk mengatasi titik buta dan memastikan efektivitas upaya Anti-Pencucian Uang.

Jika negara-negara mengetahui bahwa mereka kekurangan data di tingkat nasional selama persiapan NRA mereka, mereka dapat mengambil beberapa langkah untuk mendapatkan lebih banyak informasi untuk mendukung analisis mereka:

- Memanfaatkan keahlian otoritas kompeten nasional dengan melakukan wawancara atau konsultasi dengan mereka untuk melengkapi data yang dikumpulkan. Menggunakan kuesioner yang ditargetkan juga dapat menjadi bentuk pengumpulan informasi yang memadai.
- Mengakses informasi sumber terbuka dari sumber yang tersedia untuk umum, seperti artikel berita, makalah akademis, laporan dari negara lain, dan media sosial, untuk mengidentifikasi tren, tipologi, dan metodologi yang muncul dalam Pencucian uang. Negara-negara harus selalu menilai keandalan informasi tersebut dan menyadari kemungkinan bias dan informasi yang salah. Hal ini dapat memberikan konteks yang lebih luas tentang lingkungan tempat kejahatan terjadi.

Kotak 8. Menggunakan Data Kualitatif

Montserrat

Pada saat NRA dimulai, Montserrat tidak memiliki metode pengumpulan data yang kuat, dan harus bergantung pada sumber data eksternal, misalnya, pulau-pulau tetangga dan organisasi internasional untuk data. Namun, paparan internasional yang terbatas dengan pihak-pihak tersebut membatasi kegunaan data.

Untuk melengkapi data yang tersedia, Montserrat meminta informasi dari pejabat publik dan entitas sektor swasta menggunakan kuesioner. Montserrat berupaya membangun kepercayaan melalui komunikasi transparan dengan semua pihak untuk memastikan kuesioner dijawab dengan jujur, dan untuk mengurangi potensi kekhawatiran seputar kontaminasi dan penyalahgunaan data dalam komunitas kecil.

Proses ini membantu Montserrat melengkapi data domestik mereka yang terbatas untuk memberikan informasi kepada NRA, tetapi juga mendorong dukungan dari semua sektor untuk tindakan tindak lanjut NRA dan implementasi langkah-langkah mitigasi risiko.

- Konsultasi dengan Sektor Swasta: Wawasan dari sektor swasta dan para ahli asosiasi industri dapat menawarkan informasi berharga tentang risiko dan kerentanan yang terkait dengan sektor dan produk/layanan tertentu dan berkontribusi pada pemahaman yang lebih komprehensif dan terperinci tentang lanskap risiko.
- Kunjungan lapangan dan penilaian fisik memberikan wawasan langsung tentang lingkungan operasional, aktivitas, dan kerentanan yang terkait dengan sektor, industri, dan wilayah tertentu, dan membantu dalam memvalidasi dan menguatkan data yang dikumpulkan melalui sumber lain serta memberikan konteks tentang isu-isu spesifik sektor/wilayah. Hal ini dapat sangat berguna di wilayah perbatasan atau pelabuhan bebas.
- Kerja sama regional juga bermanfaat dalam berbagi informasi antar negara yang memiliki konteks dan geografi yang serupa. Penilaian Risiko supranasional, NRA, dan Laporan Evaluasi Bersama (MER) negara-negara tetangga dapat memberikan informasi tentang tren dan tipologi yang terlihat di kawasan tersebut.
- Data dan informasi internasional dapat dikumpulkan dengan berbagai cara, seperti melalui partisipasi dalam diskusi pada pertemuan internasional seperti FATF atau dengan meninjau laporan tipologi internasional. Negara-negara dapat terlibat dalam kerja sama internasional formal atau informal, berbagi informasi melalui Nota Kesepahaman (MOU), perjanjian bilateral/multilateral, atau melalui organisasi seperti Kelompok Egmont dari Unit Intelijen Keuangan. Hal ini memberikan konteks global kepada negara-negara dan dapat membantu mengidentifikasi risiko yang muncul. Interaksi dengan petugas penghubung selama Penilaian Risiko Pencucian Uang juga dapat memberikan wawasan yang berharga.

Kotak 9. Ancaman “Tidak Diketahui”

Singapura

Unit Intelijen Keuangan Singapura menyebarkan kuesioner kepada mitra internasional dari berbagai negara, termasuk anggota FATF, negara-negara di kawasan, dan negara-negara yang sering melakukan pertukaran dengan Singapura. Kuesioner ini meminta informasi mengenai persepsi mereka tentang hal-hal berikut:

- Ancaman pencucian uang di Singapura (termasuk tindak pidana asal domestik dan asing) dan sektor-sektor yang paling rentan.
- Tipologi atau modus operandi yang diamati di Singapura.
- Umpan balik tentang kerja sama antar lembaga penegak hukum.

Tanggapan tersebut dianalisis, dan temuannya kemudian dibagikan kepada Lembaga Penegak Hukum dan pengawas, seperti yang dibahas dalam Kelompok Antar Lembaga Risiko dan Tipologi Singapura untuk menilai apakah hasilnya mendukung pemahaman lembaga tentang ancaman dan risiko pencucian uang berdasarkan sumber informasi kuantitatif dan kualitatif lainnya yang dianalisis oleh pihak berwenang.

Temuan-temuan tersebut sebagian besar sesuai dengan pengamatan Singapura sendiri dan membantu memvalidasi pemahaman Singapura tentang kerentanannya terhadap tindak pidana asal asing, sektor-sektor yang rentan, dan persepsi Singapura sebagai sumber atau tujuan utama dana ilegal.

Beberapa negara mengalami kesulitan memperoleh informasi yang dapat diandalkan atau konsisten dari sektor swasta. Dalam kasus ini, negara-negara telah menunjukkan bahwa langkah-langkah berikut dapat membantu mendorong keterlibatan atau membantu memperoleh lebih banyak informasi:

- Melakukan konsultasi mengenai Laporan Transaksi Mencurigakan untuk mendapatkan gambaran umum tentang tren pencucian uang yang dialami sektor swasta. Negara-negara harus menyadari potensi bias sektor swasta di mana mereka mungkin lebih akrab dengan jenis kejahatan dan/atau indikatornya yang dapat memberikan kesan kritis yang salah terhadap tren pencucian uang.
- Memperoleh masukan terkait kepatuhan dan kerentanan yang relevan dari otoritas pengawas, bukan dari entitas sektor swasta itu sendiri.
- Merancang kuesioner standar yang jelas, terfokus, dan ringkas. Survei yang panjang dapat menyebabkan kelelahan survei dan respons berkualitas rendah. Menggunakan kuesioner digital dan menyertakan pertanyaan tertutup atau respons terbatas membantu meningkatkan kualitas dan konsistensi data. Negara-negara dapat mengajukan bantuan vendor survei atau spesialis data yang kredibel untuk memastikan kuesioner dirancang dan disusun dengan baik untuk memfasilitasi analisis dan interpretasi data serta memaksimalkan kegunaan tanggapan. Kuesioner dapat diuji pada sampel yang lebih kecil sebelum didistribusikan ke populasi sasaran.

- Mempertimbangkan kemitraan publik-swasta untuk juga memberikan lebih banyak informasi kepada otoritas nasional yang mungkin mereka tidak memiliki aksesnya secara otomatis. Dengan mendengarkan informasi dari mereka yang bekerja di garis depan dapat memberikan wawasan tentang tren yang muncul di berbagai sektor, jenis transaksi dan pelanggan, serta kerentanan utama.
- Berpartisipasi dalam acara dan lokakarya di mana banyak perwakilan sektor swasta yang terlibat untuk mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi tentang risiko lintas sektoral.

Kotak 10. Keterlibatan Sektor Swasta untuk Memperoleh Data

Jerman

Jerman menghubungi kontak akademis internasional untuk membahas metodologi mereka dan potensi cara untuk memperbaikinya. Mereka juga melibatkan para ahli akademis nasional yang telah mengembangkan laporan tentang luasnya aktivitas pencucian uang di Jerman, khususnya di area di mana mereka memiliki kesenjangan data. Saat mengembangkan kuesioner untuk dikirim ke sektor swasta, Jerman berkonsultasi dengan seorang kriminolog dan sosiolog untuk memastikan bahwa struktur kuesioner dan susunan kata pertanyaan akan menghasilkan tanggapan yang tidak bias dan dapat memfasilitasi analisis data.

Bagian Kesimpulan

Tabel 3. Poin-Poin Utama Bagian 1

Tabel ini menyoroti elemen-elemen utama dari tahap persiapan NRA yang khususnya lebih berguna bagi negara-negara pada tahap awal pengembangan proses NRA mereka.

	Poin-poin Utama
Komitmen Politik untuk Melaksanakan NRA	• Memperoleh komitmen tingkat pemerintah senior untuk NRA guna menyatukan para pemangku kepentingan di semua lembaga, mempromosikan pemberdayaan kepemimpinan dan peserta lainnya, mengalokasikan anggaran dan sumber daya serta investasi dalam proses tersebut, dan memperoleh jaminan upaya terbaik untuk mengimplementasikan tindakan yang direkomendasikan dari temuan-temuan tersebut. • Mengenai pendanaan dan sumber daya: ○ Meminta bantuan dari anggaran pemerintah atau sumber eksternal seperti program pembangunan internasional. ○ Memanfaatkan bantuan internasional (beberapa badan internasional (misalnya, Dewan Eropa, IMF, Bank Dunia, UNODC) menawarkan bantuan teknis dan dukungan pembangunan kapasitas serta dapat menyediakan sumber daya, keahlian, dan pelatihan untuk mendukung pengembangan NRA). ○ Berinvestasi dalam kegiatan inti tertentu (tetapi yang bersifat intensif sumber daya) yang merupakan kunci untuk mengembangkan NRA seperti pengumpulan data, analisis, dan kerangka acuan untuk membangun fondasi yang kokoh bagi pengulangan NRA di masa mendatang; melakukan sistematisasi beberapa kegiatan ini sejauh mungkin untuk memfasilitasi bagian-bagian tertentu dari proses NRA. • Mengalokasikan sumber daya yang ada secara strategis dengan memprioritaskan NRA dalam strategi Anti-Pencucian Uang nasional.
Mekanisme Inklusif untuk Menilai Risiko	• Menciptakan mekanisme yang sesuai dengan konteks negara Anda; mekanisme tersebut tidak perlu bersifat permanen. • Menetapkan dan menyusun peran dan tanggung jawab kepemimpinan secara jelas dan melakukan perumusan institusional untuk aspek-aspek proses NRA dalam rangka memastikan kemampuan replikasi dan keberlanjutan. • Merencanakan kebutuhan tenaga kerja dan jadwal NRA terlebih dahulu – berkonsultasi dengan negara-negara serupa untuk perkiraan beban kerja. Melakukan integrasi pekerjaan terkait NRA ke dalam program kerja dan tujuan para pejabat yang terlibat dalam penilaian. • Membangun dan menjaga memori institusional. • Melibatkan semua otoritas terkait di seluruh fungsi operasional, kebijakan, dan pengawasan. Beberapa akan memiliki peran yang lebih besar dibanding dengan yang lain. • Mengembangkan mekanisme koordinasi antar otoritas untuk memfasilitasi berbagi informasi. Meniadakan hambatan yang diketahui. • Menetapkan dan menyusun proses pengambilan keputusan secara jelas. • Memaksimalkan pelatihan/lokakarya/kegiatan penyuluhan lainnya bagi peserta untuk membangun pengetahuan dasar tentang Standar FATF, risiko pencucian uang, dan Penilaian Risiko. • Melakukan standarisasi terminologi risiko untuk mendorong pemahaman yang konsisten di antara semua pemangku kepentingan.

	• Melibatkan pemangku kepentingan non-pemerintah sejak dini dan secara berkelanjutan. Membangun kepercayaan dengan para pemangku kepentingan. • Menggunakan perjanjian kerahasiaan untuk menjaga kerahasiaan informasi. • Meminimalisasi waktu antara penyelesaian NRA dan penyebaran/komunikasinya.
Penetapan Ruang Lingkup dan Tujuan	• Memastikan semua peserta menyetujui tujuan, ruang lingkup, dan target audiensi. Tentukan lingkup dan format berdasarkan risiko dan konteks negara. • Sebelum memulai, melakukan tinjauan temuan dan proses NRA sebelumnya. Petik pelajaran yang relevan tentang proses dan substansi, yaitu, identifikasi apa yang perlu disesuaikan dari sebelumnya. • Melakukan inventarisasi informasi/data yang tersedia untuk melihat di mana ada celah. Periksa NRA dan Laporan Evaluasi Bersama (MER) negara lain. Periksa Penilaian Risiko supranasional (jika tersedia) dan penilaian risiko tingkat institusional oleh Lembaga Keuangan dan Bisnis dan Profesi Non-Keuangan yang Ditunjuk. • Mengembangkan rencana proyek secara terperinci dengan tenggat waktu dan hasil yang jelas. Alokasikan tanggung jawab untuk setiap tugas. • Melakukan Penilaian Risiko sektoral/tematik, yang diprioritaskan berdasarkan risiko, untuk melengkapi NRA dan memperbarui pemahaman risiko negara dengan cara yang tidak membutuhkan banyak sumber daya. • Mempertimbangkan kendala sumber daya dan ketersediaan bantuan teknis saat memilih metodologi. • Jika menggunakan konsultan atau penyedia bantuan teknis, waspadai risiko terlalu banyak melakukan outsourcing karena mereka tidak selalu terbiasa dengan kekhasan negara secara mendalam. Pastikan otoritas nasional tetap sepenuhnya bertanggung jawab dan dapat diandalkan atas proses NRA dan implementasi temuannya. Proses tersebut tidak boleh sepenuhnya diserahkan ke konsultan eksternal.
Pengumpulan Informasi dan Data	• Mengidentifikasi kesenjangan data di seluruh proses dan berupaya mengumpulkan data ini di antara pengulangan NRA. • Memprioritaskan sumber data yang dikumpulkan di tingkat nasional, selain mengumpulkan data di berbagai sub-tingkat. • Memanfaatkan sumber informasi lain (sumber internasional, sumber terbuka, data kualitatif dari otoritas nasional dan entitas pelapor). ○ Memanfaatkan keanggotaan badan internasional seperti FATF dan FSRB untuk mengambil praktik terbaik dari negara-negara dengan konteks serupa dan untuk memperkaya informasi tentang risiko regional. • Berinvestasi dalam solusi teknologi untuk membantu menghemat sumber daya dalam jangka panjang. • Memastikan semua peserta dapat mengakses informasi yang diperlukan. • Menggunakan MOU antar lembaga untuk memfasilitasi pertukaran informasi. • Menetapkan mekanisme yang tepat untuk menggabungkan masukan dari badan intelijen dengan cara yang aman. • Menerapkan protokol kerahasiaan yang tepat untuk memfasilitasi penilaian yang jujur.

Bagian 2: Menilai dan Memahami Risiko Pencucian Uang

Standar FATF telah menjadikan penilaian dan pemahaman risiko pencucian uang sebagai landasan rezim Anti Pencucian Uang yang efektif. R.1 mengharuskan negara-negara untuk “mengidentifikasi, menilai, dan memahami” risiko pencucian uang yang mereka hadapi, termasuk menunjuk otoritas atau mekanisme untuk mengoordinasikan tindakan untuk menilai risiko, sementara INR.1 menerangkan bahwa negara-negara harus mengambil langkah-langkah untuk mengidentifikasi dan menilai risiko pencucian uang mereka secara “berkelanjutan”.

Setelah suatu negara telah menetapkan prasyarat penting untuk NRA yang sukses seperti yang dijelaskan pada Bagian 1, negara tersebut dapat memulai proses analitis. Tidak ada pendekatan yang diwajibkan atau ‘satu pendekatan untuk semua’ untuk menganalisis risiko pencucian uang nasional – suatu negara harus merancang proses dengan mempertimbangkan kapasitas, risiko, dan konteksnya. Bagian ini menyarankan pendekatan linier yang harus diambil oleh negara tersebut, tetapi penting untuk dicatat bahwa pendekatan ini bukan alat yang preskriptif. Langkah-langkah yang diuraikan di bawah ini mewakili masukan kolektif dan praktik baik yang dikumpulkan dari Jaringan Global FATF, tetapi negara-negara harus menyesuaikan pendekatan tersebut agar sesuai dengan konteks dan persyaratan unik mereka sendiri.

Langkah-langkah yang dijelaskan dalam bagian ini untuk mengidentifikasi, menilai, dan memahami risiko pencucian uang yang dihadapi negara adalah sebagai berikut:

- i. Pemindaian Lingkungan
- ii. Proses Analitis
- iii. Analisis Ancaman
- iv. Analisis Kerentanan
- v. Penilaian Risiko
- vi. Pemindaian Cakupan Masa Depan

Pemindaian Lingkungan

Negara harus memulai penilaian risiko pencucian uang dengan melakukan pemindaian lingkungan yang mempertimbangkan konteks di mana negara tersebut berada, ancaman yang dihadapinya, dan kerentanan yang mungkin dimilikinya.

Mempertimbangkan Konteks Negara

Setiap negara menghadapi risiko pencucian uang yang unik dan berbeda. Akan bermanfaat untuk memulai proses dengan secara relatif terlebih dahulu mempertimbangkan seberapa besar risiko pencucian uang yang dihadapi negara tersebut, yaitu, apakah negara tersebut umumnya merupakan lingkungan dengan risiko pencucian uang yang lebih rendah atau lingkungan dengan risiko pencucian uang yang lebih tinggi?

Penentuan tersebut dapat disimpulkan dari pemindaian singkat dari data yang telah dikumpulkan, konteks lingkungan kejahatan di negara tersebut, sumber informasi non-pemerintah yang kredibel dan dapat diandalkan, serta intuisi para profesional yang membentuk tim yang melakukan NRA.

Tujuan melakukan langkah awal tersebut adalah untuk kemudian menguji asumsi yang telah dibuat negara tersebut di akhir proses. Misalnya, tingkat risiko pencucian uang negara tersebut harus

tercermin dalam peringkat risiko yang dikaitkan dengan ancaman dan kerentanan, sama seperti peringkat risiko agregat dari konstituen suatu sektor harus konsisten dengan peringkat kerentanan sektor itu sendiri. Jika terdapat inkonsistensi internal di seluruh proses Penilaian Risiko, negara-negara harus memeriksa kembali proses dan kesimpulan mereka untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan inkonsistensi tersebut.

Mengidentifikasi Ancaman dan Kerentanan

Untuk melengkapi pemindaian lingkungan, negara tersebut harus mengembangkan daftar awal ancaman dan kerentanan yang dihadapi negara tersebut. Proses identifikasi harus diusahakan agar bersifat komprehensif; Namun, proses ini juga harus dinamis, artinya risiko baru atau risiko yang sebelumnya tidak terdeteksi juga dapat dipertimbangkan pada setiap tahap dalam proses analisis NRA. Negara-negara telah mengidentifikasi praktik-praktik baik berikut dalam membuat penentuan awal tentang ancaman dan kerentanan yang mereka hadapi:

- i. **Diskusi Rutin di antara Para Pemangku Kepentingan** – diskusi ini menawarkan platform untuk berbagi pengetahuan, keahlian, dan perspektif tentang perkembangan terbaru dalam lanskap Pencucian uang dan Pendanaan Terorisme. Di beberapa negara, konferensi dan lokakarya yang telah ditetapkan dapat diselenggarakan sebagai fasilitas berbagi pengalaman dan kolaborasi di antara para pemangku kepentingan. Konferensi ini memberikan kesempatan bagi para ahli, praktisi, dan pembuat kebijakan untuk membahas tren, tantangan, dan praktik terbaik yang muncul. Hal ini juga dapat berupa kelompok kerja tetap atau pertemuan intra- dan antar-lembaga reguler yang diselenggarakan untuk topik ancaman tertentu.
- ii. **Keterlibatan dengan Akademisi dan Pakar Industri** – Forum ini menawarkan wawasan dan perspektif unik tentang risiko dan tren yang muncul. Riset akademis, opini ahli, dan studi dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor mendasar yang berkontribusi pada evolusi aktivitas pencucian uang, serta metodologi dan pendekatan inovatif untuk memerangi ancaman ini secara efektif.
- iii. **Menggunakan Referensi dari Pengamatan Badan Penegak Hukum dan Unit Intelijen Keuangan** – pengalaman operasional dan investigasi mereka dapat menawarkan perspektif dunia nyata tentang tren kejahatan, tipologi, dan modus operandi yang muncul. Dengan memanfaatkan keahlian dan intelijen yang dikumpulkan oleh Badan Penegak Hukum, negara-negara dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan akurat tentang berkembangnya lanskap pencucian uang. Laporan regional dari organisasi seperti Europol memberikan perspektif yang lebih luas tentang lanskap risiko regional, memungkinkan negara-negara untuk mengidentifikasi tren umum, kerentanan, dan area untuk tindakan kolaboratif.
- iv. **Memanfaatkan Masukan Sektor Swasta** – Hal ini termasuk lembaga keuangan, Bisnis dan Profesi Non-Keuangan yang Ditunjuk, Penyedia Layanan Aset Virtual, asosiasi industri, dan organisasi terkait lainnya, dan dapat memberikan nilai tambah wawasan yang dapat diandalkan tentang risiko dan kerentanan yang muncul dari perspektif bisnis.
- v. **Memantau Perkembangan, Tren, dan Tipologi Internasional** – hal ini meliputi pekerjaan FATF dan Jaringan Global, serta sumber kredibel lainnya. Sumber informasi yang andal tentang konflik yang sedang berlangsung, tren makroekonomi, dinamika geopolitik, dan bahkan perubahan alam/lingkungan akan membantu memformulasikan dan memahami informasi yang diperoleh secara internal, khususnya mengenai ancaman dan aktor ancaman.

Dengan menggunakan praktik-praktik baik ini, suatu negara dapat membuat daftar ancaman dan kerentanan penting yang memengaruhinya. Mereka yang terlibat dalam mengidentifikasi ancaman dan kerentanan harus tetap berpikiran terbuka untuk memastikan bahwa semua faktor yang relevan telah teridentifikasi sehingga menghindari pengabaian yang tidak disengaja terhadap isu-isu utama yang

berkontribusi pada risiko pencucian uang negara tersebut. Seharusnya tidak ada topik yang terlarang dalam sesi tukar pikiran mengenai NRA. Proses aktual yang digunakan untuk mengidentifikasi daftar risiko awal akan bervariasi. Beberapa negara mungkin menggunakan teknik yang lebih formal seperti survei dan analisis kuasi-statistik dari peristiwa atau keadaan masa lalu, sementara yang lain mungkin melakukan diskusi tukar pikiran di antara para ahli yang sesuai untuk menghasilkan daftar atau mungkin diagram pohon dari peristiwa atau keadaan terkait. Harus ditekankan bahwa sesuatu yang diidentifikasi dalam daftar pada tahap ini tidak secara otomatis diklasifikasikan sebagai memiliki risiko yang lebih tinggi (atau lebih rendah) – hal itu hanya diidentifikasi sebagai cukup relevan untuk dimasukkan ke dalam campuran risiko yang akan dianalisis.

Terlepas dari prosesnya, hasil dari pemindaian lingkungan negara tersebut harus berupa daftar ancaman dan kerentanan yang dihadapi negara tersebut. Setelah daftar awal diidentifikasi, proses analitis dapat dilanjutkan.

Proses Analitis

Proses analitis adalah bagian penting dari NRA. Melalui analisis, proses ini bergerak dari deskripsi risiko pencucian uang/pendanaan terorisme yang dihadapi suatu negara menuju pemahaman lengkap tentang sifat, cakupan, dan kemungkinan dampak dari ancaman dan kerentanan yang teridentifikasi. Oleh karena itu, tujuan dari langkah ini adalah untuk menganalisis ancaman dan kerentanan yang teridentifikasi secara terpisah untuk memahami sifat, sumber, kemungkinan, dan konsekuensinya, kemudian menetapkan nilai atau kepentingan relatif untuk masing-masing (misalnya, memberi peringkat masing-masing pada skala 1-10 berdasarkan tingkat kekritisannya).

Proses analitis dimulai dengan daftar ancaman dan kerentanan yang telah dikembangkan oleh negara tersebut melalui pemindaian lingkungan. Dua bab berikutnya (Analisis Ancaman dan Analisis Kerentanan) merinci praktik terbaik pertama dalam analisis ancaman ini dan kemudian kedua analisis dari kerentanan tersebut. Analisis ancaman dan kerentanan harus mempertimbangkan kemungkinan, cakupan, dan konsekuensi dari pencucian uang yang akan dihasilkan oleh ancaman dan kerentanan tersebut.

Dampak, Kecenderungan, dan Cakupannya

Dalam menilai dan memberikan peringkat untuk ancaman dan kerentanan, negara-negara harus mempertimbangkan untuk menganalisis kecenderungan dan cakupan pencucian uang akan terjadi, dan dampak yang akan dihasilkan oleh pencucian uang tersebut. Jika suatu negara tidak mempertimbangkan kecenderungan dan cakupan aktivitas beserta dampaknya, maka kemampuannya untuk mencapai kesimpulan tentang kepentingan relatif, tingkat keparahan, dan urgensi dari setiap faktor yang dinilai akan berkurang. Hal merupakan faktor penilaian utama.

Tidak ada satu metode yang cocok untuk semua dalam menilai kecenderungan, cakupan, dan dampak pencucian uang. Teknik analitis dapat melibatkan identifikasi sifat dan luasnya cakupan dampak dari setiap ancaman dan kerentanan beserta kecenderungan bahwa risiko tersebut dapat terwujud dan menggabungkan hasil tersebut untuk menentukan tingkat risiko, yang sering disajikan melalui penggunaan matriks. Proses aktual yang digunakan untuk mengidentifikasi dampak dan menentukan kecenderungan juga dapat bervariasi. Beberapa negara mungkin memilih untuk menggunakan teknik yang lebih formal seperti survei ahli atau analisis statistik frekuensi aktivitas terkait risiko pencucian uang di masa lalu; negara lain mungkin memilih untuk merefleksikan kesimpulan dari diskusi kelompok atau lokakarya untuk membantu mengembangkan informasi ini. Dalam penilaian dampak, penting juga untuk mempertimbangkan dampak lintas batas. Terutama dalam pencucian uang internasional, sebagian besar dampak negatif dapat terjadi di yurisdiksi asing tempat tindak pidana asal dilakukan dan analisis dampak yang hanya berfokus pada konteks domestik (misalnya, dampak pada wajib pajak) mungkin tidak mencerminkan skala dampak yang sebenarnya. Ketidakstabilan dan

penyimpangan pasar, dampak keamanan, potensi penyalahgunaan aktor keuangan dan non-keuangan domestik, dan sejauh mana warganya dapat menjadi korban kejahatan asing merupakan dampak umum pencucian uang lintas batas yang perlu dipertimbangkan oleh suatu negara.

Kotak 11. Menilai Dampak

Italia

Di Italia, analisis ancaman juga meliputi perkiraan dampak. Dampak diperkirakan menggunakan beberapa parameter: perkiraan finansial (mengukur signifikansi finansial dari ancaman); sanksi hukum (mengukur kerugian sosial yang ditimbulkan oleh peristiwa ancaman); laporan (mengukur kejadian aktual ancaman di wilayah tersebut). Kombinasi parameter-parameter ini menghasilkan indikator yang membantu para ahli dalam menilai ancaman.

Swedia

Di Swedia, dampak dianalisis secara terpisah dari ancaman dan kerentanan. Penilaian Risiko Nasional Swedia 2020/21 menganalisis risiko yang terkait dengan setiap sektor yang tunduk pada hukum Anti Pencucian Uang Swedia. Tahap pertama proses ini mengharuskan lembaga nasional untuk memberikan data mengenai ancaman dan kerentanan. Parameter yang terdiri dari ancaman dan kerentanan, serta indikator risiko, digunakan untuk menilai ancaman dan kerentanan yang terkait dengan setiap sektor melalui matriks empat tingkat.

Kemudian, dampak ditentukan dengan memeriksa faktor-faktor seperti ukuran sektor, materialitasnya bagi sistem keuangan, kepercayaan publik, dll. Dampak dan risiko sektoral (fungsi dari ancaman ditambah kerentanan) kemudian digunakan untuk menilai risiko sosial atau sistemik. Hal ini membantu para pembuat kebijakan dan otoritas pengawas untuk memprioritaskan dan mengambil pendekatan berbasis risiko, serta membantu entitas yang berkewajiban memahami dampak pencucian uang skala besar di sektor mereka.

Swedia menemukan bahwa memisahkan penilaian dampak dari analisis awal mengenai ancaman dan kerentanan memungkinkan data yang sama digunakan pada dua tingkat analisis. Risiko sektoral memandu para pelaku di sektor Lembaga Keuangan/Bisnis dan Profesi Non-Keuangan yang Ditunjuk untuk mengurangi risiko secara langsung (misalnya, melalui proses Kenali Pelanggan Anda (KYC) atau Uji Tuntas yang Ditingkatkan (EDD)). Risiko sistemik memandu pembuat kebijakan dan hukum, karena risiko tersebut harus dikurangi melalui legislasi, alokasi ulang sumber daya, dll.

Analisis Ancaman

Pada dasarnya, analisis ancaman bertujuan untuk mengidentifikasi tindak pidana penghasil pendapatan utama yang dihadapi sistem suatu negara (yaitu, tindak pidana asal, baik domestik maupun internasional) serta para pelaku kejahatan yang melakukan tindak pidana tersebut (yaitu, para pelaku). Negara-negara harus menganalisis baik tindak pidana asal maupun pelaku sebagai bagian dari analisis ancaman mereka untuk NRA Pencucian Uang:

Tindak pidana asal

Negara-negara harus terlebih dahulu mengidentifikasi tindak pidana asal yang paling umum yang mendorong aktivitas pencucian uang dalam konteks mereka. Hal ini membantu yurisdiksi memahami tingkat keparahan ancaman dan memprioritaskan upaya mereka untuk mengatasi tindak pidana asal yang paling signifikan yang memicu pencucian uang.

Negara-negara harus mengevaluasi skala dan dampak dari tindak pidana asal yang teridentifikasi. Hal ini melibatkan analisis prevalensinya dengan mengandalkan data kriminal domestik, intelijen, dan Unit Intelijen Keuangan seperti: jumlah keseluruhan tindak pidana asal yang dilakukan, proporsi investigasi pencucian uang negara, besarnya hasil yang diperoleh, Transaksi Keuangan Mencurigakan, penuntutan, hukuman, penyitaan aset, dll.

Interpretasi angka-angka ini memerlukan kehati-hatian karena berbagai faktor. Misalnya, kasus yang terdeteksi hanya mewakili sebagian dari volume kejahatan yang sebenarnya dan akan selalu ada kejahatan yang tidak terdeteksi. Jumlah kejahatan yang terdeteksi mungkin menjadi bias karena perilaku pelaporan. Kejahatan dengan korban langsung (seperti perampokan) biasanya lebih banyak dilaporkan, sementara beberapa kejahatan lain tidak banyak dilaporkan (seperti perdagangan manusia). Selain itu, di samping jumlah kejahatan, penting untuk mempertimbangkan total dan rata-rata hasil kejahatan untuk setiap kategori kejahatan. Sebagai contoh umum, jumlah kasus pencurian akan jauh lebih tinggi daripada kejahatan lainnya di sebagian besar negara. Namun, ini tidak berarti bahwa pencurian properti adalah ancaman pencucian uang yang paling utama di negara tersebut.

Selain data kriminal domestik, negara-negara harus lebih mengandalkan sumber informasi dan mekanisme lain untuk mengembangkan gambaran yang lebih menyeluruh, sesuai dengan konteks dan profil spesifik negara tersebut. Misalnya, negara-negara dapat menetapkan mekanisme untuk mengidentifikasi tindak pidana asal yang umum terjadi, misalnya, menggunakan data kuantitatif yang dilengkapi dengan diskusi mendalam atau melakukan penjajakan dengan lembaga penegak hukum, unit intelijen keuangan, pengawas sektor, dan berkonsultasi dengan pemangku kepentingan terkait lainnya untuk memvalidasi dan menyempurnakan pemahaman mereka tentang tindak pidana asal.

Penting juga untuk memahami bagaimana hasil kejahatan yang dihasilkan di dalam negeri dapat dicuci di dalam negeri atau di luar negeri, serta bagaimana hasil kejahatan asing dicuci di dalam negeri. Dengan sifat pencucian uang yang semakin bersifat transnasional, para penjahat mengeksploitasi celah dalam sistem anti-pencucian uang di berbagai negara untuk memindahkan hasil kejahatan. Kegagalan untuk memperhitungkan aliran lintas batas ini mengakibatkan pemahaman yang sangat tidak lengkap tentang risiko sebenarnya. Pemeriksaan aliran lintas batas lebih lanjut meminimalkan dampak dari hal-hal yang tidak diketahui. Misalnya, banyaknya permintaan informasi informal dari negara asing yang berkaitan dengan predikat tertentu dapat menyoroti ancaman asal domestik yang mungkin tidak terdeteksi

Kotak 12. Titik Data dan Mekanisme Lain untuk Analisis Ancaman

- Data bea cukai, imigrasi, dan pajak – Data ini memberikan informasi berharga mengenai aktivitas keuangan lintas batas, profil pelanggan, dan keadaan yang dapat memfasilitasi atau mempersulit transaksi lintas batas. Demikian pula, data tentang transaksi lintas batas masuk dan keluar di berbagai sektor dan data perdagangan internasional dapat memberikan wawasan tentang pola, tren, dan tipologi yang terkait dengan aktivitas pencucian uang. Misalnya, perbandingan silang catatan perdagangan nasional dengan negara mitra dagang dapat sangat bermanfaat untuk memahami risiko pencucian uang berbasis perdagangan (TBML).
- Mekanisme kerja sama Unit Intelijen Keuangan dan Aparat Penegak Hukum – mereka dapat memberikan informasi mengenai analisis transaksi lintas batas yang memberikan wawasan berharga tentang risiko yang terkait dengan aliran keuangan mencurigakan yang masuk dan keluar. Analisis informasi tersebut memungkinkan untuk mengidentifikasi tren dan korelasi dengan aliran ilegal dan keuangan, yang merupakan elemen penting dalam memahami gambaran keseluruhan risiko lintas batas.
- Permintaan kerja sama internasional informal - Memanfaatkan permintaan Interpol dan Egmont serta permintaan dan data informal internasional lainnya dapat memberikan wawasan tentang investigasi internasional, berbagi intelijen, dan upaya kolaboratif untuk memerangi kejahatan terorganisir transnasional dan aliran keuangan ilegal. Beberapa negara mungkin memiliki tim atau unit khusus yang dibentuk untuk mempelajari topik-topik tertentu atau membentuk tim di kantor-kantor luar negeri untuk memfasilitasi pertukaran intelijen dan kerja sama dengan berbagai sektor, seperti Penyedia Layanan Aset Virtual (VASP) dan bisnis kartu kredit.
- Permintaan kerja sama internasional formal - Memanfaatkan informasi Bantuan Hukum Bersama (MLA) dan bentuk data kerja sama internasional formal lainnya juga dapat meningkatkan kapasitas mereka untuk mengidentifikasi wawasan yang sangat berharga mengenai aspek lintas batas dari aktivitas pencucian uang, mengisi celah dalam identifikasi tindak pidana asal yang terjadi di luar negeri.

Pelaku dan Tipologi

Pengembangan pemahaman yang komprehensif mengenai pelaku yang terlibat dalam tindak pidana asal dan aktivitas pencucian uang sangat berguna untuk dilakukan. Pelaku dapat memiliki tingkat kompleksitas yang berbeda, dan dapat meliputi kelompok kejahatan terorganisir, penjahat kerah putih, pejabat korup, kelompok berpenghasilan rendah yang dipekerjakan sebagai kurir uang, dan lain-lain.

Pendekatan kolaboratif dengan lembaga penegak hukum, unit intelijen keuangan, dan pemangku kepentingan terkait lainnya dapat bermanfaat untuk mengumpulkan intelijen dari berbagai sumber dan mengembangkan profil komprehensif pelaku pencucian uang. Dalam kasus kelompok kejahatan terorganisir transnasional, melibatkan mitra asing dapat mendorong pemahaman bersama dan kuat. Pihak berwenang juga dapat memeriksa teknik dan tipologi pencucian uang spesifik yang digunakan oleh pelaku yang berbeda.

Kotak 13. Memahami tipologi

Brasil

Metodologi NRA Brasil tahun 2020 mencakup studi tentang tipologi TPPU/TPPT, yang bertujuan untuk memperkuat analisis yang dilakukan dalam penilaian ancaman dan kerentanan, mengidentifikasi "bagaimana" (yaitu, dengan cara, struktur, format, dan pengaturan apa) ancaman telah beroperasi di negara tersebut dan sektor serta sistem kontrol mana yang mungkin terpengaruh.

Berdasarkan daftar 62 tipologi yang telah diidentifikasi sebelumnya, beberapa lembaga dalam sistem anti-pencucian uang/pemberantasan pendanaan terorisme telah diundang untuk berkontribusi dengan metode operasi lain, yang mungkin, relevan, dan berulang, tetapi masih belum diidentifikasi secara formal. Produk akhir dari proses ini, selain penggunaannya untuk keperluan NRA, diterbitkan dengan bekerja sama dengan COAF dalam sebuah dokumen berjudul Kasus dan Kasus – Kumpulan Tipologi Anti-Pencucian/Pemberantasan Pendanaan Terorisme dan Proliferasi, Edisi Khusus, Penilaian Risiko Nasional, 2021, yang bertujuan untuk mempromosikan penyebaran dan meningkatkan kesadaran di kalangan masyarakat Anti-Pencucian/Pemberantasan Pendanaan Terorisme dan Proliferasi.

Pada akhirnya, pemahaman tentang pelaku dan tipologi tersebut berguna bagi pihak berwenang untuk mengevaluasi keahlian teknis, sumber daya, dan jaringan yang tersedia bagi pelaku. Peningkatan kemampuan kriminal dapat menunjukkan perlunya dilakukan penelitian lebih dalam mengenai jaringan tersembunyi dan hal-hal yang tidak diketahui diminimalkan untuk mengembangkan pemahaman ancaman yang menyeluruh.

Ancaman Pencucian Uang Lintas Batas dan Tindak Pidana Asal Asing

Menilai ancaman pencucian uang domestik juga mencakup pemahaman peran suatu negara sebagai penghasil hasil kejahatan yang dicuci di dalam negeri atau di luar negeri, serta bagaimana hasil kejahatan asing dicuci di negara tersebut.

Metode TPPU dapat berkembang dengan cepat dalam skala global, dan kerentanan di satu negara dapat dieksploitasi oleh penjahat di negara lain, sehingga melemahkan upaya pengendalian domestik. Kegagalan untuk memperhitungkan aliran lintas batas ini mengakibatkan pemahaman yang sangat tidak lengkap tentang risiko sebenarnya, dan pengabaian terhadap tren lintas batas dapat berarti suatu negara tidak memiliki kemampuan untuk mendeteksi ancaman yang muncul. Meremehkan dampak pencucian uang transnasional dapat secara signifikan melemahkan efektivitas kerangka kerja Anti-Pencucian Uang negara, regional, dan bahkan global. Oleh karena itu, negara-negara harus mengadopsi pendekatan yang seimbang yang secara menyeluruh memeriksa lanskap TPPU domestik dan vektor TPPU ke dan dari negara asing, dengan mengevaluasi risiko internasional dan lintas batas sebagai bagian dari NRA yang komprehensif.

TPPU lintas batas mencakup risiko aliran TPPU masuk dan keluar, yang menimbulkan tantangan dalam pengumpulan data tentang hasil kejahatan dan tindak pidana asal terkait. Mengingat sifat TPPU dan kejahatan keuangan yang semakin bersifat lintas batas, kolaborasi internasional menjadi sangat penting dalam melakukan NRA, sehingga memungkinkan upaya terkoordinasi untuk mengganggu jaringan TPPU transnasional.

Mengidentifikasi tindak pidana asal di luar negeri, yang merupakan aktivitas kriminal yang mendasari penghasilan ilegal, sangat penting dalam menilai ancaman TPPU lintas batas. Namun, hal ini dapat menjadi tantangan karena kejahatan tersebut bersifat kompleks dan transnasional. Berdasarkan studi komprehensif dari Jaringan Global, beberapa praktik baik telah diidentifikasi untuk mengatasi tantangan tersebut.

Kotak 14. Praktik Baik dalam Menilai Ancaman TPPU Lintas Batas

- Konsultasi dengan mitra pemerintah asing – proses ini memberikan wawasan yang berguna tentang tindak pidana asal yang lazim terjadi di yurisdiksi asing. Dengan berkolaborasi dengan para mitra ini, negara-negara dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang sifat, tren, dan karakteristik tindak pidana asal di luar negeri, sehingga memungkinkan mereka untuk mengembangkan strategi dan intervensi yang tepat sasaran secara efektif. Misalnya, Singapura, Indonesia, dan Malaysia secara proaktif melibatkan mitra domestik dan global mereka atau kelompok konsultatif regional melalui survei, untuk mendapatkan umpan balik sebagai poin data tambahan bagi penilaian dan pemahaman otoritas yang berwenang tentang ancaman dan kerentanan TPPU terkait kejahatan lintas batas atau tindak pidana asal dan pencucian uang di luar negeri serta aliran dana ilegal terkait. Dengan membangun dan memperkuat kemitraan, berbagi intelijen dan praktik terbaik, serta berkolaborasi dalam investigasi dan operasi bersama, negara-negara dapat meningkatkan kapasitas mereka untuk mengidentifikasi, menyelidiki, dan mengganggu jaringan TPPU, serta memulihkan aset ilegal.
- Melibatkan berbagai pemangku kepentingan – termasuk jurnalis, akademisi, dan pakar industri, yang dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang faktor-faktor sosial, ekonomi, dan politik yang lebih luas yang memengaruhi aktivitas TPPU. Beberapa negara melakukan diskusi kelompok terfokus (FGD) dengan para pemangku kepentingan untuk mendapatkan wawasan tentang isu, tren, dan modus operandi yang terkait dengan aliran dana ilegal, serta mengidentifikasi potensi unsur asing dan koneksi transnasional yang terlibat dalam aktivitas TPPU. Keterlibatan ini membantu mengembangkan pemahaman komprehensif tentang lanskap TPPU dan merancang strategi yang ditargetkan serta membangun kemitraan.
- Platform kolaborasi regional – di beberapa wilayah, negara-negara tetangga telah menetapkan protokol komunikasi untuk berbagi informasi terkini tentang tindak pidana asal yang lazim. Misalnya, di negara-negara Nordik dan wilayah perbatasan tiga negara di Amerika Selatan, protokol tersebut memfasilitasi pertukaran informasi dan intelijen mengenai tren, tipologi, dan perkembangan yang muncul dalam tindak pidana asal. Memanfaatkan saluran komunikasi yang telah ditetapkan ini dapat meningkatkan kerja sama lintas batas, berbagi intelijen, dan upaya investigasi bersama, sehingga memperkuat kapasitas untuk mengidentifikasi, menyelidiki, dan mengganggu jaringan pencucian uang.

Menarik Kesimpulan tentang Ancaman

Setelah mengumpulkan dan mempertimbangkan berbagai data kuantitatif dan kualitatif, negara-negara perlu memahami dan memberikan peringkat pada ancaman yang dinilai. Setiap negara memiliki cara berbeda dalam menetapkan peringkat ancaman, dan tidak ada aturan baku. Peringkat ancaman harus ditetapkan secara relatif, memberikan indikator kepada negara tentang tindak pidana asal dan pelaku mana yang menimbulkan ancaman terbesar dan, oleh karena itu, di mana upaya Anti-Pencucian Uang dan langkah-langkah mitigasi harus diprioritaskan. Hal ini dapat dilakukan, misalnya, pada skala 1-10 dengan deskripsi kualitatif yang mendefinisikan setiap peringkat ancaman. Deskripsi untuk setiap peringkat harus meliputi kecenderungan dan sejauh mana ancaman tersebut terlibat dalam TPPU di negara tersebut, dan dampak aktivitas TPPU tersebut. Pendekatan terstandarisasi yang mengidentifikasi tingkat kritis ancaman memungkinkan hasil yang objektif dan bermanfaat yang dapat berkontribusi pada tindakan pasca-penilaian, sebagaimana dirinci dalam Bagian 3 pedoman ini.

Penilaian ancaman harus mendokumentasikan ‘mengapa’, yaitu, mengapa ancaman tersebut dinilai telah mencapai tingkat kritis atau peringkat tertentu. Rasionalisasi yang terdokumentasi ini memberikan kemampuan bagi para pembuat kebijakan dan otoritas operasional untuk mengambil tindakan pasca penilaian, sebagaimana dirinci dalam Bagian 3 pedoman ini.

Analisis Kerentanan

Suatu kerentanan dapat dieksploitasi oleh ancaman atau dapat mendukung atau memfasilitasi aktivitasnya. Dalam konteks Penilaian Risiko TPPU, melihat kerentanan sebagai sesuatu yang berbeda dari ancaman berarti berfokus pada, misalnya, fitur-fitur inheren dari sektor tertentu, produk keuangan, atau jenis layanan yang membuatnya menarik dan layak untuk tujuan TPPU. Pada dasarnya, analisis kerentanan bertujuan untuk mengidentifikasi sektor-sektor utama, produk, layanan, saluran, basis pelanggan, lokasi geografis, dan faktor-faktor tingkat nasional lainnya (termasuk kelemahan dalam sistem, kontrol, atau langkah-langkah mitigasi) yang paling sering dieksploitasi oleh ancaman untuk aktivitas TPPU.

Negara-negara harus mempertimbangkan untuk memeriksa kerentanan baik di tingkat nasional maupun sektoral. Mengintegrasikan perspektif nasional dan sektoral ke dalam proses Penilaian Risiko memastikan bahwa negara-negara mengembangkan strategi komprehensif untuk mengurangi kerentanan TPPU dan menjaga integritas sistem keuangan. Dengan menilai kerentanan tingkat nasional, penilaian menyeluruh akan membantu mengidentifikasi kesenjangan atau kelemahan sistemik yang dapat dieksploitasi oleh pelaku pencucian uang. Di sisi lain, dengan memeriksa kerentanan spesifik sektor, negara-negara dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang lanskap TPPU yang unik dan memprioritaskan intervensi yang ditargetkan untuk memperkuat ketahanan area yang memiliki risiko tinggi.

Kerentanan Nasional

Saat menilai kerentanan TPPU di tingkat nasional, otoritas dapat mengevaluasi kerentanan yang berhubungan dengan kontrol Anti-Pencucian Uang, termasuk kelengkapan kerangka hukum dan peraturan negara untuk APU/PPT. Kekurangan dalam kerangka APU nasional dapat menimbulkan kerentanan kritis yang dapat dieksploitasi oleh penjahat. Hal ini termasuk meninjau keluasan dan kedalaman cakupan hukum, peraturan, dan pedoman yang berlaku, serta keselarasan mereka dengan standar internasional. Hal ini juga berdampak pada koordinasi, sumber daya, kapasitas, dan efektivitas otoritas nasional, dengan memeriksa ketersediaan pelatihan khusus, akses ke teknologi dan intelijen keuangan, serta kemampuan untuk secara efektif mendeteksi, menyelidiki, dan mengganggu aktivitas TPPU.

Pemeriksaan yang jujur dan tidak bias merupakan hal utama dalam penilaian kerentanan nasional. Referensi dapat dibuat, misalnya, untuk penilaian eksternal terhadap negara tersebut, tetapi diperlukan refleksi diri yang bersifat internal, kritis, dan berpikiran terbuka, tanpa memperhatikan implikasi politik, pesan dari industri, atau kemungkinan mitigasi di masa depan. Bias kelembagaan harus dipertimbangkan dan kelemahan yang diketahui (misalnya, korupsi yang terdokumentasi dalam penegakan hukum atau kurangnya independensi dalam peradilan) harus diakui (dan dapat diterapkan) dalam proses NRA. Bahkan kerentanan yang dianggap bersifat historis dapat diperiksa kembali dengan sudut pandang baru.

Selain kerentanan yang terkait dengan kontrol APU, beberapa kerentanan mungkin muncul terkait dengan faktor-faktor inheren di negara tersebut, seperti ukuran dan kompleksitas ekonomi, ukuran dan penyebaran geografis layanan keuangan, sejauh mana ekonomi bersifat informal/berbasis tunai, atau

keragaman badan hukum dan pengaturan. Dalam hal ini, dampak eksklusi keuangan terhadap ukuran dan risiko ekonomi informal/berbasis tunai juga harus dipertimbangkan. Faktor-faktor sosial seperti imigrasi, kohesi sosial, dan area konflik dalam populasi dapat diperhatikan, serta penggunaan teknologi dalam transaksi keuangan dan faktor geografis.

Kerentanan Sektoral

Selain evaluasi di tingkat nasional, penilaian kerentanan TPPU yang komprehensif harus mencakup pemeriksaan kerentanan inheren yang terkait dengan berbagai sektor keuangan dan non-keuangan di negara tersebut, termasuk lembaga keuangan, Penyedia Barang dan Jasa dan Profesi, dan Penyedia Layanan Aset Virtual. Setiap sektor kemungkinan akan menghadirkan kerentanan unik yang mungkin ingin dieksploitasi oleh pelaku pencucian uang, dan analisis yang ditargetkan dan sektor-sektor khusus sangat penting untuk mengembangkan tindakan penanggulangan yang efektif. Sektor-sektor tertentu mungkin menawarkan produk atau layanan dengan fitur risiko yang lebih tinggi. Ciri-ciri umum sektor berisiko tinggi meliputi volume transaksi tunai yang tinggi, pergerakan dana lintas batas, atau kemampuan untuk menyembunyikan kepemilikan sebenarnya, sehingga menarik bagi pelaku pencucian uang.

Penilaian sektoral dapat mengevaluasi tingkat kepatuhan terhadap kewajiban APU yang ada, seperti uji tuntas pelanggan, pemantauan transaksi, dan pelaporan aktivitas mencurigakan. Penilaian tersebut juga harus memeriksa tingkat integrasi dengan sektor-sektor yang diatur lainnya. Sebagai contoh, kualitas dan ketersediaan informasi kepemilikan manfaat yang tersedia bagi entitas yang beroperasi di sektor-sektor ini dapat menjadi faktor yang berpengaruh. Penilaian kerentanan terkait kepatuhan harus didasarkan pada temuan kegiatan pengawasan, bukan pelaporan mandiri oleh sektor swasta.

Selain itu, analisis kerentanan sektoral harus mempertimbangkan efektivitas mekanisme pengawasan dan penegakan APU untuk berbagai industri. Kelemahan dalam rezim pengawasan, seperti sumber daya yang tidak mencukupi, kurangnya keahlian khusus, atau sanksi yang tidak memadai untuk ketidakpatuhan, dapat menciptakan kerentanan yang dapat dieksploitasi oleh pelaku pencucian uang. Seperti yang dilaporkan oleh beberapa negara, kurangnya informasi tentang dan dari sektor-sektor tertentu menimbulkan tantangan dalam menilai kerentanan mereka. Kerjasama dengan sektor swasta sejak awal proses, dan secara berkelanjutan, dapat membantu negara-negara untuk secara jelas menetapkan peran mereka dan masukan yang diharapkan (misalnya, data spesifik untuk lanskap sektoral, pengamatan terhadap transaksi mencurigakan, modus operandi pelaku).

Terakhir, keberadaan sektor yang sepenuhnya tidak berlisensi dan/atau tidak diatur, atau segmen ilegal dari sektor yang diatur, harus dipertimbangkan sebagai faktor utama dalam analisis kerentanan sektoral. Kegagalan untuk mencatat keberadaan atau kemungkinan layanan keuangan yang tidak disetujui akan merusak keseluruhan bagian analisis kerentanan dari NRA. Seringkali, pesaing yang diatur dan calon pesaing dari penyedia layanan nakal tersebut akan berada dalam posisi untuk mengungkap operator yang tidak berlisensi, poin lain yang mendukung dialog yang erat dengan sektor swasta (terutama termasuk operator kecil hingga menengah di dalam sektor yang mungkin lebih cenderung menghadapi tekanan dari bisnis yang beroperasi secara ilegal). Pengawas juga akan menyadari kerentanan ini tetapi mungkin tidak ditugaskan secara khusus untuk mencarinya. Keberadaan bisnis informal atau layanan "di luar pembukuan" dari bisnis yang diatur mungkin lebih umum di sektor Layanan Transfer Uang atau Nilai (MVTs), pertukaran mata uang, Penyedia Layanan Perusahaan dan Perwalian (TCSP), perjudian, dan Penyedia Layanan Aset Virtual (VASP), untuk menyebutkan beberapa contoh yang diambil dari masukan negara. Ada kemungkinan juga bahwa layanan yang tidak memiliki izin dapat digunakan oleh komunitas atau kelompok tertentu atau lebih

umum di lokasi geografis tertentu di dalam negeri. Selain itu, tim NRA harus bersikap skeptis terhadap klaim atau asumsi lama bahwa sektor-sektor tertentu 'tidak ada' di negara tersebut atau sepenuhnya dilarang oleh hukum atau peraturan domestik, mengingat bahwa layanan dapat ditawarkan secara daring di suatu negara meskipun dihosting di luar negeri.

Menarik Kesimpulan tentang Kerentanan

Setelah mengumpulkan dan mempertimbangkan berbagai data kuantitatif dan kualitatif, negara-negara perlu memahami dan memberikan peringkat pada kerentanan yang dinilai. Negara-negara akan melakukan cara yang berbeda dalam memberikan peringkat kerentanan, dan tidak ada aturan baku. Peringkat kerentanan harus ditetapkan secara relatif, memberikan indikator kepada negara tentang area, sektor, dan produk/layanan nasional mana yang perlu dimitigasi dan diprioritaskan. Hal ini dapat dilakukan, misalnya, pada skala 1-10 dengan menggunakan deskripsi kualitatif yang mendefinisikan setiap peringkat kerentanan. Deskripsi untuk setiap peringkat harus mencakup kecenderungan dan sejauh mana kerentanan tersebut dieksploitasi untuk TPPU di negara tersebut, dan dampak dari kegiatan TPPU tersebut. Pendekatan standar yang mengidentifikasi tingkat kritis kerentanan memungkinkan hasil yang objektif dan bermanfaat yang dapat berkontribusi pada tindakan pasca-penilaian, sebagaimana dirinci dalam Bagian 3 pedoman ini.

Kotak 15. Pembobotan Sektor

Bank Dunia

Setelah kerentanan berbagai kategori Lembaga Keuangan dan Bisnis dan Profesi Non-Keuangan yang Ditunjuk dinilai, Alat NRA Bank Dunia menawarkan dua pendekatan kepada pengguna untuk menentukan kerentanan keseluruhan dari semua sektor:

1. **Pembobotan Berdasarkan Kepentingan Ekonomi:** Metode ini mengharuskan kelompok kerja NRA untuk menetapkan bobot pada setiap kategori Lembaga Keuangan dan Bisnis dan Profesi Non-Keuangan yang Ditunjuk pada skala 1 (Sangat Rendah) hingga 10 (Sangat Tinggi), yang mencerminkan signifikansinya dalam perekonomian negara. Karena sektor sangat beragam, tidak ada satu indikator pun yang berlaku secara universal. Misalnya, meskipun sektor perbankan dapat diukur berdasarkan ukuran total aset, ukuran ini kurang relevan untuk sektor-sektor seperti bisnis transfer uang, asuransi, real estat, atau pengacara. Akibatnya, Bank Dunia menyarankan untuk menggunakan beberapa indikator—termasuk ukuran aset, kontribusi PDB, omset tahunan, jumlah karyawan, dan basis klien—secara bersamaan untuk menentukan bobot relatif. Kerentanan sektoral keseluruhan negara kemudian dihitung menggunakan rata-rata pembobotan dari peringkat kerentanan spesifik sektor.
2. **Pembobotan Berdasarkan Kerentanan:** Dalam pendekatan ini, sektor-sektor dengan kerentanan yang lebih besar memiliki bobot lebih besar dalam peringkat kerentanan keseluruhan. Pembobotan tersebut memprioritaskan 20 persen teratas sektor berdasarkan peringkat kerentanannya dan menggunakan rata-ratanya untuk menghitung kerentanan sektoral secara keseluruhan, memberikan hasil yang lebih konservatif. Metode ini juga dikenal sebagai "pendekatan pintu terbuka," dengan mengacu pada risiko terhadap rumah yang memiliki banyak pintu masuk tetapi hanya satu yang diamankan, menyoroti potensi risiko melalui area yang paling tidak terlindungi.

Metode pertama adalah metode awal alat ini dan banyak digunakan oleh berbagai negara. Pengguna dapat memilih salah satu pendekatan untuk mewakili kerentanan keseluruhan atau menganalisisnya sebagai rentang antara kedua tingkat tersebut. Pembobotan ini dapat dilakukan untuk risiko sektoral (bukan kerentanan), yang lebih disukai dalam aplikasi terbaru dari Alat NRA.”

Meskipun pendekatan terstruktur dan berbasis data dapat memberikan titik awal yang berguna, proses penilaian kerentanan pada akhirnya harus melibatkan analisis kontekstual yang lebih komprehensif yang mempertimbangkan keadaan unik dan saling ketergantungan dalam yurisdiksi tersebut. Negara-negara harus memanfaatkan penilaian dan kebijaksanaan profesional. Pemberian peringkat kerentanan akhir harus mencerminkan penilaian holistik berbasis bukti yang menggabungkan konteks unik, saling ketergantungan, dan dinamika yang berkembang dalam yurisdiksi tersebut.

Penilaian kerentanan harus mendokumentasikan 'mengapa', yaitu, mengapa kerentanan dinilai telah mencapai tingkat kritis atau peringkat tertentu. Alasan yang terdokumentasi ini memberikan kemampuan bagi para pembuat kebijakan dan otoritas operasional untuk mengambil tindakan pasca penilaian, sebagaimana dirinci dalam Bagian 3 pedoman ini.

Materialitas merupakan faktor penting dalam penilaian kerentanan, namun, menentukan "bobot" relatif dapat menjadi tantangan. Keterlibatan dengan otoritas pengawas dan pengatur sangat penting untuk mengumpulkan data tentang kualitas dan efektivitas sistem APU. Hal ini meliputi informasi dari inspeksi di lokasi, inspeksi tematik, dan evaluasi kerentanan dan risiko inheren yang terkait dengan TPPU, serta menggunakan indikator kuantitatif seperti ukuran bisnis dan volume transaksi.

Penilaian Risiko

Risiko inheren adalah tingkat risiko yang ada tanpa mempertimbangkan langkah-langkah mitigasi risiko apa pun; risiko residual, di sisi lain, memperhitungkan dampak langkah-langkah mitigasi suatu negara.

Risiko Inheren

Risiko inheren didefinisikan sebagai tingkat risiko yang ada sebelum memperkenalkan langkah-langkah mitigasi apa pun. Hal ini harus menjadi titik awal bagi negara-negara ketika akan melakukan Penilaian Risiko.

Tujuan dari Penilaian Risiko secara keseluruhan adalah untuk menentukan bagaimana ancaman dapat berinteraksi dengan kerentanan untuk mengembangkan pemahaman risiko akhir. Negara-negara dapat menggunakan berbagai pendekatan untuk menganalisis risiko dan merumuskan peringkat risiko, seperti matriks risiko, peta risiko, atau rumus matematika atau statistik untuk menilai tingkat risiko akhir. Meskipun tidak ada satu model yang pasti, mereka yang terlibat dalam analisis risiko dapat secara kolektif memberi peringkat atau mengkategorikan setiap risiko yang diidentifikasi berdasarkan tingkat dan kepentingan relatifnya.

Dalam berbagai kasus, mengeksplorasi persimpangan bagaimana ancaman dan kerentanan berinteraksi tidak akan menyebabkan perubahan (material) dalam kepentingan relatif ancaman dan kerentanan (yaitu, jika suatu kerentanan dinilai memiliki tingkat kepentingan 7/10, maka umumnya tetap seperti itu). Tetapi analisis interaksi ini sangat penting untuk pemahaman risiko, karena memberikan pemahaman yang lebih rinci tentang lingkungan risiko di negara tersebut.

Risiko Residual

Risiko residual didefinisikan sebagai tingkat risiko yang tersisa setelah langkah-langkah mitigasi risiko telah diperkenalkan.

NRA dapat menyertakan penilaian terhadap langkah-langkah mitigasi risiko yang ada. Hal ini dapat mencakup kebijakan dan langkah-langkah operasional yang ada yang diambil oleh negara tersebut, serta tingkat kepatuhan oleh lembaga keuangan, penyedia layanan aset virtual (VASP), dan Bisnis dan Profesi Non-Keuangan yang Ditunjuk (DNFBP), efektivitas pelaporan aktivitas mencurigakan, dan dampak tindakan pengawasan yang diambil oleh otoritas terkait. Tingkat kematangan dan keterkaitan

langkah-langkah mitigasi tertentu dan tantangan efektivitas yang diketahui dari langkah-langkah mitigasi yang diambil di masa lalu, dapat dipertimbangkan (misalnya, registrasi kepemilikan manfaat baru atau persyaratan pelaporan kas baru mungkin belum memiliki dampak yang diantisipasi selama beberapa tahun). Dengan demikian, risiko residual lebih rendah atau setidaknya sama dengan risiko inheren tergantung pada kualitas kontrol yang diterapkan untuk mengurangi risiko.

Analisis terperinci ini menjelaskan sejauh mana mekanisme mitigasi risiko yang ada diterapkan secara efektif dan apakah mekanisme tersebut mencapai hasil yang diinginkan dalam mendeteksi, mencegah, dan mengganggu aktivitas TPPU. Analisis kesenjangan ini berfungsi sebagai dasar untuk mempertimbangkan langkah-langkah mitigasi risiko lebih lanjut, atau langkah-langkah yang disederhanakan, seperti yang dijelaskan dalam Bagian 3 dokumen ini. Negara-negara didorong untuk berinteraksi dengan para pemangku kepentingan seperti pengawas, sektor swasta, masyarakat sipil, dan pihak lain mengenai dampak langkah-langkah mitigasi terhadap pekerjaan mereka.

Kotak 16. Menentukan Peringkat Risiko

Hong Kong, Tiongkok

Hong Kong, Tiongkok menyelenggarakan lokakarya pemangku kepentingan di awal setiap latihan NRA untuk menjelaskan metodologi NRA dan kriteria penilaian setiap komponen risiko TPPU utama untuk memastikan pemahaman yang selaras dan disepakati tentang metodologi dan standar peringkat. Peringkat awal komponen risiko dan dasar pembenarannya dibahas di antara para pemangku kepentingan dan kesepakatan dicapai berdasarkan konsensus, yang membentuk dasar dari tinjauan dan perumusan langkah-langkah mitigasi risiko selanjutnya.

Setelah menganalisis profil risiko inheren yang menggabungkan konsekuensi dan kemungkinan yang dievaluasi dari aktivitas Pencucian Uang dan memberikan perspektif holistik tentang paparan risiko keseluruhan yurisdiksi, Hong Kong, Tiongkok kemudian mempertimbangkan berbagai langkah mitigasi risiko yang ada. Hal ini menentukan komponen risiko residual yang tersisa setelah memperhitungkan faktor-faktor mitigasi risiko ini. Peta risiko yang menunjukkan persimpangan tingkat ancaman dan kerentanan digunakan untuk menyajikan peringkat risiko akhir. Peringkat risiko kemudian dibagikan dan dibahas dalam Komite Pengarah, di mana semua pemangku kepentingan terkait bergabung untuk meninjau temuan, memberikan umpan balik, dan secara kolektif menyepakati Penilaian Risiko Akhir. Pendekatan kolaboratif ini memastikan peringkat risiko dilakukan dengan adil, wajar, dan diterima secara umum, sehingga membuka jalan bagi pengembangan strategi mitigasi risiko yang tepat sasaran.

Validasi Hasil

Sebagai bagian dari langkah pertama dalam proses ini, negara tersebut mempertimbangkan apakah mereka memiliki risiko TPPU yang lebih tinggi atau lebih rendah secara agregat. Sekarang setelah negara tersebut mengevaluasi komponen-komponen yang membentuk risiko TPPU, yaitu ancaman, kerentanan, dan dampak, maka hasilnya perlu dipertimbangkan. Jika negara tersebut menganggap dirinya memiliki risiko TPPU yang relatif lebih rendah tetapi memiliki sejumlah ancaman dan kerentanan yang dinilai tinggi, hal ini seharusnya mendorong negara tersebut untuk mempertimbangkan apakah mereka benar-benar memiliki risiko TPPU yang lebih rendah secara agregat. Demikian pula, jika suatu negara menganggap dirinya memiliki risiko TPPU yang lebih tinggi daripada negara lain, tetapi memiliki lebih sedikit ancaman dan kerentanan yang dinilai tinggi, maka mereka harus mempertimbangkan apakah mereka telah menilai ancaman dan kerentanan untuk negara tersebut dengan cara yang tepat.

Proses Penilaian Risiko harus konsisten di berbagai tingkat analisis risiko, yaitu, tingkat risiko TPPU negara harus tercermin dalam peringkat risiko yang dikaitkan dengan ancaman dan kerentanan, atau

peringkat risiko agregat dari konstituen suatu sektor harus konsisten dengan peringkat kerentanan sektor itu sendiri. Jika terdapat inkonsistensi internal di seluruh proses Penilaian Risiko, negara-negara harus meninjau kembali proses dan kesimpulan mereka untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan inkonsistensi tersebut.

Pemindaian Horison

Terakhir, negara-negara harus berupaya untuk tetap waspada terhadap ancaman, kerentanan, dan risiko yang berkembang dan muncul untuk meningkatkan kesiapan mereka dan beradaptasi dengan lingkungan risiko yang terus berubah. Hal ini terwujud dalam dua cara: (1) memahami lintasan ancaman, kerentanan, dan risiko, dan (2) mengidentifikasi ancaman, kerentanan, dan risiko yang muncul.

Memahami dan mengantisipasi risiko baru dan yang berkembang dalam lanskap kejahatan keuangan yang dinamis dapat menimbulkan tantangan yang signifikan. Hal ini memerlukan pemantauan berkelanjutan, kolaborasi, dan pemanfaatan beragam sumber intelijen untuk memperoleh pemahaman komprehensif tentang lanskap ancaman dan kerentanan. Proses ini melibatkan pemeriksaan kelompok kriminal yang muncul, produk dan layanan baru, dan faktor-faktor lain yang dapat berkontribusi pada perubahan lingkungan risiko, termasuk efek dari langkah-langkah mitigasi. Misalnya, langkah-langkah legislatif atau peraturan yang diterapkan di satu sektor dapat menggeser aktivitas pencucian uang ke sektor lain. Memahami dinamika ini dan potensi dampaknya pada lanskap risiko sangat penting untuk mengembangkan strategi dan langkah-langkah proaktif dan adaptif. Banyak negara menggunakan Pemindaian Horison untuk mengidentifikasi potensi pendorong Pencucian uang dan area risiko.

Meskipun ancaman, kerentanan, dan risiko yang muncul yang diperiksa dalam Pemindaian Cakupan Horison mungkin belum cukup kritis untuk menjadi bagian dari komponen analitis NRA Pencucian uang, negara-negara harus mendokumentasikan pengamatan mereka dan bagaimana faktor-faktor ini saat ini memengaruhi lingkungan risiko. Dokumentasi ini akan memastikan bahwa pengulangan NRA di masa mendatang mempertimbangkan risiko-risiko yang muncul ini atau ditangani dalam upaya analitis lain antar NRA.

Negara-negara juga harus berupaya untuk terus mengikuti perkembangan ancaman, kerentanan, dan risiko selama kegiatan yang diuraikan di bagian sebelumnya. Hal ini akan memberikan komponen yang berorientasi ke masa depan pada NRA dan dapat mengidentifikasi ancaman, kerentanan, dan risiko yang mungkin menjadi lebih umum dalam waktu dekat. Hipotesis tentang perkembangan ini harus diuji secara berkelanjutan jika risiko diperkirakan akan mencapai tingkat kritis.

Kotak 17. Pemindaian Horison

Australia

Australia memanfaatkan metodologi dan teknik intelijen strategis yang digunakan oleh lembaga penegak hukum dan intelijen Australia untuk menilai perkembangan tindak pidana asal dan sektor/saluran, sehingga memungkinkan dilakukannya identifikasi ancaman yang muncul dan tindakan proaktif. Perkembangan jangka pendek (tiga tahun) dari setiap tindak pidana asal dan sektor/saluran dinilai dengan peringkat meningkat, muncul, stabil, atau menurun.

Salah satu ancaman yang dianalisis dalam NRA TPPU Australia 2024 adalah penipuan, khususnya sifat metode penipuan yang terus berkembang karena penggunaan teknologi yang lebih canggih oleh pelaku. Tercatat bahwa para penjahat memanfaatkan meningkatnya jumlah pelanggan yang berinteraksi melalui saluran digital untuk dapat menjangkau lebih banyak korban secara lebih efisien, misalnya dengan memalsukan nomor telepon, alamat email, atau situs web organisasi yang sah, atau membuat iklan palsu, profil media sosial, dan ulasan palsu. Australia menyimpulkan bahwa ancaman ini kemungkinan akan meningkat selama tiga tahun ke depan dan akan semakin sulit untuk diatasi mengingat penggunaan teknologi dan kecerdasan buatan oleh para pelaku kejahatan.

Denmark

Dalam NRA Denmark tahun 2018, terdapat bagian yang didedikasikan untuk tren kejahatan di masa depan. Keempat aktivitas yang diidentifikasi merupakan ancaman terkait kejahatan siber, semuanya dilakukan melalui internet. Salah satu ancaman yang diidentifikasi adalah peretasan dan spionase, yang dinilai berisiko tinggi. Denmark mencatat bahwa metode yang paling populer digunakan adalah serangan siber DDoS dan ransomware. Pada saat NRA dibuat, Denmark hanya mengalami serangan semacam itu yang melibatkan pencurian identitas atau pemerasan. Penilaian tersebut dikembangkan menggunakan berbagai sumber, misalnya: data tren demografis dan ekonomi dari departemen statistik nasional Denmark, data internasional tentang solusi pembayaran digital dan bank digital, data tentang Sistem Keuangan Denmark dari IMF, dan informasi tentang enkripsi dari Europol.

Berdasarkan hal ini, Denmark menyimpulkan bahwa meningkatnya kecanggihan teknologi dapat membahayakan nyawa manusia, dan semakin maraknya kejahatan ekonomi, yang berdampak pada lanskap risiko TPPU.

Bagian Kesimpulan

Tabel 4. Poin-Poin Penting Bagian 2

Tabel ini menyoroti elemen-elemen utama dari tahap analitis NRA.

Sub-Bagian	Elemen Utama
Pemindaian Lingkungan	• Harus dilakukan pertimbangan terhadap konteks khusus negara Anda saat melakukan NRA untuk mengidentifikasi tema-tema tertentu yang mungkin perlu diperhatikan lebih mendalam - misalnya, faktor geografis, politik, ekonomi, struktural, sosial/budaya, teknologi, dan legislatif dapat memengaruhi risiko TPPU. • Harus dilakukan pengembangan pandangan awal tentang tingkat risiko TPPU di tingkat negara. • Harus dilakukan identifikasi daftar ancaman dan kerentanan TPPU paling kritis yang memengaruhi negara tersebut. Dalam langkah ini, perlu dilakukan refleksi diri yang kritis dan tanpa prasangka dan bias yang sudah ada sebelumnya.
Proses Analitis	• Harus dilakukan pengembangan proses terstruktur untuk menganalisis ruang lingkup, sifat, kecenderungan, dan dampak dari ancaman dan kerentanan yang teridentifikasi. • Melalui proses ini, harus dilakukan penilaian relatif terhadap tingkat kritis ancaman dan kerentanan, yaitu ancaman tingkat rendah, menengah, dan tinggi.
Analisis Ancaman	• Harus dilakukan pertimbangan kejahatan yang menyebabkan terjadinya pencucian uang di negara tersebut, dan para pelaku yang melakukan pencucian hasil kejahatan mereka. • Harus dilakukan pengenalan ancaman domestik dan lintas batas.
Analisis Kerentanan	• Harus mempertimbangkan kerentanan tingkat nasional dan sektoral.
Penilaian Risiko	• Harus dilakukan penjelajahan interaksi antara ancaman dan kerentanan yang memengaruhi negara. • Harus dilakukan validasi hasil untuk memastikan bahwa Penilaian Risiko konsisten secara internal, yaitu tingkat risiko TPPU negara harus tercermin dalam peringkat risiko yang dikaitkan dengan ancaman dan kerentanan, atau peringkat risiko agregat dari konstituen suatu sektor harus konsisten dengan peringkat kerentanan sektor itu sendiri.
Pemindaian Horison	• Harus dilakukan upaya pemahaman lintasan ancaman dan kerentanan, yaitu, yakin bahwa hal-hal tersebut akan menjadi lebih serius dari waktu ke waktu. • Harus dilakukan interaksi dengan pemangku kepentingan publik dan swasta untuk mengidentifikasi risiko yang muncul.

Bagian 3: Tindakan Pasca-NRA

Standar FATF dengan jelas menunjukkan bahwa identifikasi, penilaian, dan pemahaman risiko TPPU didorong oleh tujuan. INR.1 menunjukkan bahwa “Negara-negara harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengidentifikasi dan menilai risiko Pencucian uang dan Pendanaan Terorisme bagi negara tersebut, secara berkelanjutan dan untuk: (i) menginformasikan potensi perubahan pada rezim APU/PPT negara tersebut, termasuk perubahan pada undang-undang, peraturan, dan langkah-langkah lainnya; (ii) membantu pengalokasian dan prioritas sumber daya APU/PPT oleh otoritas yang berwenang; dan (iii) menyediakan informasi untuk Penilaian Risiko APU/PPT yang dilakukan oleh lembaga keuangan dan Bisnis dan Profesi Non-Keuangan yang Ditunjuk. Negara-negara harus selalu memperbarui penilaian tersebut dan harus memiliki mekanisme untuk menyampaikan informasi yang tepat mengenai hasilnya kepada semua otoritas yang berwenang dan Badan Regulator Mandiri (SRB), lembaga keuangan, dan Profesi Non-Keuangan yang Ditunjuk terkait.”

Selain itu, R.2 mengidentifikasi bahwa, “Negara-negara harus mengidentifikasi, menilai, dan memahami risiko Pencucian uang dan Pendanaan Terorisme untuk negara tersebut, dan harus mengambil tindakan, termasuk menunjuk otoritas atau mekanisme untuk mengkoordinasikan tindakan untuk menilai risiko, dan menerapkan sumber daya, yang bertujuan untuk memastikan risiko tersebut dimitigasi secara efektif”.

Tujuan pengembangan pemahaman yang lebih rinci tentang risiko TPPU nasional adalah untuk menyesuaikan strategi APU nasional dengan risiko tersebut. Menyesuaikan strategi APU dengan risiko berarti bahwa area dengan risiko lebih tinggi harus menerapkan langkah-langkah mitigasi risiko yang lebih ketat. Namun, hal ini merupakan penerapan pendekatan berbasis risiko yang tidak lengkap. Area dengan risiko lebih rendah juga harus menerapkan langkah-langkah yang lebih sederhana atau lebih ringan.

Tujuan penting dari NRA adalah untuk memastikan bahwa semua pemangku kepentingan yang terkait telah sepenuhnya memahami risiko TPPU yang dihadapi negara dan melakukan tindakan efektif untuk mengurangnya. Penyebaran dan komunikasi hasil NRA merupakan tonggak penting dalam proses tersebut. Namun, penting untuk melihat proses NRA sebagai proses yang berkelanjutan, dan dokumen NRA dipandang sebagai gambaran risiko TPPU saat ini di negara tersebut berdasarkan metode evaluasi yang tepat sesuai dengan konteks negara tersebut.

Terakhir, lingkungan risiko yang dihadapi suatu negara bersifat dinamis. Langkah-langkah mitigasi dapat menggeser TPPU ke bagian lain dari perekonomian atau mendorong ancaman untuk bertindak dengan cara yang berbeda. Proses NRA adalah proses yang berkelanjutan. Penting bagi negara-negara untuk memberikan umpan balik tentang apa yang berjalan baik dalam proses NRA dan mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan proses pengulangan di masa mendatang.

Bagian terakhir ini mengidentifikasi tiga aktivitas paralel yang harus dilakukan negara-negara setelah mereka melakukan finalisasi NRA Pencucian Uang:

- i. Menyelaraskan Strategi dan Kebijakan TPPU dengan Risiko
- ii. Melakukan Sosialisasi dan Melibatkan Pemangku Kepentingan
- iii. Memberikan Umpan Balik dan Peningkatan Proses NRA

Menyelaraskan Strategi dan Kebijakan APU dengan Risiko

Penting agar proses NRA dan hasilnya bermanfaat untuk menginformasikan rezim APU negara tersebut. Pelaksanaan NRA tidak boleh menjadi proses birokrasi tanpa hasil. NRA harus berfungsi sebagai elemen dasar bagi para pembuat keputusan negara untuk menyelaraskan strategi dan kebijakan nasional dengan lingkungan risikonya. Hal ini meliputi, sebagaimana dirinci dalam INR.1, untuk “(i) menginformasikan potensi perubahan pada rezim APU/PPT negara, termasuk perubahan pada undang-undang, peraturan, dan langkah-langkah lainnya; (ii) membantu dalam

alokasi dan prioritas sumber daya APU/PPT oleh otoritas yang berwenang”, dan “kebijakan APU/PPT/PPP nasional, yang diinformasikan oleh risiko yang diidentifikasi”, sebagaimana disyaratkan dalam R.2.

NRA harus memiliki dampak nyata pada suatu negara. Studi kasus menunjukkan bahwa NRA yang diposisikan dengan baik dan dimanfaatkan secara efektif dapat membawa manfaat signifikan untuk meningkatkan sistem APU suatu negara. Oleh karena itu, negara-negara tidak boleh melihat NRA sebagai formalitas belaka. NRA harus dianggap sebagai alat untuk mengembangkan pemahaman tentang risiko TPPU di negara tersebut dan memiliki dampak positif pada sistem APU negara tersebut di tingkat strategis dan operasional.

Kotak 18. Integrasi Temuan NRA ke dalam Strategi APU

Luksemburg

Strategi APU/PPT Nasional didasarkan pada hasil NRA dan pembaruan berkala. Perumusan dan implementasi Strategi Nasional APU/PPT dijamin oleh Komite Pengarah Antar Kementerian untuk memerangi TPPU/TPPT (Komite Pengarah) dan Komite Pencegahan TPPU/TPPT (Komite Pencegahan), keduanya didukung oleh Sekretariat Eksekutif tetap.

Komite Pengarah terdiri dari Kementerian Kehakiman, Kementerian Keuangan, Kementerian Keamanan Dalam Negeri, dan Kementerian Luar Negeri dan Urusan Eropa. Kementerian-kementerian ini memainkan peran penting dalam lanskap APU/PPT. Komite Pengarah menyusun Strategi Nasional APU/PPT tahun jamak, yang diajukan kepada Dewan Pemerintah untuk diadopsi. Strategi Nasional APU/PPT menetapkan prioritas utama untuk memerangi TPPU/TPPT dan mendefinisikan tujuan strategis tingkat tinggi yang selanjutnya diperkuat oleh tujuan operasional. Komite Pengarah akan melapor kepada Pemerintah tentang kemajuan yang telah dicapai dalam implementasi strategi APU/PPT Nasional.

Komite Pencegahan mengkoordinasikan implementasi strategi APU/PPT Nasional melalui anggota operasionalnya (perwakilan Kementerian Kehakiman, Kementerian Keuangan, otoritas pengawas dan Badan Regulator Mandiri, Unit Intelijen Keuangan, otoritas penuntut dan investigasi, serta perwakilan asosiasi profesional). Sesuai dengan strategi APU/PPT Nasional saat ini, yang dikategorikan ke dalam berbagai prioritas, Komite Pencegahan memiliki lima kelompok kerja, yang mengumpulkan perwakilan terkait dari Komite Pencegahan dan didukung oleh sumber daya tetap dari Sekretariat Eksekutif: Risiko dan statistik (bertanggung jawab untuk menjalankan proses NRA), Pengawasan, Tindakan pencegahan, Transparansi badan hukum dan pengaturan hukum, dan Deteksi, investigasi, dan penuntutan.

Yang penting, menyelaraskan strategi APU dengan risiko tidak hanya dilihat sebagai persyaratan untuk menerapkan langkah-langkah mitigasi yang lebih kuat pada situasi risiko yang lebih tinggi. Menyelaraskan strategi APU dengan risiko juga berarti bahwa area risiko yang lebih rendah harus menerapkan tindakan yang lebih sederhana atau lebih ringan.

Pengembangan Rencana Aksi

Mengembangkan rencana aksi berdasarkan temuan NRA dapat membantu negara mengembangkan langkah-langkah mitigasi berbasis risiko yang nyata untuk risiko yang telah teridentifikasi. Negara-

negara harus memprioritaskan strategi mitigasi risiko berdasarkan kriteria objektif untuk memperkuat sistem APU mereka.

Setiap rencana aksi yang dihasilkan dari NRA dapat diadopsi di tingkat pemerintahan yang sesuai dan didukung oleh sumber daya yang diperlukan untuk mencakup semua langkah mitigasi risiko yang diprioritaskan [lihat kotak 19]. Rencana tersebut harus mencakup tindakan untuk mengurangi risiko TPPU. Langkah-langkah ini harus spesifik dan dapat ditindaklanjuti, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kapasitas pemangku kepentingan, dengan mengingat kendala sumber daya yang ada. Langkah-langkah tersebut harus diprioritaskan menggunakan pendekatan berbasis risiko. Melibatkan semua pemangku kepentingan yang relevan sepanjang proses dan mengembangkan mekanisme komunikasi dan koordinasi yang berkelanjutan dapat memfasilitasi kesepakatan tindakan yang direkomendasikan dengan memastikan dukungan sejak awal, mendorong kolaborasi berkelanjutan, dan menjamin bahwa pemangku kepentingan merasa memiliki dan bertanggung jawab atas rencana aksi tersebut. Negara-negara juga dapat mengidentifikasi indikator kinerja utama (KPI), untuk memantau dan mengukur implementasi tindakan.

Kotak 19. Rencana Aksi Berdasarkan Temuan NRA Kerajaan Arab Saudi

Setelah melakukan NRA TPPU/TPPT, Arab Saudi mengadopsi strategi nasional untuk APU/PPT, dan Rencana Aksi Nasional terkait. Strategi nasional menetapkan tujuan strategis tingkat tinggi untuk meningkatkan efektivitas Kerajaan di berbagai bidang kebijakan dan operasi APU/PPT. Tindakan rekomendasi yang diprioritaskan didasarkan pada temuan NRA terkait kerentanan dan peringkat risiko yang sesuai. Rencana aksi menetapkan tindakan yang lebih spesifik, dengan indikator dan jadwal yang sesuai dan mencerminkan temuan spesifik NRA. Sebagai hasil dari rencana aksi, Arab Saudi mengeluarkan surat edaran dan pedoman kepada otoritas pengawas dan sektor swasta, dan memperbarui undang-undang yang ada sesuai dengan risiko yang diidentifikasi. Komite Tetap Anti-Pencucian Uang (AMLPC) bertanggung jawab untuk menyiapkan NRA, dan juga untuk memantau implementasi rencana aksi.

Nigeria

Peta Jalan Implementasi Strategis (SIR) Nigeria berfungsi sebagai rencana aksi APU/PPT sejalan dengan Strategi Nasional APU/PPT/PPPSPM negara tersebut. Peta jalan ini mencakup semua tindakan yang direkomendasikan dari NRA Nigeria, dan langkah-langkahnya telah diprioritaskan berdasarkan risiko. Nigeria telah berupaya untuk mendorong kerja sama nasional dan menyelaraskan implementasi rencana aksi dengan strategi nasional lainnya tentang pendanaan terorisme, anti-korupsi, dan pengendalian narkoba, dengan memperkenalkan pertemuan triwulan antara unit-unit yang bertanggung jawab untuk berbagi informasi dan data, menyelenggarakan acara bersama, dan memfasilitasi pertukaran keahlian untuk mempromosikan tujuan bersama. Sebuah Nota Kesepahaman (MOU) telah ditandatangani oleh Unit Intelijen Keuangan (sebagai Sekretariat Komite Antar-Kementerian tentang APU/PPT/PPPSPM) dan Unit Teknis tentang Tata Kelola dan Reformasi Anti-Korupsi serta Sekretariat Rencana Induk Pengendalian Narkoba Nasional untuk meresmikan prosedur yang akan memastikan penyelarasan strategi yang tepat dalam praktik. Subkomite Bantuan Teknis IMC (bagian dari Unit Intelijen Keuangan) bertanggung jawab untuk memantau implementasi SIR dan menyampaikan laporan kinerja tahunan pada pertemuan tinjauan tahunan IMC.

Suatu negara memiliki fleksibilitas untuk menentukan bagaimana negara tersebut akan memastikan bahwa strategi dan kegiatan nasionalnya berbasis risiko. Beberapa opsi meliputi:

- Mengubah atau mengembangkan undang-undang dan peraturan;
- Mengembangkan dan/atau meningkatkan mekanisme kerja sama nasional dan internasional;
- Meningkatkan sumber daya, anggaran, dan melakukan peningkatan kapasitas;
- Tindakan pengawasan berbasis risiko;
- Investigasi, penuntutan, dan pemulihan aset.

Mengubah atau Mengembangkan Undang-Undang dan Peraturan

NRA seringkali menunjukkan celah atau kelemahan dalam kerangka anti-pencucian uangnya yang dapat dieksploitasi oleh pelaku kejahatan. Salah satu hasil umum dari NRA dapat melibatkan perubahan pada kerangka undang-undang atau peraturan negara untuk mengisi celah-celah ini. Misalnya, ruang lingkup Bisnis dan Profesi Non-Keuangan yang Ditunjuk dapat diperluas, jika perlu, berdasarkan hasil Penilaian Risiko.

Proses ini membutuhkan waktu dan melibatkan banyak pemangku kepentingan, termasuk pembuat kebijakan, ahli hukum, dan lembaga pemerintah terkait untuk memastikan bahwa undang-undang yang diusulkan bersifat komprehensif dan efektif, serta selaras dengan standar internasional dan praktik terbaik. Konsultasi awal dan berkelanjutan dengan pemangku kepentingan non-pemerintah seperti sektor swasta dan masyarakat sipil juga direkomendasikan untuk mengatasi kekhawatiran sejak awal dan menghindari dampak yang tidak diinginkan setelah undang-undang diberlakukan. Analisis efektivitas undang-undang ini harus dipertimbangkan dalam versi NRA berikutnya untuk memastikan bahwa undang-undang tersebut memiliki dampak yang direncanakan, dan agar negara dapat mengubahnya lebih lanjut jika diperlukan.

Kotak 20. Langkah-Langkah Mitigasi Risiko sebagai Tanggapan terhadap Temuan NRA Prancis

Sebagai hasil dari NRA, Prancis memperkenalkan beberapa langkah untuk membatasi anonimitas di sektor-sektor sensitif seperti transfer dana dan pertukaran uang. Prancis membatasi penggunaan uang tunai dan transaksi yang dilakukan menggunakan kartu prabayar untuk mengurangi beberapa tipologi terpenting yang telah teridentifikasi.

Prancis juga memperluas kewajiban APU/PPT ke sektor keuangan dan non-keuangan tertentu di luar cakupan persyaratan FATF untuk mengurangi beberapa risiko utama. Misalnya, Prancis memperkenalkan persyaratan pengawasan terhadap penanganan dana yang disalurkan melalui profesi yang diatur sendiri. Wali amanat yudisial dan notaris diharuskan beroperasi bersama dengan Kantor Deposito dan Konsinyasi (CDC) dan pengacara dengan dana pengelolaan biaya pengacara (CARPA) ketika menangani dana. Dimasukkannya CARPA dalam rezim APU/PPT pada tahun 2020 memungkinkan Prancis untuk memperkuat langkah-langkah dalam rangka mengidentifikasi dan mengurangi risiko terpenting bagi profesi tersebut.

Korea

Korea telah melakukan beberapa perubahan undang-undang sejalan dengan temuan NRA negaranya. Setelah dilakukannya NRA pada tahun 2018, yang mengidentifikasi penyalahgunaan Aset Virtual sebagai kerentanan berisiko tinggi karena anonimitas yang diizinkan dalam transaksi, Korea Selatan menyertakan Penyedia Layanan Aset Virtual ke dalam lingkup kerangka kerja APU/PPT dan memberlakukan perlindungan konsumen yang lebih baik serta pembatasan penggunaan Aset Virtual. Penyalahgunaan uang tunai juga dicatat sebagai kerentanan berisiko tinggi dalam NRA karena anonimitas dan tinjauan studi kasus TPPU yang menunjukkan bahwa uang tunai adalah instrumen TPPU yang paling umum. Untuk mengatasi hal ini, Korea Selatan menurunkan ambang batas untuk laporan transaksi tunai. Korea Selatan juga bertujuan untuk meningkatkan pelaporan Transaksi Mata Uang.

Mengembangkan dan/atau Meningkatkan Mekanisme Kerja Sama Nasional dan Internasional

Proses NRA menyatukan berbagai otoritas nasional di seluruh fungsi operasional, kebijakan, dan pengawasan, dan dalam berbagai kasus melibatkan unsur kerja sama internasional dengan negara-negara tetangga, organisasi internasional, dan lembaga keuangan internasional. Proses ini juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan non-pemerintah yang dapat sangat terpengaruh oleh hasil NRA. Praktik NRA itu sendiri dapat membantu menemukan beberapa tantangan koordinasi dan berbagi informasi serta meningkatkan koordinasi nasional.

Di tingkat domestik, NRA dapat menyediakan platform dan forum untuk pertukaran ide dan informasi yang harus didukung secara berkelanjutan karena hal ini memecah sekat antar berbagai lembaga, mempromosikan pemahaman bersama tentang risiko TPPU, dan menunjukkan bahwa NRA adalah proses yang berkelanjutan. Beberapa negara mengembangkan Kemitraan Publik-Swasta (*Public Private Partnership/PPP*) yang berlanjut setelah NRA, sehingga memungkinkan diskusi berkelanjutan tentang risiko dengan mereka yang berada di garis depan. Menjaga hubungan ini dan memfasilitasi komunikasi berkelanjutan akan membangun kepercayaan di antara para pemangku kepentingan dan mempromosikan pendekatan yang lebih holistik terhadap risiko. Hal ini juga memungkinkan tindak lanjut dan pemantauan yang lebih efisien terhadap langkah-langkah mitigasi risiko dan efektivitasnya. Disarankan untuk melakukan segala upaya untuk memastikan bahwa tingkat koordinasi dan kerja sama yang tinggi yang diamati selama NRA tetap dijaga setelah selesai.

Kotak 21. Koordinasi Nasional

Norwegia

Norwegia memperkenalkan mekanisme koordinasi nasional yang disebut Forum Kontak pada tahun 2015 untuk mengoordinasikan tindakan dalam menilai risiko. Mekanisme ini mencakup berbagai pemangku kepentingan dalam rezim APU/PPT. Forum Kontak secara khusus diperintahkan untuk mengidentifikasi ancaman dan tren pencucian uang/pendanaan terorisme, mengoordinasikan pekerjaan untuk mengembangkan strategi APU/PPT dan mengawasi pengembangan NRA Norwegia. Koordinasi dan kerja sama antar otoritas nasional telah meningkat secara signifikan sejak pembentukan forum ini dan membantu memfasilitasi pertukaran informasi serta memberikan pembaruan tentang pekerjaan kebijakan di tingkat domestik dan internasional.

Mengenai otoritas operasional, sistem TI nasional Badan Penegak Hukum yang disebut Indica memfasilitasi koordinasi, kerja sama, dan berbagi informasi antara unit Intelijen Keuangan dan Badan Penegak Hukum. Lembaga Penegak Hukum, termasuk distrik kepolisian, memasukkan informasi investigasi mereka ke dalam sistem, dan unit Intelijen Keuangan dapat mengakses informasi ini dan menambahkan informasi mereka sendiri ke dalam sistem karena sistem unit Intelijen Keuangan terhubung ke Indicia, sehingga memudahkan untuk saling berbagi informasi investigasi dan intelijen keuangan.

Kotak 22. Praktik Baik Kerja Sama Internasional

Inggris

Kebijakan Lembaga Penegak Hukum menanggapi risiko pencucian uang yang diidentifikasi dalam NRA. Petugas penghubung internasional ditempatkan di luar negeri ke negara-negara yang memiliki risiko tinggi untuk meningkatkan kemampuan Inggris dalam memperoleh dan memfasilitasi kerja sama internasional. Lembaga Penegak Hukum telah mengoordinasikan proyek untuk meningkatkan intelijen dan pemahaman di area berisiko tinggi, termasuk pencucian uang tingkat tinggi, pencucian uang berbasis tunai, pencucian uang melalui fasilitator profesional, dan kejahatan terorganisir. Inggris mengumpulkan berbagai informasi kualitatif dan kuantitatif yang menjadi masukan untuk pemahaman risikonya dan digunakan dalam pengembangan kebijakan. Hal ini dapat dilengkapi dengan statistik nasional yang konsisten dan komprehensif tentang semua investigasi, penuntutan, dan hukuman pencucian uang; konsultasi; dan kerja sama internasional.

Lembaga Penegak Hukum juga menunjukkan kemajuan dalam mengembangkan kebijakan untuk mengatasi risiko yang muncul, seperti uang tunai dalam pengiriman barang.

Meningkatkan Sumber Daya, Anggaran, dan Melakukan Peningkatan Kapasitas

NRA dapat menyoroti kesenjangan dalam sumber daya, kapasitas, dan keahlian di semua tingkatan sistem APU suatu negara dan memberikan informasi penting untuk pengambilan keputusan tentang prioritas dan alokasi ulang sumber daya.

Berdasarkan temuan NRA, para pembuat kebijakan dan badan regulator dapat mengalokasikan sumber daya secara lebih efektif untuk mengatasi kesenjangan yang teridentifikasi dan meningkatkan kemampuan APU negara tersebut. Anggaran dan sumber daya dapat dialokasikan kembali ke area berisiko tinggi, misalnya, meningkatkan pendanaan untuk lembaga penegak hukum tertentu dan meningkatkan investigasi sesuai dengan tindak pidana asal berisiko tertinggi, atau untuk otoritas pengawas dalam rangka meningkatkan kapasitas mereka dalam melakukan inspeksi lapangan di sektor-sektor tertentu. Pendekatan berbasis risiko melibatkan pengalihan sumber daya dari area yang diidentifikasi dalam NRA sebagai berisiko rendah, dan menuju area berisiko tinggi, dan dapat

membantu negara-negara dengan proses NRA yang kurang matang untuk mengelola sumber daya mereka secara lebih efektif. NRA juga dapat mendorong perekrutan personel khusus, seperti penyelidik keuangan, analis intelijen, dan ahli hukum, untuk memperkuat kapasitas negara dalam mendeteksi, menyelidiki, dan menuntut kejahatan keuangan secara efektif.

Meningkatkan jumlah staf di area berisiko tinggi dapat menjadi langkah awal yang baik, tetapi yang lebih penting, negara-negara harus memastikan bahwa semua staf yang beroperasi dalam sistem APU memiliki kapasitas dan pengetahuan untuk melakukan pekerjaan mereka secara efektif. Dengan mengidentifikasi area di mana pelatihan masih kurang atau sudah ketinggalan zaman, NRA dapat memberikan informasi untuk pengembangan program pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam upaya APU. Program pelatihan ini dapat meliputi berbagai topik, termasuk metodologi Penilaian Risiko, teknik investigasi keuangan, persyaratan kepatuhan peraturan, dan tren yang muncul dalam kejahatan keuangan. Melalui investasi dalam peningkatan kapasitas dan pelatihan, suatu negara dapat meningkatkan kompetensi dan profesionalisme personel APU mereka, sehingga meningkatkan efektivitas upaya mereka untuk memerangi kejahatan keuangan.

NRA juga dapat menunjukkan area yang seharusnya lebih efisien. Otomatisasi atau digitalisasi proses manual tertentu dan pengenalan atau adaptasi alat TI dapat menghemat waktu dan sumber daya baik di tingkat nasional maupun organisasi, sehingga memungkinkan para ahli untuk meletakkan fokus mereka pada substansi pekerjaannya.

Kotak 23. Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas

Brasil

Brasil telah mengembangkan tindakan dan kebijakan untuk mengatasi ancaman korupsi dan Pencucian uang terkait melalui berbagai inisiatif. Salah satu inisiatif tersebut adalah pembentukan Program Pelatihan Nasional untuk Memerangi Korupsi dan Pencucian uang (PNLD), yang menyediakan pelatihan bagi pejabat pemerintah dan memungkinkan mereka untuk berbagi pengetahuan tentang upaya mereka dalam masalah ini. Selain itu, Brasil mendirikan Jaringan Nasional Laboratorium Teknologi Anti-Pencucian Uang, yang menyediakan jaringan untuk berbagi keahlian dan pengalaman dalam mendeteksi TPPU, korupsi, dan kejahatan lain yang terkait dengan analisis data skala besar. Langkah-langkah ini, jika digabungkan, telah meningkatkan keterampilan staf Brasil dalam memerangi korupsi dan pencucian uang hasil korupsi.

Tindakan Pengawasan Berbasis Risiko

Standar FATF mensyaratkan pengawasan harus proporsional dengan risiko yang timbul dari berbagai Lembaga Keuangan, Penyedia Layanan Aset Virtual, dan Bisnis dan Profesi Non-Keuangan yang Ditunjuk. Temuan yang dihasilkan dari NRA memainkan peran mendasar dalam membentuk tindakan pengawasan yang diprioritaskan, seperti alokasi sumber daya untuk mengawasi sektor berdasarkan risiko. FATF mengeluarkan pedoman tentang pengawasan berbasis risiko pada tahun 2021¹¹, yang menguraikan bagaimana pengawas dapat memprioritaskan aktivitas mereka sesuai dengan risiko.

Pemahaman risiko merupakan proses dua arah - NRA bergantung pada pemahaman pengawas tentang risiko sektoral, dan pengawas mengembangkan pemahaman yang diperbarui tentang ancaman terhadap sektor mereka dari tindak pidana asal, tipologi, dan ancaman TPPU/TPPT melalui

¹¹ www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/Guidance-rba-supervision.html

keterlibatan dalam proses NRA. Pengawas harus mempertimbangkan apakah kesimpulan NRA berdasarkan sektor konsisten dengan pemahaman mereka tentang peringkat risiko tingkat entitas agregat yang telah mereka kembangkan. Analisis ini seharusnya memengaruhi tindakan pengawas di bidang-bidang seperti jenis dan intensitas kontrol perizinan, frekuensi dan intensitas pengawasan di lapangan dan di luar lapangan, pedoman yang diberikan kepada sektor-sektor yang tercakup, dan strategi mitigasi risiko lainnya.

Kotak 24. Pengawasan Berbasis Risiko Bermuda

Otoritas Keuangan Bermuda telah menerapkan kerangka kerja pengawasan TPPU/TPPT berbasis risiko untuk menilai kepatuhan lembaga keuangan dan Layanan Korporasi atau Kepercayaan di bawah pengawasannya dan untuk mengurangi risiko sektoral. Kerangka kerja ini menilai dampak dan probabilitas risiko sehubungan dengan semua aspek operasi dan pengendalian lembaga keuangan secara berkelanjutan untuk memfasilitasi respons pengawasan yang tepat waktu terhadap kelemahan atau kemungkinan kegagalan yang teridentifikasi. Sektor yang dianggap berisiko tinggi (bank/simpan pinjam, sektor sekuritas, wali amanat swasta, dan penyedia layanan korporasi) diprioritaskan untuk pengawasan oleh Otoritas Keuangan Bermuda dan semua entitas yang diawasi tunduk pada pemeriksaan di lapangan dan pemantauan di luar lapangan. Pemeriksaan di lapangan diputuskan pada awal tahun dan kalender inspeksi dapat direvisi selama tahun tersebut berdasarkan perubahan profil risiko lembaga, termasuk faktor dan hasil Penilaian Risiko "peringat kembali".

NRA memberikan peluang baik bagi respons regulasi yang terkoordinasi, khususnya untuk sektor berisiko tinggi. Misalnya, di negara di mana sektor real estat menimbulkan risiko TPPU yang lebih tinggi, pengawas agen real estat, pengacara, lembaga keuangan yang menyediakan pinjaman perumahan dan layanan hipotek, dan Layanan Korporasi atau Kepercayaan (TCSP) dapat mengkoordinasikan respons regulasi mereka untuk mengatasi peningkatan risiko tersebut. Pengawas harus mengumpulkan data tentang indikator kinerja utama untuk menunjukkan dampak pengawasan mereka.

Investigasi, Penuntutan, dan Pemulihan Aset

NRA harus memberikan dampak pada pembentukan Pendekatan Berbasis Risiko bagi investigasi dan penuntutan Pencucian uang dan pemulihan aset terkait. Seperti yang disebutkan di seluruh laporan, Badan Penegak Hukum harus secara aktif berkontribusi pada proses NRA dengan menyediakan data dan wawasan kualitatif serta bertanggung jawab atas temuannya. Langkah-langkah yang diperkenalkan harus memungkinkan Badan Penegak Hukum untuk fokus pada penyelidikan, penuntutan, dan pemulihan aset sesuai dengan risiko yang diidentifikasi. Mendorong Badan Penegak Hukum untuk memfokuskan sumber daya mereka pada tindak pidana asal atau jenis TPPU berisiko tertinggi yang terjadi di negara tersebut dapat mengarah pada keberhasilan penyelesaian kasus TPPU yang lebih berdampak.

Lembaga penegak hukum juga dapat memperoleh informasi yang berguna dari tipologi dan metode yang diuraikan dalam NRA dan dapat menyesuaikan teknik dan strategi intelijen dan investigasi mereka untuk menargetkan faktor risiko utama guna memberikan hasil yang lebih efektif. Hal ini dapat mencakup pembentukan gugus tugas atau departemen khusus untuk menangani kejahatan tertentu. Badan Penegak Hukum juga dapat mengembangkan laporan tentang tipologi atau tema untuk menyempurnakan pemahaman mereka sendiri tentang risiko.

NRA juga memperkuat kolaborasi dan berbagi informasi antara Badan Penegak Hukum, Unit Intelijen Keuangan, dan lembaga pengatur, di antara pemangku kepentingan lainnya. Hal ini dapat mendorong dimulainya investigasi bersama dan memaksimalkan dampak tindakan pengawasan.

Kotak 25. Langkah-langkah untuk Meningkatkan Investigasi dan Penuntutan Sesuai dengan Risiko.

Belanda

Belanda secara proaktif memulai investigasi TPPU melalui petunjuk intelijen kepolisian yang terdeteksi selama investigasi tindak pidana asal, serta melalui intelijen keuangan yang dikembangkan oleh Unit Intelijen Keuangan Belanda. Selain itu, pihak berwenang mengadopsi pendekatan inovatif dengan meluncurkan proyek APU tematik berdasarkan risiko TPPU pada NRA untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mendeteksi skema dan tipologi TPPU baru, yang menghasilkan identifikasi kasus tambahan. Otoritas Belanda melakukan berbagai investigasi, mulai dari pencucian uang sendiri hingga kasus-kasus kompleks, termasuk perusahaan lepas pantai, pencuci uang profesional, dan Aset Virtual. Berdasarkan temuan NRA, mereka juga telah mengalokasikan sumber daya untuk memberantas kelompok kejahatan terorganisir yang sesuai dengan risiko yang diidentifikasi.

Respons terhadap Area Dengan Risiko Rendah dan Promosi Inklusi Keuangan

Dalam kerangka upaya APU, melakukan identifikasi dan kategorisasi area risiko rendah sangat penting untuk mengalokasikan sumber daya secara efisien dan mengarahkan perhatian ke sektor-sektor dengan risiko inheren yang lebih tinggi. Standar FATF mengizinkan negara-negara untuk mengambil langkah-langkah uji tuntas yang disederhanakan (SDD) untuk mengelola dan mengurangi risiko, di mana area risiko rendah telah terbukti dan tidak ada kecurigaan aktivitas TPPU/TPPT. Hasil NRA memberikan kemampuan bagi negara-negara untuk menerapkan langkah-langkah SDD ini. Negara-negara harus memastikan bahwa kerentanan diidentifikasi dan dikelola secara memadai, sehingga menjaga integritas kerangka kerja APU secara keseluruhan. Area risiko rendah harus dipantau dengan cermat untuk setiap perubahan keadaan yang dapat meningkatkan tingkat risiko. Pada praktiknya, area risiko rendah ditentukan oleh peringkat rendah yang terbukti dalam hal ancaman, kerentanan, dan dampak (jika negara tersebut menilai demikian).

Pendekatan yang efektif terhadap SDD membutuhkan negara, lembaga keuangan, Bisnis dan Profesi Non-Keuangan yang Ditunjuk, dan Penyedia Layanan Aset Virtual untuk mengembangkan pemahaman komprehensif tentang faktor-faktor kontekstual yang memengaruhi risiko TPPU/TPPT di negara tersebut. Hal ini dapat disediakan oleh NRA. Penilaian Risiko tingkat negara ini harus mengidentifikasi risiko yang lebih tinggi dan lebih rendah serta memungkinkan dilakukannya identifikasi oleh lembaga-lembaga terhadap situasi berisiko rendah di mana langkah-langkah yang disederhanakan dapat diterapkan. Kriteria untuk menetapkan suatu wilayah sebagai berisiko rendah mencakup beberapa faktor utama. Kerangka peraturan harus kuat dan transparan, termasuk peraturan APU yang jelas dan komprehensif. Selain itu, harus ada pengawasan dan penegakan hukum yang efektif oleh otoritas yang berwenang, dengan inspeksi, audit, dan penilaian rutin yang memastikan kepatuhan terhadap peraturan APU dan mengidentifikasi potensi kelemahan atau celah dalam kontrol yang ada. Data historis juga dapat menunjukkan tingkat minimal aktivitas keuangan ilegal dengan analisis statistik dan tren yang komprehensif dari Laporan Transaksi Mencurigakan pada tahun-tahun sebelumnya dan data relevan lainnya yang memberikan wawasan berharga tentang prevalensi dan sifat aktivitas Pencucian uang di wilayah tertentu.

Penilaian dan identifikasi area berisiko rendah harus didokumentasikan dan diperbarui secara berkala, dengan tujuan agar pengawas dapat mengidentifikasi penentuan risiko yang tepat dan situasi di mana penggunaan langkah-langkah yang disederhanakan oleh lembaga keuangan mungkin sesuai untuk diterapkan.

Meningkatkan rincian dan tingkat detail Penilaian Risiko dapat menjadi jalan untuk meningkatkan pemahaman risiko, sehingga mengedepankan promosi inklusi keuangan. Seringkali, entitas yang berbeda dalam sektor yang sama terpapar pada tingkat risiko yang berbeda, atau jenis risiko yang berbeda, karena aktivitas mereka yang berbeda atau kelompok pelanggan yang berbeda. Penilaian Risiko yang menggabungkan entitas dan kelompok pelanggan yang berbeda tersebut dapat menilai risiko secara tidak tepat dan mengakibatkan tingkat langkah-langkah mitigasi risiko yang tidak tepat diterapkan oleh regulator dan entitas yang diatur. Memisahkan entitas dan kelompok pelanggan tersebut dan menetapkan bagaimana profil risiko setiap kelompok berakar pada aktivitas dan basis pelanggan mereka, dapat memungkinkan pendekatan yang lebih rinci terhadap manajemen risiko oleh lembaga keuangan dan otoritas yang berwenang. Sebagai contoh, hal ini dapat mencakup penerapan kontrol yang berbeda untuk entitas dan kelompok pelanggan dengan risiko tertinggi atau terendah dalam sektor tertentu, dibandingkan dengan satu tingkat kontrol untuk seluruh sektor; atau dapat memungkinkan satu jenis tindakan mitigasi risiko digantikan oleh tindakan lain yang tidak terlalu menghambat.

Negara-negara harus berhati-hati dan membedakan antara ketiadaan faktor-faktor yang memperburuk risiko yang telah terbukti, dan kurangnya statistik yang relevan, yang dapat menyebabkan kesalahpahaman tentang risiko rendah. Standar FATF mengizinkan pengecualian dari rekomendasi tertentu untuk diterapkan pada area dengan risiko lebih rendah yang telah terbukti dalam keadaan tertentu. Oleh karena itu, negara-negara harus memahami konsekuensi dari kesimpulan bahwa suatu area memiliki risiko lebih rendah, karena hal itu dapat memiliki implikasi substansial terhadap efektivitas perlindungan APU di area tertentu tersebut.

Kotak 26. Tantangan dan Solusi dalam Mengidentifikasi Area Berisiko Rendah

Selandia Baru

Selandia Baru telah menghadapi tantangan dalam mendefinisikan dan mengelola area berisiko rendah, khususnya di mana aktivitas TPPU jarang terjadi. Menetapkan tidak adanya risiko dapat menjadi tantangan, karena kurangnya bukti tidak selalu berarti bahwa area tersebut memiliki risiko rendah. Untuk mengatasi tantangan ini, Selandia Baru menekankan penggunaan metodologi Penilaian Risiko yang kuat untuk mengidentifikasi dan mengelola area berisiko rendah dengan lebih percaya diri. Pedoman yang jelas sangat penting dalam hal ini, dengan menekankan metodologi komprehensif yang membedakan antara risiko "nyata," "mungkin," dan "teoretis". Selandia Baru menyoroti pentingnya menguraikan risiko dalam wacana nasional untuk memastikan pendekatan yang cermat.

Selandia Baru menyadari risiko bias konfirmasi dan menganjurkan pandangan yang lebih luas dalam fase identifikasi, dengan mengambil dari berbagai sumber seperti data kasus, transkrip intersepsi, dan wawancara dengan pelaku kriminal. Dengan memanfaatkan intelijen dari berbagai sumber, termasuk luar negeri, maka hal ini meningkatkan pemahaman Selandia Baru tentang ancaman yang tidak diketahui.

Kepatuhan terhadap praktik terbaik, seperti ISO 31000, memperkuat metodologi Penilaian Risiko Selandia Baru. Dengan mengintegrasikan wawasan dari sumber domestik dan internasional, Selandia Baru memastikan pendekatan komprehensif untuk mengelola risiko Pencucian uang, bahkan di area yang dianggap berisiko rendah karena keterbatasan data domestik.

Pengecualian terbatas di area dengan risiko rendah yang sudah terbukti merupakan pilihan bagi negara-negara dan tidak boleh diabaikan. Pengecualian yang terukur dan beralasan di area berisiko rendah dapat memungkinkan alokasi ulang sumber daya yang lebih strategis dan meningkatkan efektivitas keseluruhan sistem APU serta meningkatkan inklusi keuangan.

Kotak 27. Inklusi Keuangan

India

India telah melakukan beberapa langkah untuk mempromosikan inklusi keuangan dengan tujuan untuk menjaga integritas keuangan, dengan merancang produk inklusi keuangan yang memiliki langkah-langkah mitigasi risiko yang terintegrasi. Penilaian Risiko sektoral menyimpulkan bahwa kerentanan keseluruhan produk keuangan ini rendah sejauh berkaitan dengan TPPU/TPPT, oleh karena itu India telah menerapkan langkah-langkah yang disederhanakan untuk memungkinkan akses yang lebih luas ke sistem keuangan formal.

Untuk membantu memastikan bahwa masyarakat berpenghasilan rendah di India memiliki akses ke layanan perbankan, Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang mengizinkan Uji Tuntas Sederhana yang disederhanakan dalam pembukaan "rekening kecil" sebagaimana didefinisikan dalam aturannya, serta rekening lain untuk kategori klien yang berisiko rendah. Aturan tersebut tidak mengizinkan tindakan yang disederhanakan jika ada kecurigaan TPPU/TPPT, jika skenario risiko tinggi tertentu berlaku, atau jika risiko yang diidentifikasi tidak konsisten dengan Penilaian Risiko nasional.

Transaksi signifikan dalam ekonomi informal di India terjadi secara tunai. Berdasarkan penilaian India terhadap risiko yang terkait dengan uang tunai, India memperkenalkan kebijakan (dikenal sebagai Jan Dhan, Aadhaar, dan Mobile) untuk mendorong penggunaan sistem keuangan formal. Kebijakan ini memperluas akses yang terjangkau ke rekening bank dan layanan keuangan lainnya, menggunakan sistem identifikasi biometrik dan mendukung pengembangan sistem pembayaran seluler digital.

India telah memprioritaskan pengembangan infrastruktur pembayaran digital, yang menyebabkan peningkatan pesat volume transaksi digital dari 20,7 miliar transaksi pada tahun 2017-18 menjadi 134,6 miliar pada tahun 2022-23.

Sebagai hasil dari langkah-langkah ini, akses ke layanan keuangan telah meningkat dari 35% dari total populasi pada tahun 2011 menjadi 80% pada tahun 2017.

Filipina

Dalam NRA kedua Filipina, produk inklusi keuangan dinilai berisiko lebih rendah, karena dana yang terlibat jumlahnya kecil dan ambang batas produk rendah, dan juga karena fungsionalitas produk yang terbatas dan pasar sasaran yang kecil (penduduk lokal yang kurang terlayani). Filipina terutama menggunakan data dari lembaga keuangan yang diawasi oleh Bangko Sentral ng Pilipinas untuk mengembangkan analisis risiko, yang dikumpulkan secara sistematis dan berkelanjutan untuk memastikan pemahaman risiko yang terkini, termasuk untuk memberi informasi kepada NRA ketiga Filipina yang sedang dalam proses.

Hasil dari NRA kedua mendukung strategi inklusi keuangan Bank Sentral Filipina yang kuat saat ini. Tingkat formalisasi ekonomi telah meningkat dari menengah-rendah menjadi menengah sejak NRA kedua, karena inisiatif inklusi keuangan pemerintah yang menargetkan kebutuhan penduduk yang tidak memiliki rekening bank dan kurang terlayani.

Untuk informasi lebih lanjut tentang langkah-langkah Uji Tuntas Sederhana dan langkah-langkah lain untuk mendukung inklusi keuangan, silakan merujuk pada Pedoman FATF terpisah tentang Langkah-Langkah Anti-Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme dan Inklusi Keuangan¹².

Sosialisasi dan Keterlibatan Pemangku Kepentingan

Negara-negara harus secara proaktif mengkomunikasikan temuan NRA mereka, termasuk setiap pembaruannya, selama periode antara publikasi resmi NRA. Bab ini mengusulkan pendekatan strategis untuk meningkatkan komunikasi dan mengatasi tantangan yang terkait dengan proses ini, yang dapat dirangkum sebagai berikut dengan mempertimbangkan pengalaman dari Jaringan Global:

- **Berkelanjutan** – Negara-negara harus mengadopsi pendekatan berkelanjutan terhadap rencana komunikasi dan sosialisasi temuan NRA kepada para pemangku kepentingan, sehingga kebutuhan dan harapan target dipertimbangkan sepanjang proses NRA. Komunikasi berkelanjutan tentang temuan NRA meningkatkan kesadaran dan pemahaman risiko para pemangku kepentingan. Hal ini mengembangkan rasa akuntabilitas di antara para pemangku kepentingan untuk melaksanakan langkah-langkah mitigasi risiko. Negara-negara juga dapat menggunakan komunikasi temuan NRA untuk mempromosikan pertukaran informasi di antara para pemangku kepentingan, termasuk lokakarya dan forum untuk pertukaran praktik terbaik dan tantangan yang dihadapi. Komunikasi berkelanjutan juga membantu pemerintah memperoleh informasi terkini tentang risiko dan tantangan yang muncul yang dapat mendukung pembuatan kebijakan dan memungkinkan mereka untuk lebih proaktif. Publikasi lain, seperti tipologi dan indikator tanda bahaya juga harus digunakan dalam komunikasi pembaruan risiko dan risiko yang muncul/baru yang lebih gesit.
- **Terdiferensiasi** – Perbedaan dapat dibuat antara komunikasi publik dan non-publik. Hal ini dapat melibatkan penggunaan platform media yang berbeda seperti jejaring sosial, publikasi komersial, presentasi, dll., yang ditujukan kepada pemangku kepentingan yang berbeda. Beberapa negara menerbitkan berbagai versi NRA, seperti versi terbatas untuk konsumsi lembaga pemerintah, versi publik, dan bahkan versi khusus sektor - ini telah tercermin oleh sektor swasta sebagai praktik yang baik untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang temuan NRA, sekaligus mencegah kebocoran informasi sensitif. Upaya penyebaran informasi untuk memastikan pemahaman risiko juga harus dibedakan agar dapat berfokus pada detail yang relevan bagi setiap pemangku kepentingan/sektor.
- **Transparan** – Negara-negara dapat membagikan NRA untuk publik sebagai bentuk transparansi dalam rangka mendukung pengambilan keputusan, partisipasi publik, keterlibatan pemangku kepentingan, dan umpan balik sektor swasta/masyarakat sipil. Membagikan temuan NRA saja tidak cukup karena tidak ada konteks yang memadai yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan dalam mengembangkan pemahaman risiko. Dalam hal ini, pertukaran beberapa wawasan dari metodologi dapat membantu pengawas dan sektor swasta untuk lebih memahami risiko dan untuk melakukan Penilaian Risiko mereka sendiri. Mungkin ada beberapa aspek dari NRA yang tidak ingin dipublikasikan oleh suatu negara, misalnya, sumber intelijen rahasia, masalah keamanan nasional, dan potensi dampak ekonomi dari risiko yang terwujud. Negara-negara disarankan untuk menyebarluaskan informasi yang dibatasi melalui platform yang aman seperti GoAML atau oleh pengawas kepada sektor masing-masing. Misalnya, Kepulauan Virgin Britania Raya menghasilkan versi NRA yang telah disunting dengan menghapus informasi penegakan hukum yang sensitif, yang dipublikasikan bagi masyarakat umum, sedangkan versi lengkapnya tersedia untuk otoritas kompeten terkait.

¹² Revised Guidance on AML/CFT and Financial Inclusion (fatf-gafi.org)

- **Berbasis Risiko** – Negara-negara dapat mempertimbangkan pendekatan bertahap untuk dilakukan sosialisasi, dengan menargetkan pemangku kepentingan berisiko tinggi terlebih dahulu sesuai dengan pendekatan berbasis risiko. Komunikasi dan sosialisasi ini dapat dilakukan lebih rinci dan disesuaikan, serta dilaksanakan secara langsung, dengan lebih banyak diskusi, konsultasi, dan kegiatan tindak lanjut dengan sektor berisiko tinggi untuk memastikan mereka memiliki pemahaman risiko yang komprehensif. Pihak Pengawas yang mengawasi banyak entitas juga harus mengambil pendekatan berbasis risiko untuk dilakukan komunikasi. Untuk meningkatkan pemahaman tentang temuan NRA, negara-negara mengandalkan berbagai tindakan:
 - o **Keterlibatan dalam Proses** - sangat penting untuk melibatkan pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta, dalam tahap diskusi, perencanaan, dan penyusunan draf awal proses dan memastikan sosialisasi yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan mereka.
 - o **Publikasi NRA** – seperti yang disebutkan di atas, negara-negara sering kali menerbitkan NRA dalam versi publik, dan versi yang diadaptasi untuk entitas pelapor yang lebih ditargetkan pada kebutuhan mereka. Beberapa metode telah disarankan untuk mempublikasikan dokumen tersebut, misalnya, penggunaan media sosial, pengembangan video informasi, distribusi di situs web otoritas yang berwenang, penyebaran melalui milis kepada pemangku kepentingan seperti yang dilakukan untuk publikasi penting lainnya. Selain itu, negara-negara dapat mempertimbangkan untuk menerjemahkan NRA demi meningkatkan pemahaman di negara-negara yang memiliki lebih dari satu bahasa resmi dan untuk membuatnya lebih mudah diakses oleh negara lain. Pembaruan dan penyempurnaan indikator peringatan dini berdasarkan NRA juga dapat sangat bermanfaat bagi entitas pelapor.
 - o **Pelatihan/Lokakarya yang Ditargetkan** – Praktik baik yang disorot oleh beberapa negara adalah menyelenggarakan lokakarya, presentasi, atau webinar khusus sektor untuk menargetkan konten secara tepat bagi setiap sektor. Hal ini juga dapat menghasilkan umpan balik yang lebih konstruktif melalui sesi tanya jawab. Beberapa negara juga menyediakan paket pelatihan daring untuk memudahkan akses pemangku kepentingan terhadap informasi yang relevan. Meskipun opsi seperti webinar dapat menjangkau audiens yang lebih luas, banyak negara menyadari bahwa ada kekuatan pada pertemuan tatap muka. Keseimbangan antara tujuan, sumber daya, dan hasil yang diinginkan harus dicapai ketika mempertimbangkan metode sosialisasi yang optimal.
 - o **Menghubungkan NRA dengan Aktivitas Pengawasan** – beberapa negara menyarankan untuk menyertakan NRA ke dalam inspeksi di lapangan guna mendorong pemahaman risiko terkini di antara entitas pelapor, dan untuk memastikan temuan NRA telah disertakan ke dalam Penilaian Risiko tingkat industri. Lembaga utama NRA juga dapat mengadakan pertemuan rutin dengan entitas pelapor untuk meningkatkan kesadaran akan temuan NRA dan menerima umpan balik. Penting untuk menekankan implikasi praktis dari temuan NRA tentang pendekatan berbasis risiko yang harus diterapkan oleh pengawas dalam melakukan kegiatan pengawasan mereka dan yang harus diterapkan oleh sektor swasta dalam menjalankan bisnis sehari-hari mereka.

Berdasarkan umpan balik yang diterima selama fase sosialisasi NRA, beberapa negara memperkenalkan inisiatif lebih lanjut untuk mendukung pemahaman risiko di kalangan sektor swasta. Beberapa contoh metode yang dibagikan oleh berbagai negara untuk melibatkan pemangku kepentingan terkait temuan NRA dan risiko secara umum tercantum di bawah ini.

Kotak 28. Keterlibatan Pemangku Kepentingan tentang Risiko Kanada

Pemerintah Kanada, melalui Departemen Keuangan, menerbitkan laporan publik tentang risiko Pencucian uang dan pendanaan terorisme yang bersifat inheren. Laporan ini memberikan informasi risiko penting kepada publik dan, khususnya, kepada entitas yang diatur di seluruh negeri yang memiliki kewajiban pelaporan berdasarkan Undang-Undang Hasil Kejahatan (Pencucian Uang) dan Pendanaan Terorisme, yang pemahamannya tentang risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme yang melekat dan mendasar sangat penting dalam menerapkan langkah-langkah pencegahan dan pengendalian yang diperlukan untuk secara efektif mengurangi risiko ini. Laporan ini secara khusus mengkaji risiko-risiko ini dalam kaitannya dengan sektor ekonomi utama dan produk keuangan di Kanada, serta menilai sejauh mana fitur-fitur tersebut membuat Kanada rentan dieksploitasi oleh pelaku ancaman untuk mencuci uang dan membiayai terorisme. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran tentang konteks risiko Kanada dan sifat intrinsik yang mengekspos sektor dan produk ini terhadap risiko pencucian uang dan pembiayaan terorisme di Kanada. Sebagian besar bisnis, profesi, dan sektor yang dinilai dalam laporan ini mematuhi hukum Kanada dan berkontribusi pada kemakmuran sosial dan ekonomi negara; hanya sebagian kecil pelaku yang terlibat dalam kegiatan ilegal seperti pencucian uang. Pada bulan Maret 2023, versi terbaru laporan tersebut diterbitkan di www.canada.ca/en/department-finance/programs/financial-sector-policy/updated-assessment-inherent-risks-moneylaundering-terrorist-financing-canada.html.

FINTRAC, Unit Intelijen Keuangan Kanada, telah memimpin upaya media sosial untuk mengkomunikasikan Penilaian Risiko nasional di X (sebelumnya Twitter) dan LinkedIn. Departemen Keuangan Kanada telah aktif mempresentasikan laporan tersebut kepada organisasi sektor swasta yang tertarik, memanfaatkan koneksi yang telah terjalin melalui Komite Penasihat Pencucian uang dan Pendanaan Terorisme, kelompok Penasihat Nirlaba Badan Pendapatan Kanada, dan Aliansi Pemberantasan Keuangan Ilegal British Columbia (CIFA-BC). Departemen Keuangan sedang berupaya mengkomunikasikan temuan laporan tahun 2023 kepada anggota sektor swasta melalui sesi yang disesuaikan untuk setiap sektor. Laporan NIRA disertakan dalam berbagai keterlibatan pemangku kepentingan lainnya, seperti halnya dokumen lain yang menyajikan penilaian risiko.

Republik Demokratik Kongo

Republik Demokratik Kongo melakukan kampanye besar-besaran untuk menyebarluaskan temuan NRA 2023 kepada para pemangku kepentingan di seluruh wilayah geografisnya yang luas dan 26 provinsi administratif. Temuan tersebut dibagikan kepada semua otoritas yang berwenang dalam beberapa bulan setelah finalisasi dan persetujuan NRA oleh Dewan Menteri melalui surat resmi. Negara ini juga menyelenggarakan 28 sesi peningkatan kesadaran bagi otoritas yang berwenang, lembaga keuangan, dan Bisnis dan Profesi Non-Keuangan yang Ditunjuk di seluruh negeri untuk memastikan pemahaman di antara semua pemangku kepentingan.

Umpan Balik dan Peningkatan Proses NRA

Proses NRA Pencucian Uang itu sendiri dapat dipengaruhi dan ditingkatkan berdasarkan temuan dan pelajaran yang dipetik dari setiap pengulangan penilaian. Negara-negara disarankan untuk meninjau proses NRA mereka secara teratur dan melakukan perubahan untuk meningkatkan efektivitasnya.

Negara-negara dapat melakukan perubahan pada aspek-aspek tertentu dari tata kelola proses tersebut, misalnya dengan menyempurnakan metodologi dan mekanisme agar lebih sesuai dengan situasi negara tersebut. Karena banyak negara mengalami masalah dalam memperoleh kumpulan data yang akurat dan lengkap selama NRA pertama mereka, beberapa negara memutuskan untuk berinvestasi dalam pengumpulan data dan alat analisis atau memperkenalkan formulir standar. Mereka juga dapat memperkenalkan mekanisme pertukaran informasi baru dan bertujuan untuk mengubah budaya pengumpulan dan pertukaran data di antara lembaga-lembaga. Negara-negara harus menilai berbagai tahapan lini masa NRA dan bertujuan untuk menyederhanakan proses jika memungkinkan, termasuk menghilangkan pengulangan, menemukan efisiensi dalam keterlibatan pemangku kepentingan, dan meningkatkan alur kerja.

Salah satu faktor yang perlu dianalisis adalah apakah langkah-langkah mitigasi risiko yang diperkenalkan setelah NRA sebelumnya memberikan efek yang diinginkan. Dengan niat terbaik sekalipun, beberapa langkah mitigasi risiko dapat menyebabkan dampak yang tidak diinginkan. Hal ini dapat terkait dengan berbagai topik, misalnya langkah-langkah yang terlalu ketat dapat menyebabkan dampak buruk pada inklusi keuangan dan melarang komunitas yang terpinggirkan untuk mengakses layanan keuangan. Negara-negara harus menyadari kemungkinan bahwa peningkatan regulasi dapat mengakibatkan beberapa bisnis menggunakan pendekatan "*tick-box*" untuk memenuhi persyaratan regulasi dibandingkan menggunakan pendekatan berbasis risiko (RBA). Hal ini dapat menyebabkan upaya manajemen risiko yang tidak memadai dan langkah-langkah harus diambil untuk menghindari hal ini. Menerapkan langkah-langkah mitigasi risiko di satu area dapat menggeser risiko ke sektor atau jenis transaksi lain, misalnya, peningkatan uji tuntas di lembaga keuangan tradisional dapat menyebabkan penjahat mengeksploitasi sektor dengan regulasi yang tidak terlalu ketat seperti aset virtual. Hal ini menyoroti pentingnya memandang NRA sebagai sebuah proses – negara-negara harus terus-menerus mengevaluasi tindakan yang mereka ambil dan mampu menyesuaikannya bila diperlukan.

Banyak negara yang menanggapi kuesioner secara aktif meminta umpan balik dari para pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta, tentang cara-cara yang dapat mereka gunakan untuk memperbaiki proses mereka. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik formal maupun informal, misalnya melalui survei, kuesioner yang ditargetkan, diskusi meja bundar, atau kelompok fokus. Konsultasi publik untuk pelaksanaan proyek ini menunjukkan bahwa menurut sektor swasta, diskusi meja bundar dan survei adalah salah satu cara paling efektif bagi mereka untuk memberikan umpan balik mengenai proses tersebut. Banyak pihak menyarankan penggunaan alat daring untuk memfasilitasi hal ini, termasuk korespondensi email, situs *web* khusus, dan aplikasi *web*. Mereka juga mendorong negara-negara untuk memanfaatkan keahlian sektor swasta melalui panel ahli, dewan penasihat, atau kemitraan publik-swasta untuk memberikan rekomendasi. Tema kuat lainnya yang diberikan melalui tanggapan adalah bahwa akan lebih efisien jika sektor swasta terlibat dalam proses NRA secara menyeluruh dan memberikan umpan balik berkelanjutan sehingga draf dapat disesuaikan sebelum produk selesai.

Sosialisasi kepada para pemangku kepentingan tentang temuan NRA juga dapat bermanfaat untuk mengumpulkan umpan balik mengenai bagaimana proses NRA dapat lebih bermanfaat bagi mereka dan bagaimana temuan dan informasi lain tentang risiko dapat dikomunikasikan dengan lebih baik. Sangat disarankan agar negara-negara berkonsultasi dengan semua pemangku kepentingan untuk terus mengembangkan dan meningkatkan proses mereka agar lebih efektif. Beberapa contoh informasi yang telah diminta dari sektor swasta untuk membantu mengembangkan pemahaman risiko mereka adalah:

- i. Indikator risiko pada tindak pidana asal yang umum.
- ii. Statistik terkait tindak pidana asal dan TPPU.
- iii. Studi kasus yang menunjukkan risiko yang telah diidentifikasi.
- iv. Pedoman tentang cara menerapkan temuan NRA.

Negara-negara juga dapat memperkenalkan indikator kinerja utama (KPI) untuk menunjukkan dampak dari NRA. Menurut tanggapan yang diterima dari kuesioner, sebagian besar negara tidak memiliki pendekatan yang mapan untuk mengumpulkan dan menganalisis KPI. Beberapa negara telah memperkenalkan teknologi analitik ke situs web dimana NRA dipublikasikan yang menilai frekuensi seberapa banyak NRA diakses dan dikutip. Negara-negara juga dapat mempertimbangkan untuk melihat poin data objektif lainnya untuk melihat dampak apa yang telah ditimbulkan NRA pada berbagai aspek sistem APU, misalnya:

- **Langkah-langkah mitigasi risiko yang diterapkan** – negara-negara harus memantau pelaksanaan rencana aksi yang dihasilkan dari NRA dan melaporkan kembali kemajuan dan tantangan apa pun yang dihadapi. Negara-negara dapat melacak berapa banyak tindakan yang telah berhasil diluncurkan atau diselesaikan, apakah tindakan tersebut berlangsung sesuai dengan jangka waktu yang diharapkan, dll. Hal ini dapat membantu suatu negara menghasilkan rencana aksi yang lebih akurat dan layak untuk pengulangan proses NRA di masa mendatang.
- **Peningkatan Kolaborasi** – NRA harus meningkatkan kerja sama di tingkat nasional dan internasional. Negara-negara dapat mengevaluasi kinerja di berbagai bidang seperti pembentukan saluran komunikasi dan koordinasi di tingkat domestik dan internasional, tingkat partisipasi, dan produk kerja nyata, dll.
- **Efektivitas Aktivitas Pengawasan** – Negara-negara dapat menilai kepatuhan Lembaga Keuangan dan Penyedia Barang dan Jasa dan Profesi yang Ditunjuk terhadap peraturan APU dan melacak kemajuan dan peningkatan berdasarkan langkah-langkah yang diterapkan. Hal ini dapat mencakup hasil inspeksi pengawasan, frekuensi inspeksi sesuai dengan risiko, dan penerapan sanksi yang proporsional dan bersifat pencegahan untuk ketidakpatuhan.
- **Peningkatan Pengajuan Laporan Transaksi Mencurigakan** - Sektor-sektor berisiko tinggi harus didorong untuk mengajukan Laporan Transaksi Mencurigakan. Tergantung pada kematangan sektor tersebut, pelatihan dan sosialisasi mungkin diperlukan untuk memastikan Laporan Transaksi Mencurigakan yang diajukan berkualitas baik.
- **Peningkatan Investigasi dan Penuntutan** – Seperti yang disebutkan sebelumnya dalam bab ini, negara-negara harus memandang peningkatan investigasi dan penuntutan sejalan dengan area berisiko tinggi. Data ini dapat digunakan untuk menunjukkan dampak operasional NRA terhadap aktivitas Badan Penegak Hukum.
- **Efektivitas Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas** – Banyak negara mengalokasikan kembali sumber daya dan mengembangkan pelatihan sebagai respons terhadap temuan NRA. Beberapa negara menguji efektivitasnya dengan menyertakan pengujian risiko ke dalam kegiatan pengawasan untuk memastikan pemahaman tentang temuan NRA. Data lain yang dapat digunakan antara lain adalah jumlah orang yang dilatih dan dari lembaga mana, umpan balik dari peserta pelatihan, hasil pengujian atau latihan yang diselesaikan sebagai bagian dari pelatihan.

Bagian Kesimpulan

Tabel 5. Bagian 3 Poin-Poin Utama

Tabel ini menyoroti elemen-elemen utama dari langkah-langkah yang harus diambil setelah pelaksanaan NRA selesai.

Sub-Bagian	Elemen Utama
Menyelaraskan Strategi dan Kebijakan APU dengan Risiko	Memastikan strategi dan kebijakan nasional bersifat responsif terhadap temuan NRA. Mengembangkan rencana aksi yang responsif terhadap risiko dan memprioritaskan pelaksanaan aksi tersebut berdasarkan risiko. Mengidentifikasi tenggat waktu, menetapkan tanggung jawab, dan memiliki mekanisme untuk memastikan akuntabilitas dan penyampaian aksi yang tepat waktu. Area berisiko rendah harus mempertimbangkan penerapan langkah-langkah mitigasi risiko yang disederhanakan atau tidak intensif. Mengalokasikan kembali sumber daya dari area berisiko rendah ke area berisiko tinggi berdasarkan temuan NRA dan bertujuan untuk lebih meningkatkan kapasitas otoritas melalui pelatihan.
Sosialisasi dan Keterlibatan Pemangku Kepentingan	Mengkomunikasikan temuan kepada semua pemangku kepentingan terkait dari otoritas yang berwenang dan sektor swasta. Mengambil pendekatan berbasis risiko yang terarah untuk ditindak-lanjuti dengan pemangku kepentingan. Tingkat dan konten keterlibatan harus disesuaikan dengan risiko dan kebutuhan pemangku kepentingan. Menargetkan untuk mendorong diskusi berkelanjutan tentang risiko antara para pemangku kepentingan untuk membentuk dasar NRA sebagai proses yang berkelanjutan.
Umpan Balik dan Peningkatan Proses NRA	Meninjau proses NRA dan melakukan modifikasi berdasarkan pelajaran yang dipetik untuk memperbaiki proses pengulangan di masa mendatang. Mencari umpan balik dari para pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta, tentang bagaimana mereka menggunakan temuan NRA dan bagaimana proses tersebut (termasuk dokumen yang dihasilkan) dapat lebih bermanfaat bagi mereka.

Lampiran A. Jenis Penilaian Risiko yang Melengkapi NRA

Lampiran ini melengkapi informasi pada bagian 3.3.3 yang membahas berbagai jenis Penilaian Risiko dan bagaimana jenis-jenis tersebut dapat dikaitkan dengan NRA dan meningkatkan pemahaman risiko suatu negara.

Penilaian Risiko Sektoral dan Tematik

Penilaian Risiko sektoral dan tematik memungkinkan negara untuk memusatkan perhatiannya pada sektor-sektor yang sedang berkembang atau area dengan peningkatan risiko tanpa harus menunggu atau melakukan pembaruan NRA ketika hal itu tidak praktis atau efisien untuk dilakukan. Penilaian Risiko sektoral dan tematik juga memungkinkan negara-negara untuk mengembangkan pemahaman yang lebih rinci mengenai ancaman dan kerentanan serta langkah-langkah mitigasi yang ada terkait dengan area kepentingan tertentu, misalnya terkait dengan sektor material atau ancaman utama. Hasil Penilaian Risiko sektoral dan tematik melengkapi hasil dari NRA dan juga dapat digunakan untuk mengoordinasikan tindakan otoritas dan memberikan informasi kepada sektor swasta. Hasilnya juga dapat dipertimbangkan untuk keperluan pembaruan NRA selanjutnya.

Keuntungan	Potensi Kekurangan
Analisis mendalam – Mempersempit ruang lingkup Penilaian Risiko ke sektor tertentu memungkinkan pengembangan tipologi tentang bagaimana sektor tersebut dapat disalahgunakan untuk tujuan TPPU dan oleh siapa. Hal ini memungkinkan otoritas untuk lebih memahami kerentanan spesifik industri dan langkah-langkah mitigasi yang ada. Hal ini dapat menjadi cara yang efektif untuk memeriksa sektor baru/yang sedang berkembang secara detail, atau sektor di mana risikonya telah berubah karena ancaman yang muncul atau karena perubahan dalam undang-undang dan peraturan. Metodologi NRA dapat diadaptasi untuk penilaian sektoral/tematik. Misalnya, Australia mengembangkan Penilaian Risiko pada koridor pengiriman uang antara Australia dan Kepulauan Pasifik dengan tujuan menyampaikan informasi lebih lanjut tentang risiko TPPU/TPPT yang terkait dengan pengiriman uang yang dikirim melalui penyedia pengiriman uang dari Australia ke negara-negara Kepulauan Pasifik dan membantu penyedia pengiriman uang dan bank untuk mengidentifikasi jenis dan skenario transaksi berisiko rendah.¹³	Lingkup terbatas - Penilaian Risiko Sektoral yang terisolasi mungkin memiliki fokus yang sempit dan mengabaikan isu-isu lintas sektoral yang berdampak pada banyak sektor (misalnya, penggunaan uang tunai). Meskipun lebih luas daripada Penilaian Risiko sektoral, Penilaian Risiko tematik mungkin kurang menganalisis isu-isu sistemik yang lebih luas dan hubungan antara berbagai tipologi dan sektor. Hal ini dapat menyebabkan kesenjangan dalam identifikasi dan mitigasi risiko.
Kemampuan Beradaptasi - Penilaian Risiko tematik dan sektoral dapat lebih fleksibel dan mudah beradaptasi dibandingkan dengan penilaian tingkat nasional yang luas, memungkinkan respons yang lebih cepat terhadap ancaman yang muncul, perubahan peraturan, atau pergeseran praktik industri.	Tantangan data – Negara-negara mungkin menghadapi tantangan ketika menilai sektor atau tema tertentu (misalnya, sektor yang sedang berkembang, sektor yang tidak diawasi, atau sektor yang baru-baru ini berada di bawah kerangka peraturan). Dalam kasus ini, negara-negara dapat mengandalkan laporan akademis dan intelijen sumber terbuka untuk mengembangkan Penilaian Risiko, tetapi hal ini dapat membatasi akurasi temuan dan kesimpulan.
Langkah-langkah mitigasi risiko yang ditargetkan - Penilaian Risiko Sektoral memfasilitasi pengembangan langkah-langkah mitigasi risiko yang ditargetkan dan intervensi peraturan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik khusus industri.	Pendekatan yang terfragmentasi – Penanganan risiko hanya pada satu sektor atau tema dapat menyebabkan suatu negara mencoba menangani risikonya secara terisolasi tanpa mempertimbangkan konsekuensi yang lebih luas di

¹³ [referensi: remittance-corridors-risk-assessment.pdf (austrac.gov.au)]

Keuntungan	Potensi Kekurangan
	seluruh sistem APU.
Kolaborasi industri – Pendekatan ini mendorong kolaborasi dan praktik pertukaran informasi di antara otoritas pemerintah, pelaku industri, otoritas pengawas, pakar khusus, dan pemangku kepentingan lainnya. Negara-negara harus berupaya untuk menumbuhkan budaya pertukaran informasi dan kerja sama yang berkelanjutan antara para pemangku kepentingan.	Kurangnya Pandangan holistik – Pendekatan ini mungkin tidak dapat mempertimbangkan faktor-faktor seperti tren makroekonomi, peristiwa geopolitik, atau perubahan lain dalam undang-undang atau peraturan yang dapat berdampak pada berbagai sektor/tema. Selain itu, tanpa masukan dari lembaga penegak hukum, penuntut umum, dll., pengawas tidak memiliki gambaran yang akurat tentang konteks dan lingkungan kejahatan nasional.
Peninjauan terhadap langkah-langkah yang ada – Kedua pendekatan tersebut memungkinkan negara untuk mengeksplorasi dampak undang-undang, peraturan, aktivitas pengawasan, dan langkah-langkah mitigasi risiko lainnya yang ada pada sektor atau tema tersebut. Contohnya, Denmark telah mengembangkan beberapa Penilaian Risiko tematik pada area seperti TPPU berbasis perdagangan karena risiko yang tinggi dan kurangnya pemahaman tentang risiko TPPU yang terkait dengannya, dan penggunaan uang tunai dalam ekonomi kriminal, karena mereka memperkenalkan undang-undang baru untuk memberantasnya dan kerentanan yang terkait dengan hal tersebut telah berubah.	

Catatan: potensi kekurangan ini relevan terutama ketika Penilaian Risiko sektoral atau tematik dilakukan secara terpisah.

Tujuan dari Penilaian Risiko sektoral adalah untuk memberikan analisis yang ditargetkan terhadap risiko pencucian uang dalam sektor, sub-sektor, atau industri tertentu. Penilaian ini memeriksa karakteristik unik, kerentanan, dan tipologi yang terkait dengan sektor tersebut, termasuk semua aktivitas, layanan, dan produk yang ditawarkan sektor tersebut, profil pelanggan, model bisnis, bagaimana transaksi keuangan terjadi, dan tren penggunaan yang sudah mapan dan yang sedang berkembang. Penilaian ini juga harus mempertimbangkan paparan sektor terhadap ancaman lintas batas, yang dapat bervariasi tergantung pada ukuran sektor, lokasi negara, dan apakah klien adalah warga negara tersebut atau bukan. Penilaian Risiko Sektoral dapat memberikan informasi kepada NRA, tetapi temuan NRA juga dapat menunjukkan kurangnya pemahaman di sektor-sektor tertentu yang kemudian dapat diprioritaskan oleh negara untuk Penilaian Risiko sektoral setelah dilakukannya NRA.

Penilaian Risiko Tematik menitik-beratkan pada tema-tema spesifik atau isu-isu lintas sektoral yang menciptakan risiko TPPU. Negara-negara dapat memilih untuk memusatkan perhatian pada risiko yang sudah mapan, misalnya, penggunaan uang tunai atau pembayaran digital yang dapat berdampak pada banyak sektor, atau risiko Ancaman, misalnya, penipuan yang didukung oleh teknologi siber, yang mungkin belum dieksplorasi secara detail oleh negara tersebut dan berpotensi menjadi risiko yang signifikan. Pemerintah harus memprioritaskan tema-tema yang akan dieksplorasi berdasarkan ancaman yang ditimbulkannya bagi negara. Penilaian Risiko tematik harus bertujuan untuk memahami risiko yang terkait dengan bidang studi yang dipilih dengan menganalisis kerentanan, modus operandi, tipologi, dan potensi kecenderungan serta dampak penyalahgunaan untuk TPPU, termasuk celah apa pun yang dapat dieksploitasi. Penilaian Risiko tematik umumnya memiliki jangkauan yang lebih luas daripada Penilaian Risiko sektoral karena tema-tema yang dibahas dapat berdampak pada berbagai sektor atau industri.

Penilaian Risiko Supranasional dan Sub-nasional

Penilaian Risiko supranasional (SNRA) adalah analisis yang dilakukan di tingkat regional atau internasional, yang mengidentifikasi risiko TPPU di berbagai negara atau negara anggota dalam organisasi regional atau internasional seperti Uni Eropa atau FSRB. Biasanya penilaian ini akan dipimpin oleh organisasi supranasional untuk memastikan bahwa penilaian tersebut mempertimbangkan ancaman dan kerentanan lintas batas yang memengaruhi blok atau wilayah tersebut, dan bukan konsolidasi penilaian dari masing-masing negara.

Penilaian Risiko semacam itu tidak boleh menggantikan Penilaian Risiko nasional yang akan dilakukan oleh masing-masing negara anggota, yang tetap paling tepat untuk mengidentifikasi, menilai, dan menentukan cara mengurangi risiko di negara mereka sendiri. Namun, hasilnya dapat membantu masing-masing negara dalam melakukan penilaian mereka sendiri.

Penilaian Risiko Supranasional memungkinkan:

- **Perspektif Regional yang Komprehensif** – Penilaian Risiko Supranasional memberikan analisis komprehensif tentang risiko yang melampaui batas negara, yang sangat penting mengingat risiko lintas batas yang terkait dengan TPPU dan yang tidak selalu dapat diidentifikasi dan dikurangi melalui pendekatan masing-masing negara.
- **Standardisasi** – Pendekatan ini dapat mendorong standarisasi metodologi Penilaian Risiko, langkah-langkah mitigasi, peringkat risiko, dan kerangka peraturan di berbagai negara yang mengarah pada pendekatan yang konsisten dan kolaboratif untuk mengatasi area berisiko tinggi di kawasan tersebut. Misalnya, ketika melakukan NRA mereka, masing-masing negara anggota dapat mempertimbangkan untuk menilai risiko yang terkait dengan semua produk dan layanan yang relevan yang dinilai berdasarkan Penilaian Risiko supranasional.
- **Pertukaran Informasi** – Penilaian Risiko Supranasional memfasilitasi pertukaran informasi dan kolaborasi antar negara, lembaga di dalam negara, dan organisasi internasional. Hal ini memungkinkan dan mendorong mereka untuk berbagi praktik terbaik, intelijen, dan sumber daya untuk secara efektif memberantas TPPU di tingkat regional.
- **Peningkatan Efektivitas Penilaian Risiko** – Karena Penilaian Risiko supranasional dapat memanfaatkan sumber daya dan keahlian dari berbagai negara, maka penilaian ini meningkatkan identifikasi dan penilaian ancaman dan kerentanan yang muncul serta risiko lintas batas yang mungkin tidak terlihat di tingkat nasional.
- **Rekomendasi Bersama** – Penilaian Risiko supranasional dapat menghasilkan pengembangan rekomendasi bersama untuk negara-negara anggota termasuk otoritas publik dan operator sektor swasta, yang mengarah pada pendekatan yang lebih kuat dan harmonis dalam mengurangi risiko yang teridentifikasi.

Kotak A.1. Penilaian Risiko Supranasional

Komisi Eropa

Komisi Eropa telah menerbitkan tiga Penilaian Risiko Supranasional (SNRA), pada tahun 2017, 2019, dan 2022. SNRA keempat akan diterbitkan pada tahun 2025. SNRA 2022 memberikan gambaran komprehensif tentang risiko TPPU/TPPT di Uni Eropa dan rekomendasi untuk menanggulangnya. Pasal 6(1) dari Arahan Anti-Pencucian Uang mengharuskan Komisi Eropa untuk memperbarui SNRA setiap dua tahun, dan untuk menilai kembali semua sektor yang tercakup dalam proses pengulangan sebelumnya dan menyesuaikan informasi yang sebelumnya termasuk pada sektor-sektor di mana risikonya tidak berubah. Jika risiko telah berubah, Komisi Eropa mengkalkulasi ulang tingkat risikonya.

Versi 2022 menganalisis risiko TPPU/TPPT saat ini dan menilai seberapa baik negara-negara telah menerapkan rekomendasi mitigasi risiko dari pengulangan sebelumnya, serta mengevaluasi tingkat risiko residual.

Komisi Eropa melakukan konsultasi menyeluruh dengan para pemangku kepentingan termasuk organisasi tingkat Uni Eropa, para ahli tingkat nasional dan akademisi, serta mempertimbangkan NRA negara-negara anggota.

Banyak negara anggota Uni Eropa melaporkan telah mengacu pada SNRA sebagai bagian dari proses NRA mereka sendiri.

Di bawah kerangka kerja APU/PPT Uni Eropa yang baru, Penilaian Risiko APU/PPT di tingkat Uni (Union RA) akan diterbitkan pada tahun 2028 (Pasal 7 Arahan (UE) 2024/1640) dan diperbarui setiap empat tahun. Komisi Eropa dapat memperbarui bagian-bagian laporan lebih sering, jika sesuai.

Laporan ini setidaknya harus mencakup area dan sektor pasar internal yang terpapar risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme; sifat dan tingkat risiko yang terkait dengan setiap area dan sektor; cara yang paling umum digunakan untuk mencuci uang hasil kejahatan, termasuk, jika ada, cara-cara yang khususnya digunakan dalam transaksi antara Negara Anggota dan negara ketiga; Penilaian terhadap risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme yang terkait dengan badan hukum dan pengaturan hukum, termasuk paparan terhadap risiko yang berasal dari badan hukum asing dan pengaturan hukum asing serta risiko tidak dilaksanakannya dan penghindaran sanksi keuangan yang ditargetkan.

Menurut kerangka kerja APU/PPT Uni Eropa yang baru, terdapat juga persyaratan pembaruan empat tahun untuk NRA (“setidaknya setiap 4 tahun”, Pasal 8(1) Direktif (UE) 2024/1640).

Kelompok Eurasia untuk Memberantas TPPU dan TPPT (EAG)

Pada tahun 2020-2022, EAG melakukan Penilaian Risiko TPPU/TPPT di wilayah Eurasia, mengidentifikasi baik risiko regional, ancaman, dan kerentanan maupun risiko sub-regional (untuk kelompok Negara Anggota atau entitas supranasional tertentu). Berdasarkan hasil penilaian tersebut, Rencana Aksi (Peta Jalan) dikembangkan untuk mengurangi risiko yang teridentifikasi, yang mencakup langkah-langkah organisasi, serta langkah-langkah supranasional khusus yang bertujuan untuk meminimalkan risiko, ancaman, dan kerentanan, termasuk melalui pembentukan alat dan mekanisme regional untuk mengatasi kurangnya kepatuhan teknis terhadap undang-undang nasional dan untuk meningkatkan efektivitas sistem APU/PPT/PPP nasional.

Anggota EAG didorong untuk menggunakan hasil Penilaian Risiko supranasional ini untuk

memberikan informasi bagi NRA mereka, dan banyak anggota EAG melaporkan bahwa konsultasi merupakan bagian dari proses Penilaian Risiko tingkat nasional mereka.

Penilaian Risiko sub-nasional mengamati risiko TPPU yang spesifik untuk wilayah geografis tertentu dan umumnya digunakan oleh negara-negara dengan sistem federal atau jangkauan geografis yang luas termasuk wilayah seberang laut. Jika suatu negara melakukan beberapa Penilaian Risiko sub-nasional, negara tersebut juga harus mempertimbangkan untuk mengkonsolidasikan temuan-temuan ini dalam sebuah NRA.

Penilaian Risiko sub-nasional memungkinkan:

- **Pemahaman yang Lebih Detail** - Penilaian Risiko TPPU sub-nasional memberikan pemahaman yang lebih detail tentang ancaman dan kerentanan TPPU dalam wilayah geografis tertentu, seperti kota, wilayah, atau distrik. Penilaian ini mempertimbangkan faktor-faktor yang membedakannya dari bagian lain negara, misalnya, demografi penduduk di sana, kedekatan dengan perbatasan, pembangunan ekonomi, tingkat kejahatan, yang memungkinkan analisis yang ditargetkan terhadap faktor-faktor lokal yang berkontribusi pada aktivitas TPPU.
- **Langkah-langkah Mitigasi yang Terarah** – Dengan berfokus pada konteks lokal, penilaian sub-nasional memungkinkan pengembangan intervensi dan strategi mitigasi risiko yang disesuaikan untuk mengatasi kebutuhan dan tantangan spesifik komunitas, industri, atau sektor di wilayah tersebut.
- **Keterlibatan Masyarakat** – Pendekatan ini melibatkan pemerintah daerah, lembaga penegak hukum, bisnis, dan kelompok masyarakat untuk mendorong kolaborasi yang baik di antara para pemangku kepentingan utama dan keterlibatan dalam proses Penilaian Risiko.
- **Tren Pendeteksian Dini** – Penilaian Risiko sub-nasional dapat mengarah pada tren pendeteksian dini dan tren tipologi TPPU yang muncul di wilayah geografis tertentu, sehingga memungkinkan pihak berwenang untuk bertindak cepat dan mengurangi risiko sebelum meningkat ke tingkat nasional.

Kotak A.2. Penilaian Risiko Sub-nasional Jerman

Penilaian Risiko Nasional (NRA) Jerman didasarkan pada dan dibangun berdasarkan Penilaian Risiko dan sumber lain, termasuk Penilaian Risiko Supranasional Uni Eropa (SNRA), penilaian sektoral atau spesifik isu oleh otoritas federal dan Länder, serta masukan dari sektor swasta dan akademisi.

Setelah NRA dilakukan, 16 Länder (negara bagian) Jerman ditugaskan untuk melakukan Penilaian Risiko independen mereka sendiri. Mereka mengidentifikasi perbedaan regional, yang mengarah pada kesimpulan yang berbeda mengenai tingkat risiko sektor atau produk tertentu di setiap Länder dibandingkan dengan temuan NRA pada tingkat nasional. Misalnya, jika NRA menilai pedagang barang, termasuk seni dan barang antik, memiliki risiko TPPU menengah-tinggi, penilaian Bavaria menganggap risiko di wilayah tersebut rendah, dengan mempertimbangkan ukuran pasar, basis pelanggan, dan jenis transaksi. Beberapa penilaian Länder menawarkan perspektif yang lebih cermat mengenai risiko pada Bisnis dan Profesi Non-Kuangan yang Ditunjuk dibanding yang diberikan dalam analisis NRA. Jerman berencana untuk mengumpulkan temuan-temuan ini guna memberikan pemahaman tingkat nasional tentang risiko relatif di berbagai sektor dan wilayah.

Beberapa pertimbangan dan tantangan dari pendekatan supranasional dan sub-nasional adalah sebagai berikut:

- **Koordinasi** – Semua Penilaian Risiko dapat dihadapkan pada tantangan koordinasi, tetapi hal ini terutama terjadi pada Penilaian Risiko supranasional dan sub-nasional. Karena para pemangku kepentingan dalam penilaian ini mungkin dalam beberapa kasus tidak memiliki hubungan satu sama lain, penting bagi entitas yang memimpin proses untuk memastikan dukungan dan koordinasi yang memadai sebagai bagian dari proses tersebut. Seperti halnya proses NRA, kolaborasi di antara para pemangku kepentingan tersebut dapat berkontribusi untuk meningkatkan hubungan lintas batas.
- **Hilangnya Kekhususan Lokal (Supranasional) atau Luasnya Cakupan Tingkat Nasional (Sub-nasional)** – Penilaian Risiko supranasional mungkin kurang berfokus pada risiko yang terjadi di tingkat nasional, karena tujuannya seringkali untuk memahami dan menilai risiko global dan lintas batas yang memengaruhi kelompok negara tempat penilaian dilakukan. Ini berarti bahwa hasilnya tidak selalu mempertimbangkan faktor kontekstual spesifik negara yang memengaruhi lanskap risiko dan terkadang dapat menyebabkan kurangnya detail dalam Penilaian Risiko. Perlu diingat bahwa SNRA biasanya tidak menggantikan persyaratan untuk melakukan Penilaian Risiko di tingkat nasional, dan bahwa tingkat detail yang diperlukan untuk mengembangkan pemahaman yang rinci tentang risiko dicapai melalui Penilaian Risiko khusus negara.
- **Ketergantungan pada Penilaian Risiko Eksternal (Supranasional)** - Mengandalkan sepenuhnya pada sumber informasi dan keahlian eksternal untuk Penilaian Risiko dapat mengakibatkan suatu negara mengadopsi metodologi, kerangka kerja, dan indikator risiko tersebut. Hal ini tidak memungkinkan negara tersebut untuk menyesuaikan pendekatannya berdasarkan risiko dan konteksnya sendiri.
- **“Kepemilikan” Terhadap Proses** - Beberapa negara mungkin melihat Penilaian Risiko supranasional sebagai pelanggaran terhadap hak mereka untuk mengelola risiko mereka sendiri, dan tidak merasa memiliki proses tersebut karena dikelola oleh organisasi supranasional. Inilah sebabnya mengapa keterlibatan awal dan berkelanjutan diperlukan untuk mendukung kolaborasi. Selain itu, penilaian sub-nasional mungkin kesulitan untuk melibatkan otoritas lokal dan mempromosikan perlunya pemahaman risiko, terutama di daerah dengan sumber daya, kapasitas, dan kesadaran risiko yang terbatas.

Lampiran B. Ringkasan Tingkat Tinggi atas Tanggapan terhadap Konsultasi Publik

1. **Pertanyaan 1:** Cara apakah yang paling bermanfaat yang dapat dilakukan sektor swasta, masyarakat sipil, dan akademisi untuk berkontribusi pada NRA?

Ringkasan Tanggapan: Cara paling bermanfaat yang dapat dilakukan sektor swasta, masyarakat sipil, dan akademisi untuk berkontribusi pada NRA adalah melalui forum dan diskusi reguler, survei dan konsultasi terbuka, partisipasi dalam kelompok kerja khusus, kolaborasi dengan lembaga akademik dalam penelitian mendalam yang spesifik, dan penyediaan keahlian teknis dan nasihat khusus.

Hal lain yang diidentifikasi meliputi: Kolaborasi berbagai sektor antara asosiasi masyarakat sipil, organisasi swasta, dan akademisi untuk bekerja sama dalam mengidentifikasi dan menilai risiko yang muncul, dengan memanfaatkan perspektif dan pengalaman unik mereka, melengkapi tanggapan sebelumnya. Selain itu, keterlibatan awal sektor swasta pada tahap awal proses akan memastikan bahwa kategori risiko sesuai dengan praktik industri, memungkinkan penerapan bobot risiko yang terperinci dan tepat.

2. **Pertanyaan 2:** Cara apakah yang paling efektif yang dapat dilakukan negara untuk melibatkan sektor swasta, masyarakat sipil, dan akademisi dalam NRA?

Ringkasan Tanggapan: Cara paling efektif yang dapat dilakukan negara-negara agar sektor swasta, masyarakat sipil, dan akademisi dapat berkontribusi pada NRA adalah dengan menyelenggarakan lokakarya dan seminar pendidikan, serta merencanakan sesi pelatihan khusus untuk sektor-sektor terkait. Tanggapan juga menyoroti perlunya diciptakannya platform digital untuk penyampaian umpan balik dan pelaporan. Banyak juga yang menyebutkan perlunya kolaborasi dengan kamar dagang dan asosiasi profesional, serta partisipasi aktif mereka dalam proses peninjauan kebijakan. Semua sepakat tentang perlunya pendekatan terstruktur dan berkelanjutan untuk mengumpulkan dan menanggapi umpan balik.

3. **Pertanyaan 3:** Bagaimana sektor swasta, masyarakat sipil, dan akademisi menggunakan hasil NRA? Apakah ada indikator kinerja utama atau metode lain untuk mengukur dampak NRA?

Ringkasan Tanggapan: Hasil NRA memungkinkan dibuatnya kebijakan kepatuhan dan manajemen risiko, memfasilitasi peningkatan program pelatihan dan kesadaran, dan memungkinkan penyesuaian strategi operasional entitas yang berkewajiban berdasarkan risiko yang diidentifikasi.

Perlu juga dicatat bahwa hasil NRA mendorong pengembangan inisiatif baru untuk mengurangi risiko dan mempromosikan pemantauan dan evaluasi risiko yang berkelanjutan. Hasil NRA mendorong berbagai inisiatif pelatihan seperti implementasi program pembelajaran berdasarkan risiko yang diidentifikasi, sehingga meningkatkan kesadaran dan kesiapan dalam menghadapi ancaman. Hasil NRA juga menjadi dasar rekomendasi untuk pembaruan kebijakan, yang digunakan untuk memperbarui kebijakan kepatuhan dan manajemen risiko berdasarkan praktik terbaik yang direkomendasikan.

4. **Pertanyaan 4:** Bagaimana negara dapat merancang proses dan hasil NRA untuk memaksimalkan manfaatnya bagi sektor swasta, masyarakat sipil, dan akademisi?

Ringkasan Tanggapan: Sektor swasta merekomendasikan agar negara merancang proses NRA sedemikian rupa sehingga mendorong kolaborasi erat dengan semua pemangku kepentingan sejak awal, sehingga memungkinkan mereka untuk memperoleh pedoman yang jelas dan spesifik untuk kepatuhan.

Semua pemangku kepentingan menyebutkan perlunya berinvestasi dalam inisiatif peningkatan kapasitas dan pembuatan alat yang berguna dan sumber daya untuk penanganan risiko. Terakhir, semua pemangku kepentingan menyerukan transparansi dan akses ke data dan hasil NRA agar dilakukan penelitian guna memfasilitasi penelitian lebih lanjut dan pemahaman yang lebih baik tentang risiko.

5. **Pertanyaan 5:** Dapatkah Anda memberikan contoh konkret tentang bagaimana temuan NRA telah digunakan untuk meningkatkan proses manajemen risiko Anda sendiri?

Ringkasan Tanggapan: Hasil yang diperoleh untuk pertanyaan ini sebagian besar konsisten dengan jawaban untuk pertanyaan 3.

Bagi sebagian besar pihak, temuan NRA telah digunakan untuk meningkatkan proses manajemen risiko mereka sendiri melalui penggunaan hasil untuk memperbarui kebijakan kepatuhan dengan memastikan bahwa praktik selaras dengan rekomendasi manajemen risiko terbaru dan penerapan ketat temuan NRA dalam Penilaian Risiko internal.

Temuan NRA juga telah memicu penguatan pengendalian internal dan prosedur audit. Penerapan praktik terbaik yang direkomendasikan oleh NRA dan implementasi program pelatihan berdasarkan risiko yang teridentifikasi juga merupakan poin yang berulang.

6. **Pertanyaan 6:** Mekanisme apakah yang paling tepat dan efektif bagi sektor swasta, masyarakat sipil, dan akademisi untuk memberikan umpan balik tentang NRA?

Ringkasan Tanggapan: Para pemangku kepentingan merekomendasikan pembuatan portal daring khusus untuk mengirimkan umpan balik dan penyelenggaraan pertemuan konsultasi reguler. Para pemangku kepentingan menyarankan publikasi informasi yang relevan dan memastikan pelatihan bagi semua pihak yang terlibat dalam NRA.

www.fatf-gafi.org

November 2024

Untuk membangun kerangka kerja APU (Anti-Pencucian uang) nasional yang kuat, negara-negara harus memprioritaskan pemahaman mendalam tentang risiko Pencucian uang. Dokumen pedoman ini mendukung negara-negara dalam melakukan Penilaian Risiko Nasional (NRA) Pencucian uang, dengan memanfaatkan wawasan dari lebih dari 90 negara dalam Jaringan Global FATF.